



Citra Kabupaten

KARAWANG

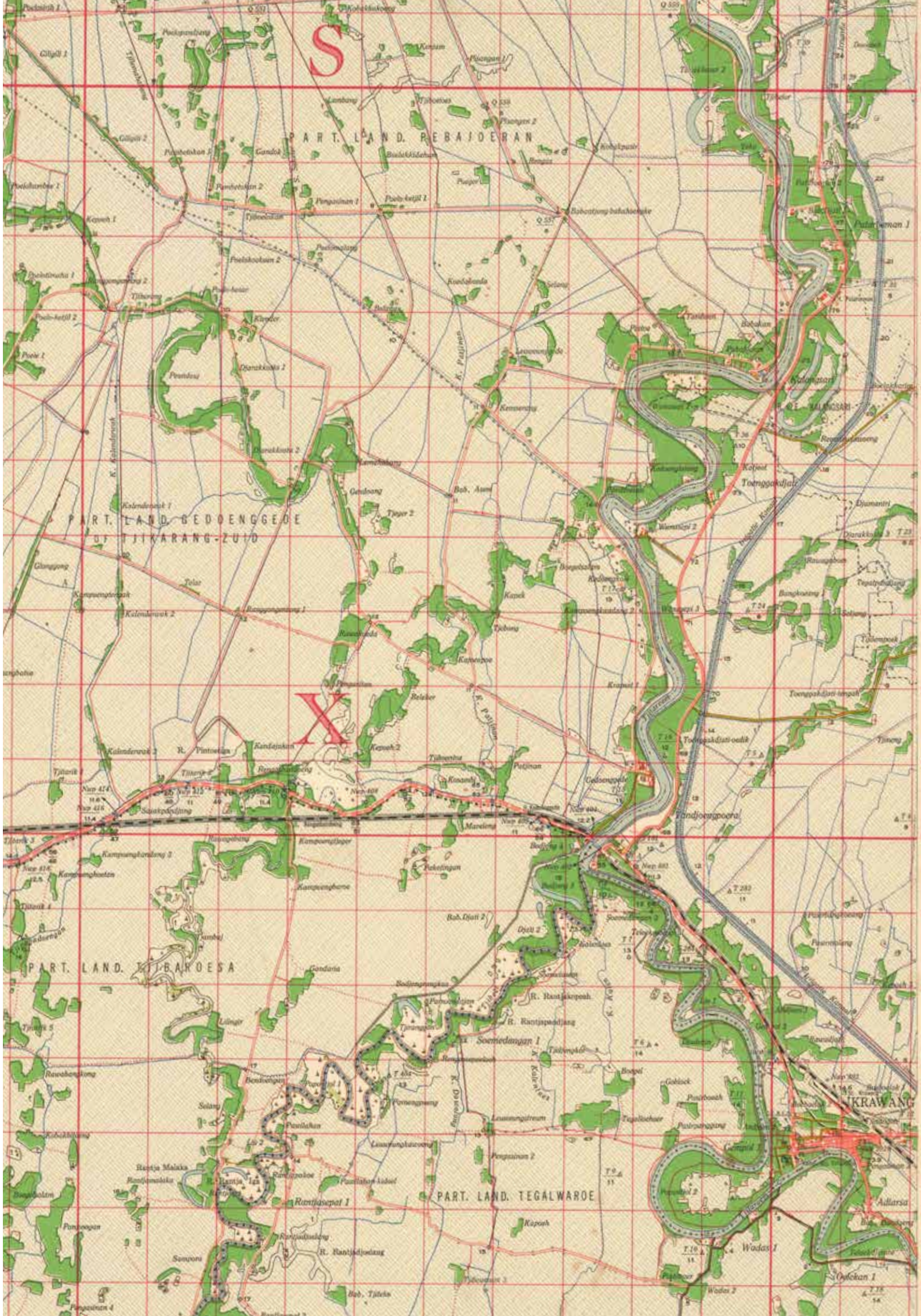
dalam

Arsip



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2024





S

PART. LAND. REBAIDERAN

PART. LAND. GEDDENGGEDE
OF TIKARANG-ZUID

X

PART. LAND. TIBAROEESA

PART. LAND. TEGALWARDE

KRAWANG

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- i. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Citra Kabupaten
KARAWANG
dalam **Arsip**



Arsip Nasional Republik Indonesia

Citra Kabupaten
KARAWANG
dalam
Arsip

Pengarah

Drs. Imam Gunarto, M.Hum
Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Dr. Kandar, MAP

Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, Dan Pelindungan Arsip

Penanggung Jawab Program

Eli Ruliawati

Direktur Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Penanggung Jawab Teknis

R. Suryagung Sudibyo Putro, S.S, M.Hum

Narasumber

Dr. Miftahul Falah, M.Hum.

Penulis

Bayu Amde Winata

Penelusur Arsip

Desi Mulyaningsih, S.Kom | Anggi Suryaningtia, A.Md
Ghesa Ririan Mitalia, S.Hum | Achmad Hamsari, S.ST. Ars
Eviani Yusnita, S.IP | Zara Andriani, S.I.Kom
Siti Fatimah, S.Pd | Setya Prawitasari, S.E

Penerjemah

Meyrina Megasari, M.Hum

Desain & Layout

Deny Hamzah, A.Md | Beny Oktavianto

Penerbit

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan 12560
Telp. (+6221) 780 5851 Fax. (+6221) 781 0280

ISBN



Hak Cipta © 2024

Hak Publikasi pada Arsip Nasional Republik Indonesia dan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam
bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.



Arsip Nasional
Republik Indonesia



Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Karawang





PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KARAWANG

Sumber : <https://www.karawangkab.go.id/>



LAMBANG PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG



H. AEP SYAEPULOH, S.E
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 4-12-2023 - Sekarang



H. ASEP AANG RAHMATULLAH, S.STP., M. P.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang

Periode 6 September 2024 - sekarang



H. ENDANG SODIKIN, S.Pd.I., S.H., M.H.

Ketua DPRD Kabupaten Karawang
Periode 2024 - 2029

BUPATI KABUPATEN KARAWANG DARI MASA KE MASA



R.M. Hasan Surya Saca Kusumah
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1949 - 1950



Raden Rubaya
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1950 - 1951



Moh. Tohir Mangku Dijoyo
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1951 - 1960



Letkol Inf. H. Husny Hamid
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1960 - 1971



Kolonel Inf. Setia Syamsi
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1971 - 1976



**Kolonel Inf. Tata Suwanta
Hadisaputra**
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1976 - 1981



Kolonel Cpl. H. Opon Sopandji
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1981 - 1986



Kolonel Czi. H. Sumarno Suradi
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1986 - 1996



**Kolonel Inf. Drs. H. Dadang S.
Muchtar**
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 1996 - 2000



R. H. Daud Priatna, SH, M.Si
Plt. Bupati Kabupaten Karawang
Periode 2000



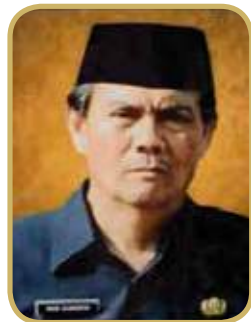
Letkol (Purn) Achmad Dadang
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 2000 - 2005



Drs. H. D. Salahudin Muftie, M.Si
Plt. Bupati Kabupaten Karawang
Periode 18-11-2005 s.d. 15-12-2005



Drs. H. Dadang S. Muchtar
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 2005 - 2010



Ir. H. Iman Sumantri
Plt. Bupati Kabupaten Karawang
Periode Desember 2010



Drs. H. Adeswara, MH
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 2010 - 2015



dr. Cellica Nurrachadiana
Plt. Bupati Kabupaten Karawang
Periode 2014 - 2015



Ir. Deddi Mulyadi
Pj. Bupati Kabupaten Karawang
Periode Desember 2015 -
Februari 2016



dr. Cellica Nurrachadiana
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 2016 - 2021



DR. Ir. Yerry Yanuar, MM
Pjs. Bupati Kabupaten Karawang
Periode 26-9-2020 s.d. 5-12-2020



Drs. H. Acep Jamhuri, M.Si
Plh. Bupati Kabupaten Karawang
Periode 17 - 26 Februari 2021



dr. Hj. Cellica Nurrachadiana
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 26-2-2021 s.d. 4-11-2023



H. Aep Syaepuloh, S.E
Plt. Bupati Kabupaten
Karawang
Periode 4-11-2023 s.d. 4-12-2023



H. Aep Syaepuloh, S.E
Bupati Kabupaten Karawang
Periode 4-12-2023 s.d. Sekarang



**Drs. Teppy Wawan Dharmawan,
SH., M. K. M.**
Pjs. Bupati Kabupaten Karawang
Periode 19-9-2024 s.d. 23-11-2024
(Mengemban tugas menjadi Pjs dika-
renakan Bupati cuti diluar tanggungan
negara untuk melaksanakan kampanye
pada Pilkada Serentak tahun 2024)





SAMBUTAN



SAMBUTAN BUPATI KARAWANG

Bismillahirrahmanirohim.

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bekerja, mendedikasikan tenaga dan pikiran kita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk terus berkarya memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang mempunyai luas 1.911.00 Km² yang terbagi dalam 30 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 297 Desa. Berbagai macam suku bangsa dan etnis tinggal disini dari Suku Sunda, Jawa, Batak, Minangkabau, Madura, Bugis, Arab, Tionghoa maupun para pendatang lainnya karena Karawang sebagai salah satu Kawasan Industri yang menjadi magnet bagi para pendatang. Semuanya hidup harmonis, rukun, damai serta saling bertoleransi. Hal ini menjadi bukti Kabupaten Karawang dapat menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Suatu Kebanggaan bagi kami keberadaan Kabupaten Karawang diangkat menjadi salah satu Khasanah Arsip yang di tuangkan dalam Buku Citra Daerah sehingga dapat turut melengkapi memori kolektif bangsa yang diwujudkan dalam suatu Citra Daerah Kabupaten Karawang.

Penyusunan Citra Daerah Kabupaten Karawang ini sangat penting untuk dilaksanakan, sebab banyak sejarah yang harus disampaikan dan diketahui oleh khalayak, agar semangat untuk membangun daerah terus meningkat,serta menjadi upaya untuk menghormati setiap jasa-jasa para pemimpin maupun masyarakat yang telah memberikan sumbangsih penuh demi kemajuan Kabupaten Karawang.

Kita tidak boleh lupa, sejarah berperan besar dalam membentuk jati diri bangsa dan arsip memiliki peran penting ketika kehadiran arsip itu bisa memantik ingatan kolektif yang dapat digunakan untuk membentuk identitas bersama.

Mengenalkan dan mempromosikan daerah tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah, nilai-nilai budaya, serta potensi yang dimilikinya. Buku Citra Daerah ini adalah salah satu langkah konkret dalam membangun kesadaran akan pentingnya identitas daerah dan kebanggaan sebagai warga Karawang. Dengan membaca sejarah yang ada pada Buku Citra Daerah, masyarakat akan mengetahui dan sadar tentang perjalanan sejarah Kabupaten Karawang serta merasa ada ikatan kuat karena suatu pengalaman bersama.

Untuk itu atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang, serta pihak yang terkait atas tersusunnya buku Citra Daerah Kabupaten Karawang. Kiranya dengan sinergitas bersama, seluruh koleksi kearsipan terkait Kabupaten Karawang dapat terselamatkan dan terlayankan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga pada akhirnya Buku Citra Daerah menjadi media yang dapat menginformasikan kepada pembaca khususnya generasi muda, bagaimana upaya bersama dalam membentuk citra positif daerah hingga berada pada kemajuan pembangunan dalam upaya terwujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Karawang.

Selamat membaca Buku Citra Daerah Kabupaten Karawang, semoga dapat dimanfaatkan dengan baik dan memiliki nilai guna bagi kebijakan pembangunan di masa mendatang, serta teruslah berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi sejarah pada setiap kemajuan yang dicapai oleh Kabupaten Karawang.

Teriring doa dan harapan, kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa mengiringi setiap langkah yang kita lakukan.

Karawang, 19 November 2024

Pjs. Bupati Karawang



Teppy W. Dharmawan



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, beragam agama dan budaya. Keunikan Indonesia terletak pada keanekaragaman dan warna-warni indah tergambar secara beruntun dalam perjalanan sejarahnya yang penuh dinamika. Perjalanan sejarah Indonesia tersebut terekam dalam arsip, baik dalam arsip konvensional maupun dalam arsip media baru. Arsip merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa, oleh karenanya arsip perlu diselamatkan, dipelihara dan dilestarikan. Arsip menjadi bagian dari pendokumentasian kekayaan seni budaya dan sebaiknya disajikan secara menarik sehingga menguatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda pada budaya bangsanya (Presiden Joko Widodo, Juli 2021).

Khazanah arsip mengenai Kabupaten Karawang banyak tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Jejak Karawang yang dikenal sebagai kota lumbung padi dan industri, terlihat dengan adanya peraturan kepemilikan lahan pertanian pada masa kolonial, pembangunan industri dan penanaman modal di kawasan Karawang. Dalam bidang infrastruktur dan transportasi juga semakin berkembang pesat dengan pembangunan jalur kereta api Batavia - Karawang pada abad ke-19.

Citra Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan, memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terekam dalam arsip baik dalam bentuk teks, peta maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah memberikan gambaran tentang kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah.

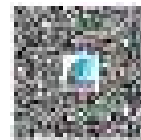
Citra Daerah merupakan satu kesatuan informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Citra Daerah Kabupaten Karawang

berasal dari koleksi Khazanah Arsip Nasional Republik Indonesia dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang.

Citra Daerah Kabupaten Karawang ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran Citra Daerah ini diharapkan dapat mendorong berkembangnya program lanjutan dari Pemerintah Daerah Karawang khususnya di bidang kearsipan.

Jakarta, 14 September 2024

Plt. Kepala ANRI,



Drs. Imam Gunarto, M.Hum

DAFTAR ISI

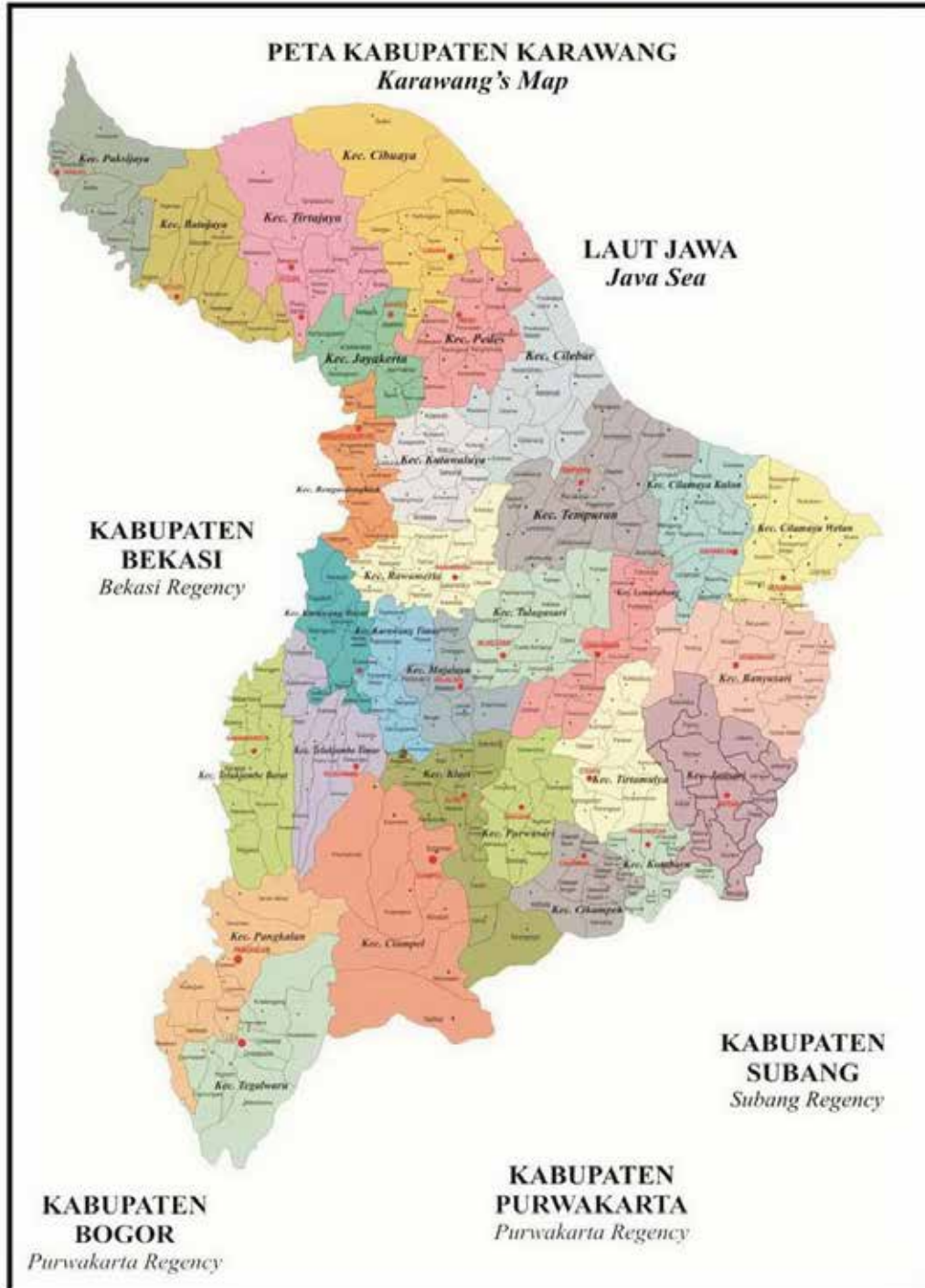
Halaman Judul.....	iii
Peta Wilayah Kabupaten Karawang.....	v
Lambang Pemerintah Kabupaten Karawang.....	vi
Bupati Karawang.....	vii
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.....	viii
Ketua DPRD Kabupaten Karawang.....	ix
Bupati Karawang dari masa ke masa	x
Sambutan Bupati Karawang	xiv
Sambutan Kepala Arsip Nasional RI.....	xvi
Daftar Isi	xviii
PENDAHULUAN	1
A. Karawang pada masa Prasejarah dan Hindu Budha	5
B. Karawang pada Masa Kerajaan Islam hingga Kedatangan Bangsa Eropa.....	6
C. Karawang pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	8
D. Karawang pada Masa Pendudukan Jepang.....	12
E. Karawang Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia	13
CITRA KABUPATEN KARAWANG DALAM ARSIP.....	17
A. Geografis	18
B. Politik dan Pemerintahan	26
C. Infrastruktur	48
D. Transportasi	74
E. Pertanian	84
F. Perikanan & Peternakan	92
G. Perekonomian & Industri	102
H. Sosial Budaya	110
I. Pendidikan & Keagamaan.....	132
Daftar Pustaka	141
Penutup	145



PENDAHULUAN



Karawang adalah sebuah wilayah daerah administrasi tingkat II (kabupaten) yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Karawang berada di Kecamatan Karawang Barat. Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah 1.911 km². Secara administratif, Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:



1. Sebelah Utara : Laut Jawa.
2. Sebelah Timur : Kabupaten Subang.
3. Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta.
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor.
5. Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi



Kabupaten Karawang termasuk ke dalam wilayah kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Karawang sebanyak 2.519.882 jiwa dengan rasio kepadatan penduduk 1.300 jiwa per km². Angka ini mengalami kenaikan dari perhitungan pada tahun 2022 dimana jumlah penduduk Kabupaten Karawang tercatat 2.505.247 jiwa¹. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Karawang berarti bahwa angka kelahiran masih cukup tinggi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Karawang juga dipengaruhi oleh arus urbanisasi ke Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan dan 309 desa/kelurahan yang terdiri dari 297 desa dan 12 kelurahan. Berdasarkan kategorinya, sebanyak 175 desa/kelurahan berkategori swadaya, 126 desa/ kelurahan swakarya, dan 8 desa/ kelurahan swasembada. Penamaan Kecamatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Karawang²

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Pangkalan	Ciptasari	97.38	8
2	Tegalwaru	Cintalaksana	109.45	9
3	Ciampel	Kutapohaci	117.63	7
4	Teluk Jambe Timur	Teluk Jambe	45.86	9
5	Teluk Jambe Barat	Karangmulya	66.63	10
6	Klari	Duren	72.76	13
7	Cikampek	Dawuan Tengah	38.71	10
8	Purwasari	Sukasari	31.58	8
9	Tirtamulya	Citarik	46.60	10
10	Jatisari	Mekarsari	54.85	14
11	Banyusari	Gembongan	55.30	12
12	Kotabaru	Wancimekar	33.56	9
13	Cilamaya Wetan	Mekarmaya	77.95	12
14	Cilamaya Kulon	Sukamulya	66.74	12
15	Lemahabang	Karangtanjung	54.22	11
16	Telagasari	Telagasari	53.47	14
17	Majalaya	Majalaya	33.04	7
18	Karawang Timur	Adiarsa Timur	31.22	8
19	Karawang Barat	Tanjungmekar	38.76	8

1 Pemerintah Kabupaten Karawang, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2024*, (Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang, 2023), hal. II-14.

2 *Ibid*, hal. II-3



20	Rawamerta	Sukamerta	51,56	13
21	Tempuran	Pancakarya	93.15	14
22	Kutawaluya	Waluya	55.60	12
23	Rengasdengklok	Rengasdengklok Selatan	36.59	9
24	Jyakerta	Jayamakmur	41.32	8
25	Pedes	Payungsari	69.63	12
26	Cilebar	Kertamukti	69.28	10
27	Cibuaya	Pejaten	112.35	11
28	Tirtajaya	Subajaya	110.63	11
29	Batujaya	Batujaya	78.38	10
30	Pakisjaya	Tanjungbungin	65.81	8

Penduduk Kabupaten Karawang cukup beragam, sebagian besar adalah suku Sunda yang menggunakan Bahasa Sunda. Penggunaan bahasa daerah lain selain Bahasa Sunda adalah Bahasa Betawi dan Bahasa Cirebon. Daerah-daerah utara Kabupaten Karawang, seperti di Kecamatan Batujaya dan Kecamatan Pakisjaya sebagian penduduknya menggunakan bahasa Betawi, sedangkan di Kecamatan Pedes, Tempuran, Kecamatan Cilamaya Wetan, dan Cilamaya Kulon sebagian penduduknya menggunakan bahasa Cirebon.

Bentuk morfologi Kabupaten Karawang sebagian besar terdiri dari dataran rendah. Bagian utara sebagian besar tertutup dataran pantai yang luas, bagian tengah ditempati oleh perbukitan, terutama dibentuk oleh batuan sedimen, dan di bagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 m di atas permukaan laut. Kabupaten Karawang juga dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke utara arah Sungai Citarum yang merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Sungai Cilamaya yang merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang³. Aliran sungai yang melalui Kabupaten Karawang tersebut menjadikan Kabupaten Karawang memiliki 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah dan Saluran Induk Tarum Barat. Saluran-saluran irigasi tersebut dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.

Kondisi wilayah Kabupaten Karawang tersebut cocok untuk pertanian. Kabupaten Karawang pun dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat dan daerah penghasil padi, sehingga mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani atau pembajak sawah. Pada perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran bentuk mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Karawang. Pada saat ini Kabupaten Karawang tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil padi, namun juga menjadi motor penggerak utama pertumbuhan sektor industri terutama industri pengolahan.

3 *Ibid*, hal. II-10.



Sektor industri yang telah mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Karawang didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Industri pengolahan
2. Perdagangan Besar dan Eceran
3. Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
4. Konstruksi; dan
5. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, industri pengolahan telah menjadi penyumbang perekonomian terbesar Kabupaten Karawang⁴. Industri pengolahan menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang berada pada peringkat tertinggi ke-11 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang yang bertumpu pada sektor industri mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas manusia. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menurunkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang hingga menempati posisi terendah yaitu peringkat ke-27 dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat⁵.

Pasca pandemi COVID-19 perlahan-lahan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang menunjukkan arah perbaikan. Kondisi perekonomian Kabupaten Karawang kembali berhasil meningkatkan kembali peringkatnya diantara kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Barat mulai memasuki tahun 2021. Hingga saat ini, Kabupaten Karawang terus berusaha memperbaiki kondisi perekonomian dan taraf hidup masyarakatnya.

A. Karawang pada masa Prasejarah dan Hindu Budha

Eksistensi wilayah Karawang sudah ada sejak masa prasejarah. Kawasan-kawasan seperti Rawa Gempol, Pasir Jengkol, Darawolong, Bojong, Wanayasa, dan Krasak sudah dihuni oleh manusia pada masa prasejarah. Pada wilayah ini ditemukan perkakas dan benda-benda dari masa neolitik. ⁶ Menurut hasil penyelidikan para ahli, penduduk yang berkebudayaan neolitik berasal dari daratan Asia, seperti daerah Campa. Dari daerah-daerah tersebut merekmenyeberang lautan dan menyebar ke berbagai arah. Mereka berlayar menggunakan *perahu bercadik*, di antaranya ada yang singgah di Nusantara. Orang-orang yang datang ini dinamakan bangsa *Melayu Polinesia* saat sekarang kita menyebutnya bangsa *Austronesia*. Mereka kemudian menjadi nenek moyang bangsa Indonesia sekarang.

4 *Ibid*, hal.II-18.

5 *Ibid*, hal.II-26.

6 Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Sejarah Daerah Jawa Barat* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hal. 16.



Menurut antropolog Von Heine Geldern, bangsa tersebut pada saat melakukan perpindahan telah memiliki *kebudayaan neolitikum*⁷. Periode budaya neolitik ditandai dengan adanya penemuan pecahan-pecahan *kreweng* atau pecahan benda tembikar (periuk belanga).⁸ Wadah-wadah tembikar digunakan untuk keperluan hidup berumah-tangga, karena penggunaan wadah tembikar pada masa prasejarah bersamaan dengan tradisi bercocoktanam.⁹ Benda-benda semacam itu ditemukan di Situs Tanjungsari Kabupaten Kawarang, tepatnya di Kampung Talun Dadap, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang.¹⁰ Periode budaya neolitik selain mengenal teknologi wadah tembikar juga mengenal alat-alat kapak batu yang bentuknya persegi empat atau persegi panjang, yang sudah dihaluskan permukaannya. Alat-alat kapak batu tersebut dikenal dengan Beliung

Eksistensi wilayah Karawang terus berlanjut pada masa Hindu Budha yang ditemukannya berbagai peninggalan masa Hindu Budha seperti situs Cibuaya¹¹. Pada kompleks ini terdapat tinggalan berupa Candi Cibuaya I, Candi Cibuaya II/Lemah Duwur Wadon, Candi Cibuaya III/Lemah Duwur Lanang, Candi Cibuaya IV, Candi Cibuaya V, dan Candi Cibuaya VI¹². Pada situs ini juga ditemukan arca wisnu Cibuaya I. Selain di Cibuaya, penemuan peninggalan Hindu Budha lainnya di Karawang terdapat pada situs Batujaya yang terdiri atas situs Unur Jiwa, Unur Lempeng, Unur Blandongan, dan Unur Serut.¹³ Peninggalan masa Hindu Budha selanjutnya di Karawang adalah situs Jungklang/kampung Salapan.

B. Karawang pada Masa Kerajaan Islam hingga Kedatangan Bangsa Eropa

Persinggungan masyarakat di kawasan Karawang dengan agama Islam tidak lepas dari pengaruh kedatangan orang-orang Islam di wilayah tersebut. Pada 1418 M, tercatat seorang pedagang dan juga ulama dari Campa yang bernama Syekh Hasanudin bin Yusuf Sidik datang dan menetap di Karawang.¹⁴ Pengaruh Islam menjadi semakin kokoh dan meluas dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Barat seperti Kesultanan Cirebon dan Banten.¹⁵

Kawasan Karawang yang berada di Pantai Utara Jawa menjadikannya sebagai salah satu kawasan yang tidak luput menjadi persinggahan Bangsa Eropa. Hal ini terbukti dari adanya

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*, hal. 7.

9 Harry Octavianus Sofian, dkk., *Seri Jejak Purbakala: Berpetualang ke Karawang, Yuuk!* (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2017), hal. 10.

10 *Ibid.*, hal. 7.

11 Nina Herlina Lubis, dkk., *Sejarah Kabupaten Karawang* (Karawang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang, 2011), hal. 30.

12 *Ibid.* hal. 34.

13 *Ibid.*, hal. 43.

14 Nina Herlina Lubis, dkk., *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat* (Bandung: Yayasan Sejarawan Indonesia, 2011), hal. 35.

15 *Ibid.*



penyebutan nama Karawang pada surat-surat VOC, diantaranya tahun 1619, 1628 dan 1629. Namun, makna penyebutan nama Karawang oleh Bangsa Eropa ini berbeda dengan makna nama Karawang dalam Bahasa Sunda. Secara etimologis, nama Karawang diambil dari Bahasa Sunda yaitu *rawa* yang diberi imbuhan *ka-* dan *-an*.¹⁶ Sedangkan menurut jurnal berjudul *Tijdschrift voor Neerland's Indië*, yang terbit di Batavia tahun 1839, makna Karawang adalah sebuah wilayah yang penuh dengan lubang, lubang ini sangat banyak dan menyerupai lubang pada kain linen dan lubang ini terlihat jelas jika kita melihatnya dari laut.¹⁷ Lubang-lubang ini merupakan kanal alam maupun buatan yang saat itu menjadi jalur menuju sungai besar di wilayah ini.¹⁸ Penyebutan Karawang juga disematkan pada delta yang berada pada muara sungai Citarum¹⁹.

Berdirinya Kabupaten Karawang ditetapkan berdasarkan tanggal dan tahun pada ***Pelat Kuning Kandang Sapi Besar***, yaitu 14 September 1633. ***Pelat Kuning Kandang Sapi Besar*** berisi antara lain mengenai pengangkatan Adipati Kertabumi IV sebagai penguasa Karawang.²⁰ Pasca kejatuhan benteng Malaka oleh VOC pada bulan Januari tahun 1641, Karawang menjadi wilayah penting baik bagi Kerajaan Mataram maupun bagi VOC. Karawang adalah lumbung beras yang penting bagi Kerajaan Mataram yang disiapkan jika mereka akan kembali menyerbu benteng VOC di Batavia²¹. Karawang juga menjadi salah satu pemasok daging sapi di Batavia.²² VOC juga bergantung pada lada yang dihasilkan Karawang.²³

Berdasarkan perjanjian antara VOC dengan pihak Kerajaan Mataram pada 28 Februari tahun 1677 ini VOC mendapatkan Karawang dan mengangkat Raden Anom Wirasuta/Raden Adipati Panatayuda I sebagai *hoofd ambtenaar*/kepala wilayah pribumi yang bertanggung jawab langsung kepada VOC.²⁴ Karawang pada masa pemerintahan Adipati Panatayuda terdiri atas 12 distrik, dan ibukotanya adalah Wanayasa.²⁵ Pada 20 Oktober 1677 ditandatangani traktat antara Kerajaan Mataram dengan VOC yang makin mempertegas perluasan wilayah kekuasaan VOC²⁶, yaitu:

1. Tangerang dan wilayah di Ommelanden Batavia diantaranya;
2. Kampung Baru (Buitenzorg)

16 Nina Herlina Lubis, dkk. *op. cit.*, hal. 86.

17 "Statistieke Aantekeningen over Karawang", *Tijdschrift voor Neerland's Indië-Tweede Jaargang Eerste Dell* (Batavia: Landsdrukkerij, 1839), hal. 430.

18 J. Hageman, Jcz., *Geschiedenis Soenda-Landen* (Batavia: Batavia Lange & Co., 1869), hal. 224.

19 *Ibid*, hal. 225.

20 Nina Herlina Lubis, dkk. *op. cit.*, hal. 97.

21 F. De Haan, *Priangan: de Preanger-Regentschappen onder Het Nederlandsche Indie Bestuur tot 1811* (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1910), hal. 17.

22 *Ibid*, hal. 11.

23 Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 44.

24 Nina Herlina Lubis, dkk. *op. cit.*, hal. 109.

25 J. Hageman, Jcz., *op. cit.*, hal. 348.

26 Otto van Rees, *Overzicht van De Geschiedenis der Preanger Regentschappen* (Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1880), hal. 54.



3. Cianjur
4. Jampang
5. Cilegon
6. Cikalong
7. Karawang
8. Wanijasa
9. Adiarsa
10. Ciasem
11. Pamanukan
12. Bandung
13. Batu Layang
14. Parakan Muncang

VOC semakin mengokohkan kekuasaannya dengan mendirikan benteng/loji di Tanjungpura, Karawang.²⁷ Loji ini menjadi pengontrol masuk dan keluarnya barang dari wilayah Karawang menuju Batavia dan Komandan pertama loji ini adalah Hendrik van Den Eeden.²⁸ Beberapa tugas penting dari pemimpin loji adalah²⁹:

1. Memastikan suplai benang yang dikirim dari Karawang ke Batavia berjalan dengan lancar.
2. Mengurus kebun-kebun kopi yang menyuplai kopi ke benteng VOC di Batavia.
3. Memastikan suplai kayu bakar dari Karawang ke Batavia cukup.

Pada akhir abad ke-17, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Camphuys (1684-1691) terjadi reformasi pada sistem penarikan pajak. Pajak berupa barang dan uang dihentikan tetapi Karawang masih menanggung pajak yang tinggi karena loji di Tanjungpura membutuhkan biaya perawatan³⁰. Keberadaan loji di Tanjung Pura pun bertahan hanya hingga tahun 1810.³²

C. Karawang pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.

Selama masa kekuasaan VOC, Karawang menjadi wilayah yang penting karena merupakan penghasil berbagai komoditas seperti beras, kayu jati, kopi garam, ternak sapi, ikan. VOC mendapatkan keuntungan yang besar dengan memonopoli hak pengelolaan berbagai komoditas Karawang. Pasca kebangkrutan VOC pada tahun 1799, Kerajaan Belanda mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan VOC, dan dimulailah masa Pemerintahan Kolonial

27 F. De Haan, *op. cit.*, hal. 40.

28 *Ibid.*

29 *Ibid.*, hal. 335.

30 *Ibid.*, hal. 81.

31 Nina Herlina Lubis, *dkk. op. cit.*, hal. 109.

32 "Statistieke Aantekeningen over Karawang", *Tijdschrift voor Neerland's Indië-Tweede Jaargang Eerste Dell* (Batavia: Landsdrukkerij, 1839), hal. 439.



Belanda, termasuk Karawang. Pemerintah Kolonial Belanda menunjuk Gubernur Jendral H. W. Daendels (1808-1811) untuk melakukan pembenahan administrasi di Hindia Belanda. Daendels membagi pulau Jawa atas sembilan *prefektur* dan masing-masing *prefektur* dipimpin oleh *prefek*, yang dikemudian hari istilah ini berubah menjadi *landdrost ambt*. Adapun sembilan wilayah ini Pulau Jawa yang dibagi oleh Daendels adalah sebagai berikut³³:

1. Batavia Ommelanden
2. Batavia Regentschappen
3. Karawang
4. Cirebon
5. Pekalongan
6. Tegal
7. Semarang
8. Ujung timur Jepara, dan
9. Rembang.

Daendels saat itu menjadikan wilayah Karawang sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang, dan dipimpin oleh seorang *Landrost Ambtenaar*³⁴. Penunjukan *Landrost Ambtenaar* di Karawang berlangsung pada 10 Januari 1811 yang tercantum dalam Besluit No. 2 bulan Tahun 1811.³⁵ Batas-batas wilayah Karawang pada saat Daendels berkuasa adalah sebagai berikut³⁶:

Sebelah utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Bandung dan Sumedang
Sebelah Barat : Sungai Citarum dan Batavia
Sebelah timur : Sungai Cimanuk

Selama berkuasa, Daendels juga merubah sistem pergantian sultan dan bupati yang dilakukan secara turun temurun, menjadi sistem penunjukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Bupati pun kemudian menjadi bagian dari pegawai emerintah Kolonial Belanda. Dampak dari kebijakan tersebut adalah, jabatan Bupati Karawang yang sebelumnya menjadi hak keturunan Panatayuda tidak lagi berlaku.³⁷

Perubahan sistem pemerintahan kembali terjadi ketika Inggris mengambil alih Hindia Belanda dari Pemerintah Kolonial Belanda. Perubahan kekuasaan dari Pemerintah Kolonial Belanda ke Pemerintah Inggris diawali dengan penandatanganan Kapitulasi Tuntang/

33 J. Rijnberg, *Geschiedenis der Nederlanders op Java of In den Nederlandsche Oost-Indische Archipel* (Semarang: De Groot, Kolff & Co., 1867), hal. 142
34 Herman Willem Daendels, *Staat der Nederlandsche Oost Indische Bezittingen in de jaren 1808-1811* (Den Haag: Hendrik van Teeckelenburgh and the Van Cleef brothers, 1814), hal. 148.
35 Otto van Rees, *op. cit.*, hal. 111
36 *Ibid*, hal. 150.
37 Nina Herlina Lubis, dkk. *op. cit.*, hal. 112.



Capitulatie van Toentang pada 17 September 1811.³⁸ Pemerintah Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada saat Raffles berkuasa, diperkenalkan jabatan baru yaitu Asisten Residen dan Wedana yang mengepalai distrik.

Karawang pada masa pemerintahan Raffles digabungkan dengan *Preanger Regentschappen*, dan dipimpin oleh Raden Adipati Sastradipura.³⁹ Pada saat itu wilayah Karawang terdiri atas beberapa distrik, antara lain⁴⁰:

1. Wanayasa
2. Gandasuli
3. Pesawahan
4. Cikao
5. Cikompang
6. Adiarsa,dan
7. Karawang

Perubahan kekuasaan dari Pemerintah Inggris ke Pemerintah Kolonial Belanda di Hinda Belanda berdampak pada perubahan kawasan Karawang. Berdasarkan Besluit No. 27 Tahun 1818, wilayah Karawang mencakup:

1. Bagian bawah dari Karawang yang berada di antara Sungai Citarum dan Cimanuk akan bergabung dalam satu wilayah bernama Residensi Karawang.
2. Bagian atas dari Karawang yang terdiri dari Distrik Gandasuli, Cinusa, dan Wanayasa akan tetap berada di Residensi Preanger.
3. Karawang akan dipimpin oleh seorang Residen⁴¹.

Pada tahun 1823 wilayah administrasi Karawang kembali berubah dengan dikeluarkannya keputusan Pemerintah Kolonial Belanda yang tercantum pada *Staatsblaad* No. 42. Berdasarkan keputusan tersebut, cakupan wilayah Karawang adalah sebagai berikut:

1. Wilayah distrik Indramayu dan Kandang Aur tidak lagi menjadi bagian Residensi Karawang, wilayah ini akan digabungkan pada wilayah Residensi Cirebon. Akibatnya, wilayah Kali Sewu hingga Cimanuk kemudian menjadi batas antara Karawang dan Cirebon.
2. Wilayah Tegalwaru,Sumedangan,dan Kandang Sapi yang merupakan wilayah dari Residen *Buitenzorg*/Bogor kemudian dimasukkan kedalam wilayah Residensi Karawang.

38 F. W. Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsche Indie* (Amsterdam: NV. Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel, 1940), .hal. 233.

39 Nina Herlina Lubis, dkk. *op. cit.*, hal. 113.

40 M. L. van de Venter, *Het Nederlandsche Gezag over Java en Onderhoorigheden sedert 1811* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1891), hal. 118.

41 *Staatsblad van Nederlandsche Indie* 1818, No. 53.



Wilayah administrasi Karawang kembali berubah pada tahun 1826, sebagaimana yang tertuang dalam *Staatsblaad* No. 24, yaitu:

1. Wilayah Residen Karawang dan Buitenzorg akan dimasukkan kedalam wilayah Residensi Batavia.
2. Dua wilayah ini akan dipimpin oleh seorang Asisten Residen

Sejak 1828, wilayah Karawang dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Pada 1830, ketika masa pemerintahan R. A. A. Suriawinata terjadi pemindahan ibukota Karawang, yang sebelumnya adalah Wanayasa ke Purwakarta.

Pada 1866, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan sebuah aturan, semua kepala wilayah di Pulau Jawa dijabat oleh seorang Residen.⁴² Aturan tersebut juga mengubah wilayah administrasi Karawang yang semula menjadi bagian dari wilayah Residensi *Buitenzorg*/Bogor menjadi sebuah Residensi tersendiri, yaitu Residensi Karawang. Adapun cakupan wilayah Residensi Karawang pada saat itu adalah sebagai berikut⁴³:

1. Purwakarta (ibukota)
2. District Cabang Bungin
3. District Adiarsa
4. District Karawang
5. District Sindangkasih, dan
6. District Wanayasa.

Selama masa Pemerintah Kolonial Belanda, Karawang tetap menjadi penghasil komoditas padi yang penting dan merupakan salah satu sentra pertanian yang penting di pulau Jawa. Hingga abad ke-20, luas kawasan persawahan di Karawang mencapai 55,23 % dari seluruh luasan kawasan Residensi Karawang sehingga wilayah ini masih menjadi lumbung padi di Pulau Jawa. Komoditas pertanian penting lainnya yang dihasilkan oleh Karawang adalah teh dan kopi.

Pemerintah Kolonial Belanda banyak melakukan pembenahan irigasi untuk menunjang aktivitas pertanian di Residensi Karawang. Perkembangan wilayah Residensi Karawang juga didukung dengan adanya Jalan Raya Pos yang dibangun pada masa Daendels. Pada akhir abad ke-19, Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun jalur kereta api yang menyambungkan antara Batavia-Karawang.⁴⁴ Jalur ini diharapkan menjadi salah satu cara untuk membuka isolasi di wilayah Jawa Barat karena topografi wilayahnya yang didominasi oleh kawasan pegunungan.

42 P. J. Veth, *Java: Geographisch, Ethnologisch, Historic* (Haarlem: De Erven F.Bohn, 1882), hal. 146.

43 *Ibid.*

44 Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Kamerstuk Tweede Kamer 1897-1898 Kamerstuknummer 172 ondernummer 9*, Verhoging begroting Nederlandsch-Indië voor 1898, hal. 5.

Kemudahan akses mobilitas dengan adanya Jalan Raya Pos Daendels dan pembangunan jalur kereta api Batavia-Karawang, mendorong terjadinya penambahan penduduk Residensi Karawang yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan pada 1815, tercatat penduduk Residensi Karawang adalah sebanyak 31.625 jiwa dan bertambah menjadi 85.700 jiwa pada 1843 dan mencapai 90.424 jiwa pada 1847.⁴⁵ Para penduduk di Residensi Karawang ini banyak menjadi tenaga kerja pada perkebunan-perkebunan milik pemerintah maupun perkebunan-perkebunan swasta.

Pada abad ke-20, wilayah Residensi Karawang mengalami perubahan luas wilayah. Pada 1925 jumlah distrik di Residensi Karawang berkurang menjadi tujuh buah.⁴⁶ Namun demikian, jumlah penduduk di Residensi Karawang tetap mengalami penambahan. Pada sensus penduduk tahun 1920, jumlah penduduk Karawang adalah 743.208 jiwa, dengan jumlah orang tionghoa mencapai 7.120 jiwa.⁴⁷ Jumlah penduduk ini kembali meningkat pada tahun 1930, mencapai 1.010.937.⁴⁸

D. Karawang pada Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, secara resmi tentara Jepang mengambil alih Hindia Belanda dari Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Jepang dengan segera membentuk susunan pemerintahan untuk mengukuhkan dan memperlancar kekuasaannya. Pulau Jawa diberlakukan sistem pemerintahan dengan membentuk tiga pemerintahan militer/*gunseibu*, di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁴⁹ Pemerintah Jepang juga membentuk pemerintahan istimewa/*kochi* untuk Surakarta dan Yogyakarta.

Pada perkembangan selanjutnya, untuk lebih memaksimalkan urusan administrasi pemerintahan, Pemerintah Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang aturan pemerintahan *syu* dan *tokubetsu syi*. Undang-Undang tersebut membagi Pulau Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta ke dalam bentuk hierarki yang lebih jelas. Karesidenan (*shu*) sebagai tingkat pemerintahan tertinggi, diikuti oleh kotapraja (*shi*), kabupaten (*ken*), *gun* (kawedanan), *son* (kecamatan), dan *ku* (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 *shu*. Berikut ini adalah struktur pemerintahan pada masa Jepang:

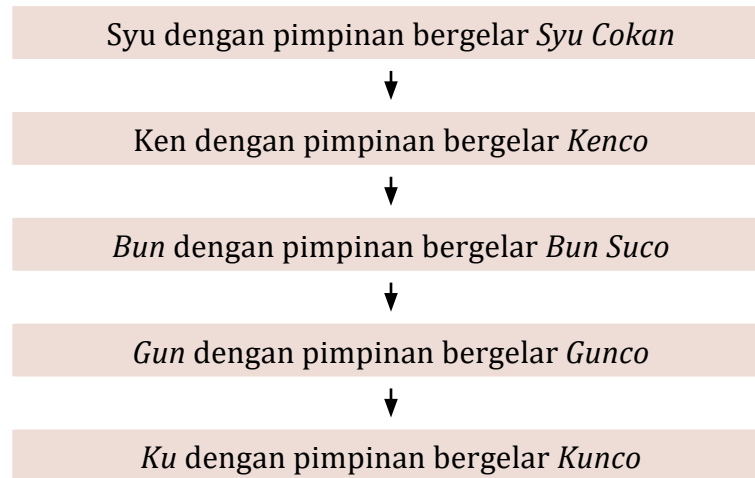
45 P.P. Roorda van Eysinga, *Ter Bevordering der Kennis van Nederlandsche Oostersche Bezettingen* (Breda: Ter Boekdrukkerij van de Gebroeders, 1843), hal. 406.

46 Nina Herlina Lubis, dkk., *op. cit.*, hal. 120.

47 *Nederlandsche-Indie Uitkomsten der in de Maand November 1920 Gehouden Volkstelling Deel II* (Batavia: Drukkerijen Ruygrok & Co., 1922), hal. 15.

48 Departement Van Economische Zaken, *Volkstelling 1930 deel VIII overzicht voor Nederlandsch Indie* (Batavia: Landsdrukkerij, 1936), hal. 60.

49 Nina Herlina Lubis, dkk., *op. cit.*, hal.123.



Karawang pada masa Jepang berbentuk *ken* (kabupaten) dan menjadi bagian dari *Jakarta Syu*. Pemerintah Jepang mengangkat Raden Pandu Suriadiningrat menggantikan Raden Adipati Aria Suryamiharja sebagai pemimpin di Karawang.⁵⁰

Masa pendudukan Jepang walaupun berlangsung hanya dalam kurun waktu yang singkat namun menjadikan situasi dan kondisi di Karawang berada dalam suasana mencekam. Pemerintah Jepang memberlakukan kerja paksa di Karawang. Posisi Jepang yang terus terdesak di Perang Dunia II, mendorong Pemerintah Jepang di Indonesia membentuk berbagai organisasi kepemudaan yang dilatih kemampuan militer dasar dan baris berbaris. Organisasi-organisasi kepemudaan bentukan Jepang tersebut disiapkan untuk membantu Jepang. Contohnya di Karawang, organisasi kepemudaan bentukan Jepang tersebut ditugaskan untuk mencegah penyelundupan beras keluar dari Karawang.⁵¹

E. Karawang Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Karawang menjadi saksi sebuah peristiwa besar yang menjadi salah satu pemicu berlangsungnya proklamasi kemerdekaan. Peristiwa tersebut adalah penculikan Sukarno dan Hatta oleh para pemuda ke Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945, hingga peristiwa tersebut dikenal dengan Peristiwa Rengasdengklok.⁵² Pada peristiwa penculikan tersebut kemudian terjadi kesepakatan antara "golongan tua" yang diwakili Sukarno dan Hatta serta Achmad Subardjo dengan "golongan muda" tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan terutama setelah adanya berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik.

Pemilihan Rengasdengklok adalah atas KH. Darip pejuang dari Klender kepada Soekarni dan kawan-kawan, agar Sukarno dan Hatta ditempatkan di tempat yang layak, maka dipilih lah Rengasdengklok, Karawang. Menurut pandangan para pemuda, Rengasdengklok aman karena dekat dengan laut, dan dikelilingi oleh penjagaan PETA seperti di Purwakarta, Kedung

50 *Ibid*, hal. 124.

51 *Ibid*.

52 *Ibid*, hal. 125.



Gedeh, dan Bekasi.⁵³ Selama di Rengasdengklok, Sukarno dan Hatta ditempatkan di rumah saudagar Tionghoa bernama Djiaw Kie Siong. Rengasdengklok pun menjadi wilayah pertama di Indonesia yang mengibarkan merah-putih.⁵⁴

Perjuangan masyarakat Karawang untuk dapat meraih kemerdekaan sebenarnya telah dimulai sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda. Pemberlakuan kebijakan tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan adanya monopoli pengelolaan komoditas-komoditas penting di Karawang oleh Pemerintah Kolonial Belanda menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Karawang. Perjuangan di Karawang terus berlanjut bahkan pasca proklamasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bertujuan untuk menjamin ketertiban umum. Pembentukan BKR di Karawang bersamaan dengan pembentukan KNI (Komite Nasional Indonesia). Karawang bergabung dalam KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Karesidenan Jakarta yang dipimpin oleh R. Sutarjo Kartohadikusumo.⁵⁵ BKR Karawang dipimpin oleh Nagdon Suraji dengan anggotanya terdiri dari para mantan anggota PETA, *Heiho*, *Seinendan*, dan *Keibodan*.⁵⁶ Selain BKR, terdapat berbagai laskar yang terbentuk di Karawang pasca proklamasi kemerdekaan⁵⁷, diantaranya yaitu:

1. Barisan Banten Republik Indonesia yang dipimpin oleh Moh. Kosim
2. Barisan Pejuang Republik Indonesia yang dipimpin oleh H. Agil Ahmad.
3. Hisbullah yang dipimpin oleh M. O Sobandi
4. Pemuda Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Taryono Cayong
5. Satuan Pemberontak 88 yang dipimpin oleh A. S Wagianto/Usman Somantri
6. Bambu Runcing yang dipimpin oleh Doyot
7. Lasykar Buruh
8. Sabillah
9. Lasykar Rakyat Jakarta Raya yang dipimpin oleh J. Hasibuan

Setelah pembentukan BKR, pemerintah pusat juga segera mengeluarkan maklumat pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada 5 Oktober 1945 karena situasi dan kondisi yang semakin genting. Perlawanan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk juga di Karawang.

Kedatangan Belanda kembali dan para tentara sekutu semakin meningkatkan intensitas

53 *Ibid*, hal. 126.

54 Iim Imadudin, "Revolusi dalam Revolusi: Tentara, Laskar, dan Jago di Wilayah Karawang 1945-1947", *Patanjala*, Vol. 10, No. 1, Maret 2018, hlm. 41

55 Nina Herlina *op. cit.*, hal. 221

56 Iim Imadudin, *op. cit.*, hal. 40.

57 H.M. Idris, *Peristiwa Karawang Kota dan Sekitarnya pada masa Revolusi*, makalah disampaikan pada acara *Temu Tokoh dan Seminar Sejarah "Refleksi Nilai-Nilai Juang 45"*, hal. 9



konflik di Karawang. Di Karawang, konflik antara para pejuang tanah air dengan tentara Sekutu dan Belanda melahirkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, antara lain Peristiwa Cikampek dan Peristiwa Rawagede.

1. Peristiwa Cikampek

21 Juli 1947, tentara Belanda melancarkan agresi militer yang pertama. Sebagai akibat dari agresi tersebut, Kota Cikampek berhasil direbut dan dikuasai oleh tentara KNIL. Pada 25 dan 29 September 1947 diadakan peretmuan untuk merancang perjuangan merebut kembali Kota Cikampek. Pada 1 Oktober 1947, berbagai unsur masyarakat Karawang bergabung dengan kelompok pejuang melancarkan perlawanan dan berupaya merebut kembali Kota Cikampek. Kota Cikampek berhasil direbut kembali oleh para pejuang Karawang pada 2 Oktober 1947, dini hari pukul 03.00.

Perlawanan masyarakat Karawang ternyata tidak berhenti sampai di situ karena pasca Perjanjian Renville, Kota Cikampek kembali diserbu oleh Belanda pada 28 April 1948.⁵⁸ Pertempuran ini terus berlangsung hingga persetujuan gencatan senjata antara pihak Belanda dan Republik Indonesia tercapai.

2. Peristiwa Rawagede

Pada 9 Desember 1947, Kampung Rawagede dikepung dan diserbu oleh pasukan KNIL. Banyak korban jiwa yang berasal dari penduduk di Rawagede, terutama laki-laki, sebagai akibat dari serbuan ini. Alasan Belanda melakukan penyerbuan terhadap Kampung Rawagede karena Rawagede merupakan markas pertahanan para pejuang kemerdekaan di wilayah Karawang.

Pemilihan Rawagede sebagai markas pertahanan pejuang kemerdekaan tidak lepas dari lokasi Rawagede yang strategis, menghubungkan dua daerah penting pada saat itu yaitu Karawang dan Rengasdengklok. Selain itu juga, Rawagede sudah ada jalur kereta api yang dapat digunakan sebagai akses mobilisasi. Pada 1951, Pemerintah Indonesia kemudia membangun sebuah Taman Makam Pahlawan, sebagai lokasi pemakaman para pejuang. Taman Makam Pahlawan tersebut saat ini dikenal dengan nama Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga. Pemerintah juga membangun sebuah monumen untuk mengenang pengorbanan masyarakat Rawagede, yaitu Monumen Rawagede.

Peristiwa lain yang tidak kalah penting dalam sejarah perjuangan masyarakat Karawang namun belum banyak dibicarakan adalah pertempuran yang berlangsung di Jembatan Kedung Gede, Tanjungpura, Karawang pada 21-23 Juli 1947. Tentara Belanda yang berupaya menggoyahkan pertahanan di Karawang, berupaya menguasai jembatan tersebut. Sayangnya, tentara Indonesia pada saat itu karena kurangnya jumlah dan persenjataan yang dimiliki.

58 Nina Herlina *op. cit.*, hal. 209.

Kondisi administrasi pemerintahan di Karawang selama masa revolusi 1945-1949 juga mengalami ketidakstabilan. Bupati pertama yang diangkat di Karawang pasca Indonesia merdeka adalah Raden Juarsa yang memerintah hingga tahun 1948. Pada masa pemerintahan Raden Juarsa, ibukota Karawang kemudian dipindahkan dari Purwakarta ke Subang. Pada 1948 pula wilayah Karawang terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Kabupaten Karawang Barat dan wilayah Kabupaten Karawang Timur. Pembatas kedua daerah tersebut adalah Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya.

Pasca Perjanjian Linggarjati, Indonesia terbentuk negara-negara federal. Karawang pada saat itu menjadi bagian dari Negara Pasundan dan dipimpin oleh dua bupati yaitu Raden Ateng Supraja dan Raden Marta.⁵⁹ Raden Ateng Supraja mewakili Negeri Pasundan yang dibentuk berdasarkan konferensi Jawa Barat dan mulai menjalankan pemerintahannya pada bulan Mei 1948.⁶⁰ Raden Marta mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu sedang berada di Yogyakarta. Dualisme bupati ini tidak hanya terjadi di Karawang saja namun terjadi juga di beberapa wilayah di Indonesia

Pada 27 Desember 1949 Belanda kemudian mengakui Republik Indonesia pada konferensi Meja Bundar. Pasca konferensi ini, terjadi perubahan tata pemerintahan di Karawang. Dua bupati sebelumnya, yaitu Raden Ateng Supraja dan Raden Marta, digantikan oleh R.M Hasan Surya Saca Kusuma.

Pada 1950, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat. Undang-undang ini mencabut *Staatsblad* 1925 No. 379 s/d No. 396 tentang pembentukan daerah-daerah otonom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Karawang kemudian bergabung dalam Provinsi Jawa Barat.⁶¹ Kabupaten Karawang Timur diubah menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di kecamatan Subang dan Kabupaten Karawang Barat menjadi Karawang dengan ibu kota di Kecamatan Karawang.

Saat ini Karawang merupakan salah satu kabupaten yang mengalami transformasi signifikan di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang yang sejak masa kerajaan-kerajaan nusantara telah dikenal sebagai daerah lumbung padi, berangsur-angsur bertransformasi menjadi daerah sentra industri. Perubahan Kabupaten Karawang menjadi daerah sentra industri ini dimulai pada era 1980-an. Perlahan-lahan kawasan-kawasan pertanian di Kabupaten Karawang banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri. Melihat potensi Karawang sebagai daerah industri, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Adanya keputusan presiden tersebut makin mendukung pertumbuhan kawasan industri di Kabupten Karawang.

59 *Ibid*, hal. 223.

60 *Ibid*.

61 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat



CITRA
KABUPATEN
KARAWANG
DALAM ARSIP



GEOGRAFIS



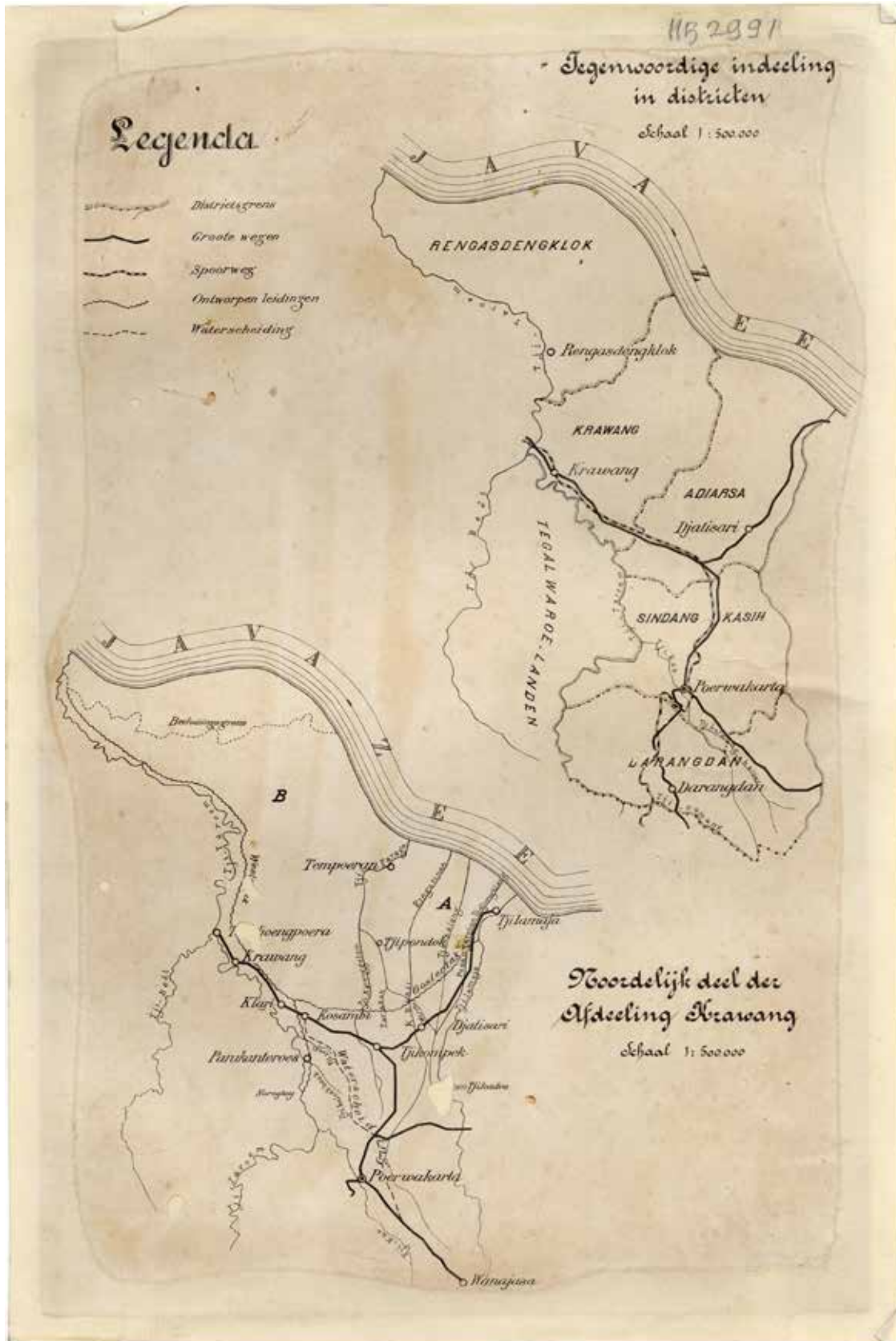
Sebagai salah satu kabupaten strategis di Jawa Barat, Karawang tidak hanya dikenal sebagai lumbung padi, tetapi juga sebagai pusat industri yang pesat. Letak Karawang yang berada di pesisir utara Pulau Jawa dan dilalui oleh Sungai Citarum telah membentuk sejarah panjang Karawang sebagai sebuah wilayah.

Sungai Citarum, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Karawang, menjadi salah satu pusat kehidupan pada zaman prasejarah. Pada saat ini Sungai Citarum menjadi bentang alam pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Sungai Cilamaya yang merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang.

Secara geologis, Karawang memiliki keragaman bentang alam. Dataran pantai di utara, perbukitan di tengah, dan Gunung Sanggabuana di selatan membentuk mozaik yang unik. Kondisi geologis ini bagaikan dua sisi mata uang, satu sisi memberikan keuntungan bagi Karawang sebagai sebuah wilayah yang subur untuk pertanian. Di sisi lain, kondisi geografis Karawang juga menyimpan potensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

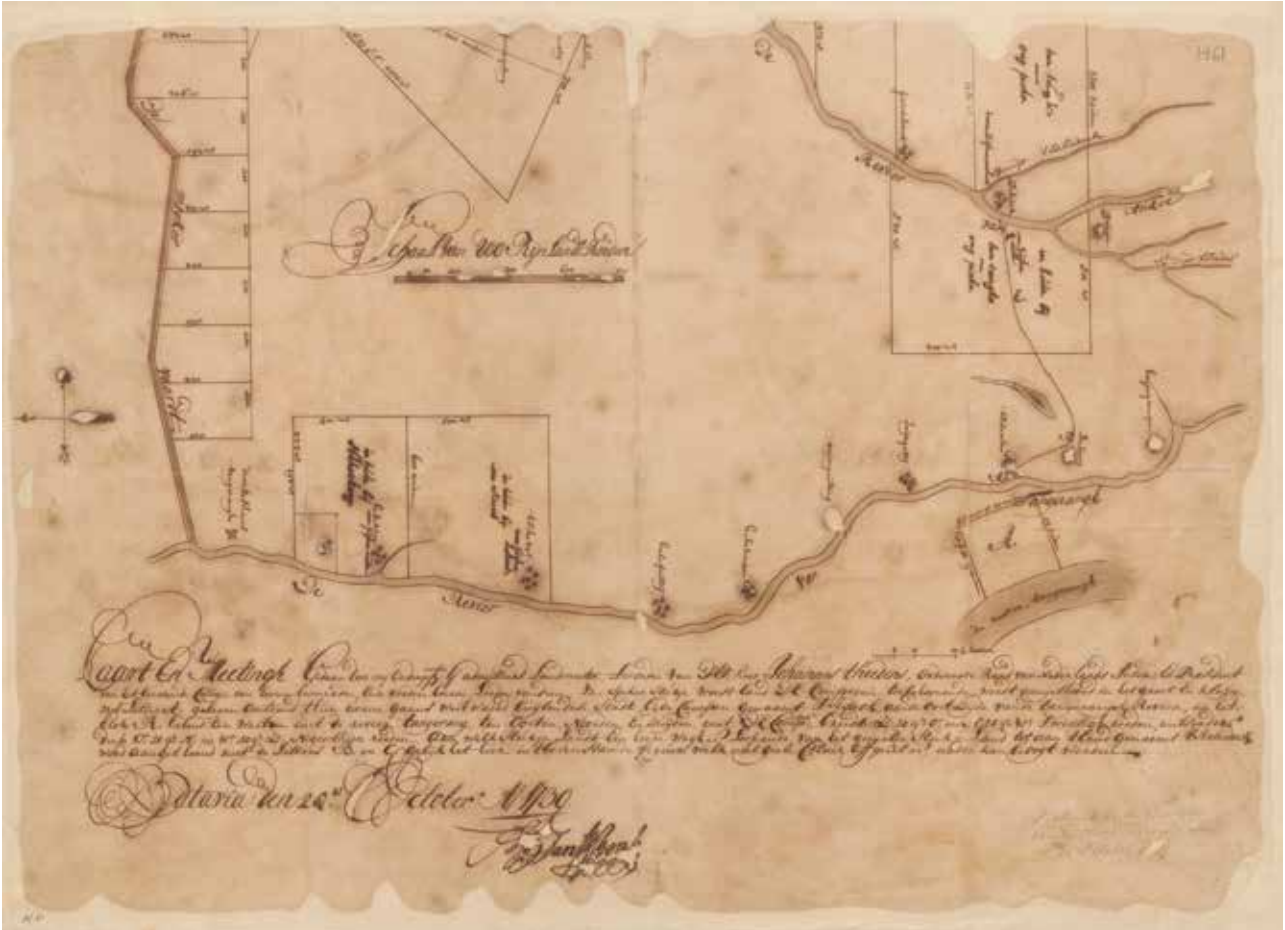
Letak Karawang di pesisir utara Pulau Jawa membuat Karawang sebagai salah satu jalur strategis perdagangan di Nusantara. Posisi tersebut memungkinkan masyarakat Karawang pada saat itu berinteraksi dengan para pedagang dari India, Tiongkok, Arab, dan kemudian bangsa Eropa. Posisi geografis Karawang yang strategis sebagai penghubung Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada saat ini menjadikan Karawang sebagai magnet bagi investasi. Saat ini, Karawang telah menjelma menjadi salah satu pusat industri di Indonesia.

Pada bab ini, akan ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan kondisi geografis Kabupaten Karawang dari masa ke masa.



Peta Administrasi Wilayah Utara Departemen Karawang Dan Aksesibilitasnya Yang Terdiri Dari Batas Wilayah (Batas Wilayah), Jalan Besar (Jalan Besar), Rel Kereta Api (Jalur Kereta), Pipa Perancang (Dreainase), Dan Daerah Aliran Sungai (Muara), tanpa tahun.

Sumber : ANRI, Departement Van Oorlog 1804-1939 No. HB 2991



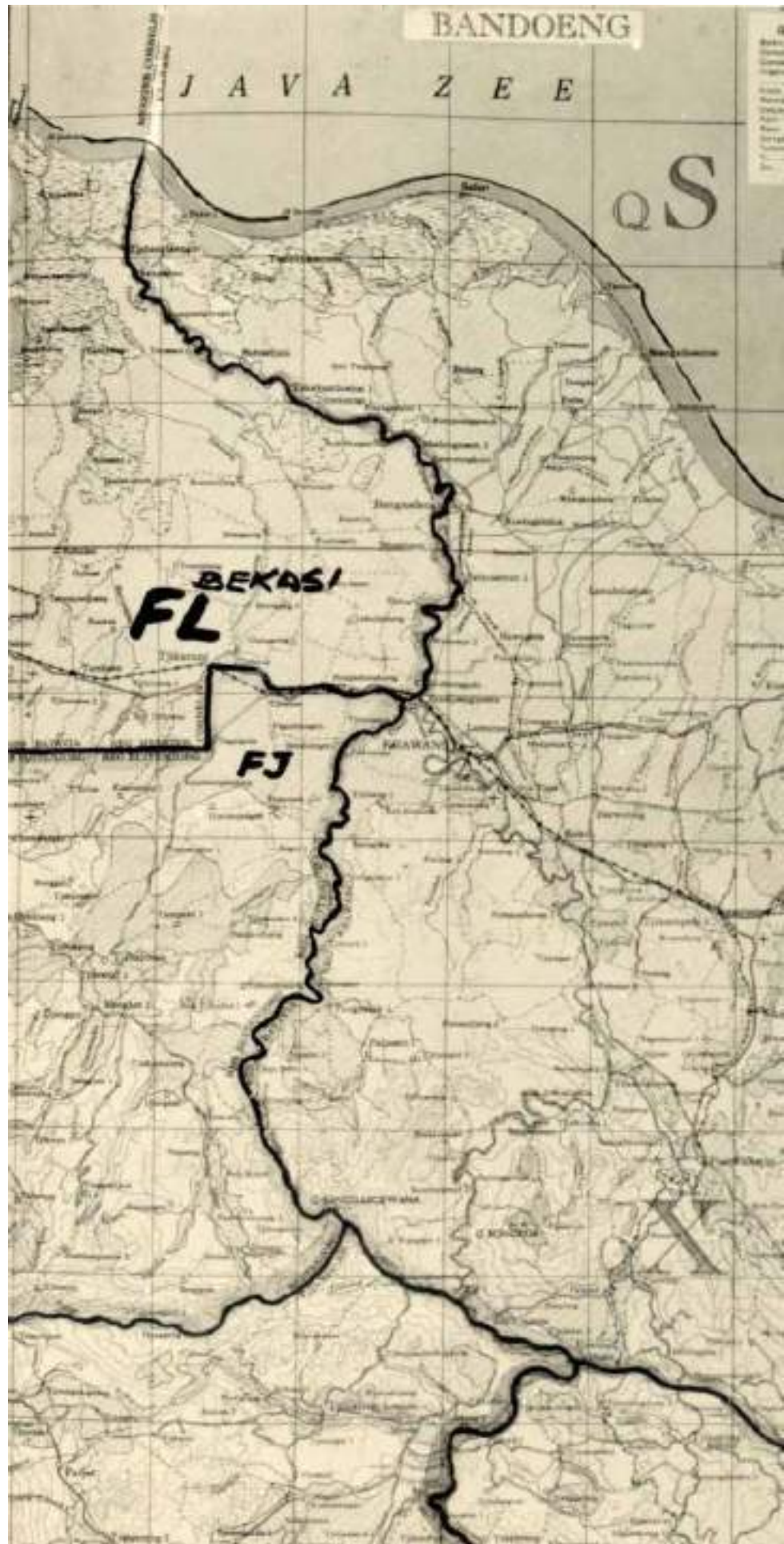
Peta Lama dari Bagian Pantai Karawang - Tanah di Timur Laut dari Bawah Sepanjang Sungai Citarum, tanpa tahun.

Sumber : ANRI, De Haan No. H. 61



Peta Afdeeling Karawang (Jawa Barat), 1914.

Sumber : ANRI, *Arsip Kartografi Topografi Dienst 1899–1943*, No. 652





Peta wilayah Bekasi dan Karawang, 25 Oktober 1948.

Sumber : ANRI, *Arsip Foto RVD Batavia 1947-1949*, No. 1791



POLITIK & PEMERINTAHAN



Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan pada situs-situs yang ada di Kabupaten Karawang membuktikan bahwa Karawang telah dihuni oleh kelompok-kelompok manusia purba. Pada masa prasejarah ini, kelompok-kelompok manusia purba belum memiliki sistem politik dan tata pemerintahan seperti pada saat ini. Begitupula ketika masa kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Budha dan Islam.

Karawang pada masa kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Budha dan Islam tercatat sebagai kawasan yang berada dalam pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanegara, Pajajaran, dan Mataram. Sistem pemerintahan pada masa-masa kerajaan cenderung terpusat, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi.

Penguasaan Karawang oleh VOC dan kemudian oleh Pemerintah Kolonial Belanda memberikan perubahan dalam sistem politik dan tata pemerintahan di Karawang. Pascaproklamasikemerdekaan, baru terbentuk tata pemerintahan daerah di Karawang. Pemberlakuan otonomi daerah dengan adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Karawang pun memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur pemerintahan daerahnya, hal ini menjadikan perkembangan politik dan tata pemerintahan Karawang semakin kompleks.

Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan perkembangan politik dan tata pemerintahan di Karawang sejak masa kolonial hingga saat ini. Adapun arsip-arsip tersebut antara lain adalah:

1. Surat Keputusan No. 42 tanggal 27 September 1862 perihal silsilah Raden Djibdja de Redja, Mantri Polisi Distrik Wanaijassa/Wanayasa dan Raden Setjana Poera, Mantri Polisi Sindangkasih.
2. Surat penetapan No.14/SD tanggal 8 Juli 1946 tentang penghapusan Pemerintah Istimewa Daerah Bekasi, Cikarang, Karawang, Cibinong, dan Cibarusa.
3. Korespondensi pejabat *Landdrost* Karawang tahun 1811 dan 1812 mengenai pengiriman orang untuk pengamanan dan lain-lain.



19

De Maasmeester Resident
van het Gouvernement,
naam
Houlanddrost Officier
& Karawang

Batavia, den 16 December 1811.

Milieu Gelung Her.

De koopman voor de
mayor bedon onder,
Zijl Zandlands gaane,
waars met vrie vield
de noodige staetinge,
den de mond van
de rivier van Lido,
Majors te Nam 4.
Zijl hande, van gde
koopman te Antwerpen.

De naam te. 1811.

19

De Maasmeester Resident
van het Gouvernement,
naam
Houlanddrost Officier
& Karawang

Batavia, den 16 December 1812.

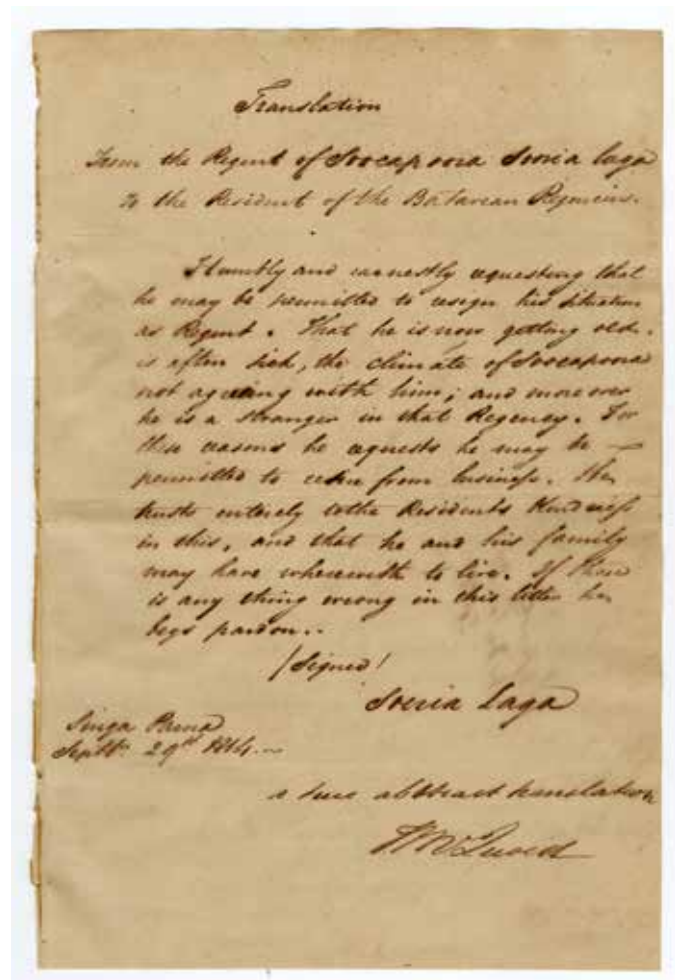
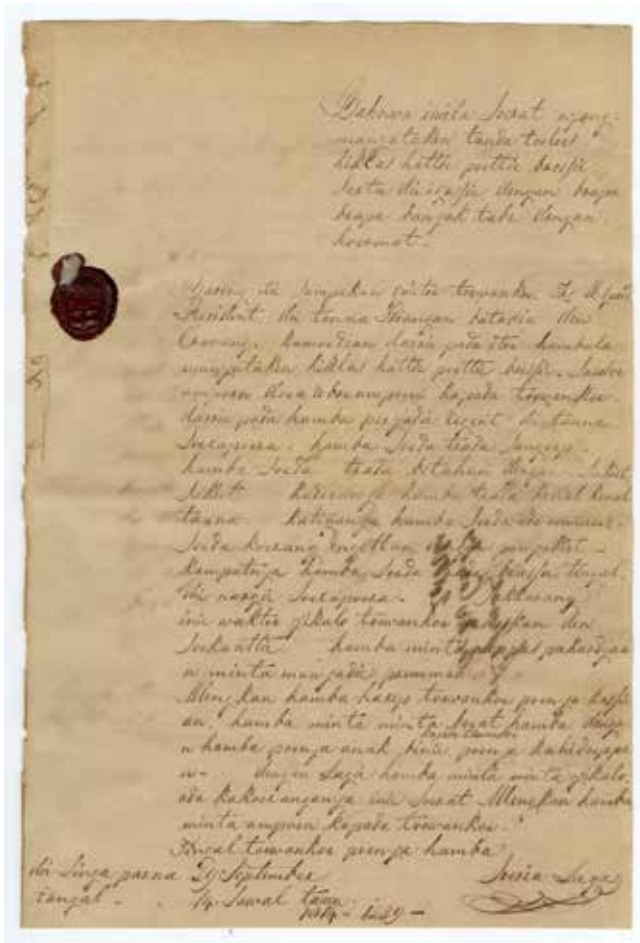
Milieu Gelung Her.

De koopman voor de
mayor bedon onder,
Zijl Zandlands gaane,
waars met vrie vield
de noodige staetinge,
den de mond van
de rivier van Lido,
Majors te Nam 4.
Zijl hande, van gde
koopman te Antwerpen.

De naam te. 1812.

Korespondensi Pejabat Landdrost Karawang tahun 1811 dan 1812 yang berisi antara lain mengenai pengiriman orang untuk pengamanan dan lain-lain

Sumber : ANRI, Residensi Batavia 1613-1904, No. 32-b



Surat dari Soeria Laga, Regent (Bupati) Soecapoera, kepada Residen Priangan Batavia hingga Crawang tanggal 29 September 1814 yang berisi pengunduran dirinya sebagai Bupati Soecapoera akibat sakit dan tidak familiarnya dia dengan lingkungan di Soecapoera. (Arsip dalam bahasa Melayu dan Inggris).

Sumber : ANRI, *Residensi Buitenzorg-Bogor 1729-1874*, No. 45



1096
 1819
 Byzoog
 Hooft van de
 Krawang 3. 1819

Byzoog van de
 Hooft van de
 Krawang 3. 1819

Van de
 Hooft van de
 Krawang 3. 1819

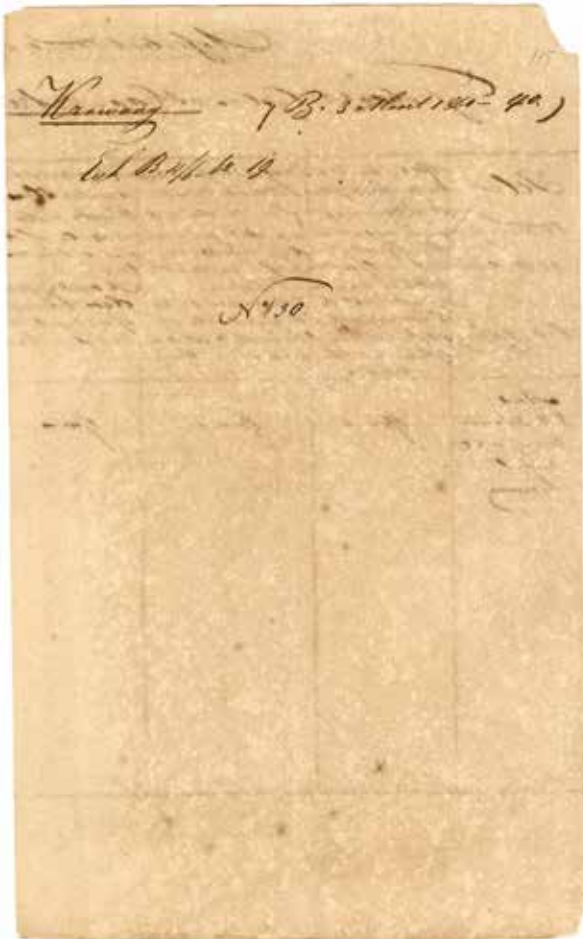
Van de
 Hooft van de
 Krawang 3. 1819

1097
 1819
 Byzoog
 Hooft van de
 Krawang 3. 1819

Van de
 Hooft van de
 Krawang 3. 1819

Van de
 Hooft van de
 Krawang 3. 1819

Laporan Residen Karawang mengenai Luas dan Batas Wilayah Distrik-Distrik di Residensi Krawang, 31 Desember 1819.
 Sumber : ANRI, Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891, No. 80



Silsilah Mas Asta Dhipradja, Juru Tulis Asisten Kantor Residen, dan Maas Matawadana, Demang Karawang (Surat Keputusan tanggal 5 April 1861, No. 25 dan Surat Keputusan 3 Maret 1861, No. 40).

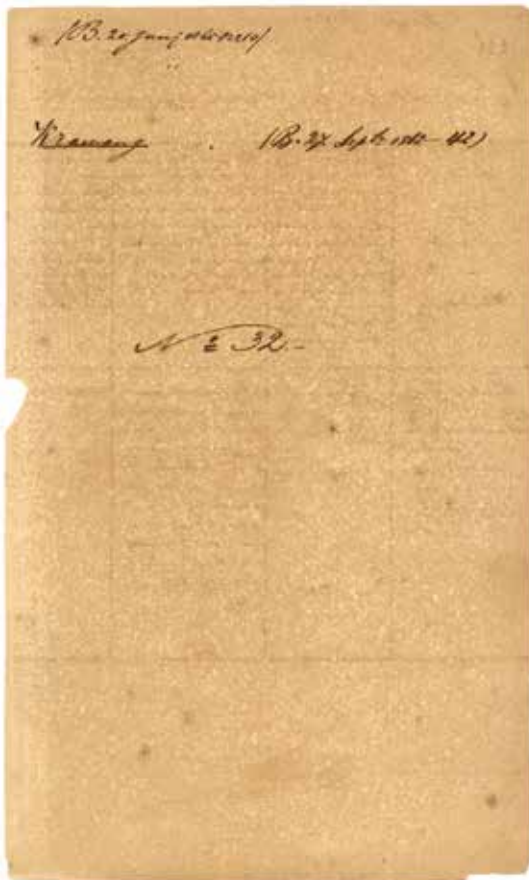
Sumber : ANRI, *Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891*, No. 90

Residenten Kantoor Karawang

E. J. van der ... Mas Asta Dhipradja ...

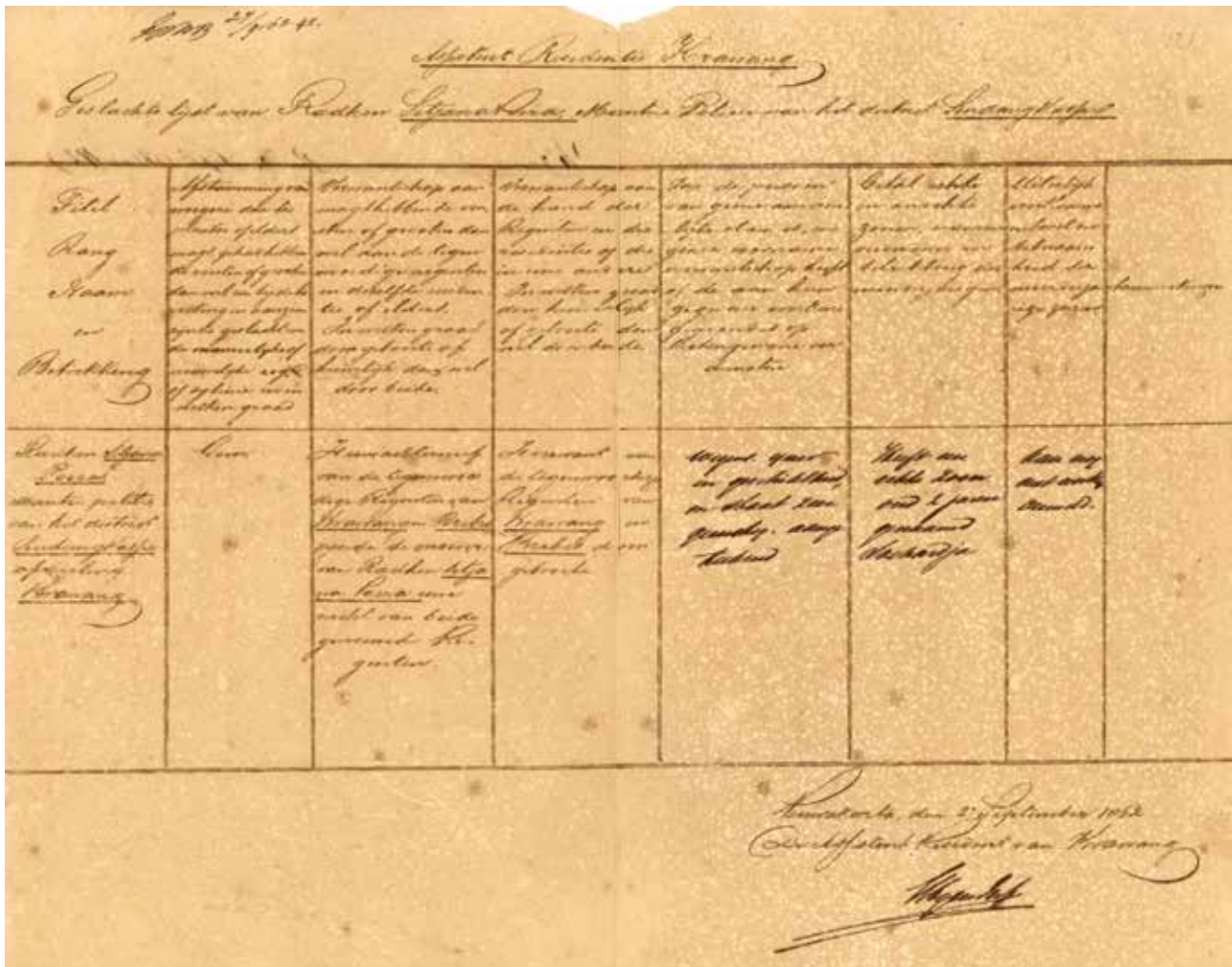
Titel	Afdeling	Dienst	Dienst	Dienst	Dienst	Dienst
e. Hout N. H. de Prins H. van de Hout Kantoor Karawang	Jen	Jen	Jen	Jen	Jen	Jen

Karawang
1861



Silsilah Radhen Djibdja de Redja, Mantri Polisi Distrik Wanaijssa, dan Radhen Setjana Poera, Mantri Polisi Distrik Sindang Kassie (Surat Keputusan 27 September 1862, No. 42).

Sumber : ANRI, *Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891*, No. 91



Bl. 5

Residentie Karawang
Eliminatie van de geboortelid van 1869 van de landbouw bevoegde personen opgelegde straffen

<i>Naam der bevoegden</i>	<i>Betrekking</i>	<i>Opgelegde straf</i>	<i>Ten zake van</i>	<i>Opmerkingen</i>
<i>Wepa Aljan</i>	<i>Land</i>	<i>8 dagen arrest</i>	<i>Plagiaten</i>	
<i>Alwan</i>	<i>id</i>	<i>4 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Abardja</i>	<i>id</i>	<i>4 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Abandrat</i>	<i>id</i>	<i>4 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Aman</i>	<i>id</i>	<i>4 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kasbon</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wardja</i>	<i>Landbouw bevoegde</i>	<i>id id</i>	<i>id</i>	
<i>Rechtspijngedrag</i>	<i>Remang van Remang</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Akantia</i>	<i>Land</i>	<i>4 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Amman</i>	<i>Land</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kasman</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kasnan</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Asmanan</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Kadisa</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Sutris</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Anisa</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Anisa</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kasnan</i>	<i>id</i>	<i>14 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kapiak</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Saktipana</i>	<i>Landbouw bevoegde</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kaidan</i>	<i>Land</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kasnan</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Saeba</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Sude</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wepa Kasnan</i>	<i>id</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	
<i>Wardja</i>	<i>Landbouw bevoegde</i>	<i>id id</i>	<i>id</i>	
<i>Rechtspijngedrag</i>	<i>Remang van Remang</i>	<i>8 id id</i>	<i>id</i>	

Daftar nama orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Asisten Residen Karawang dalam Laporan Politik tahun 1868.

Sumber : ANRI, *Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891*, No. 77



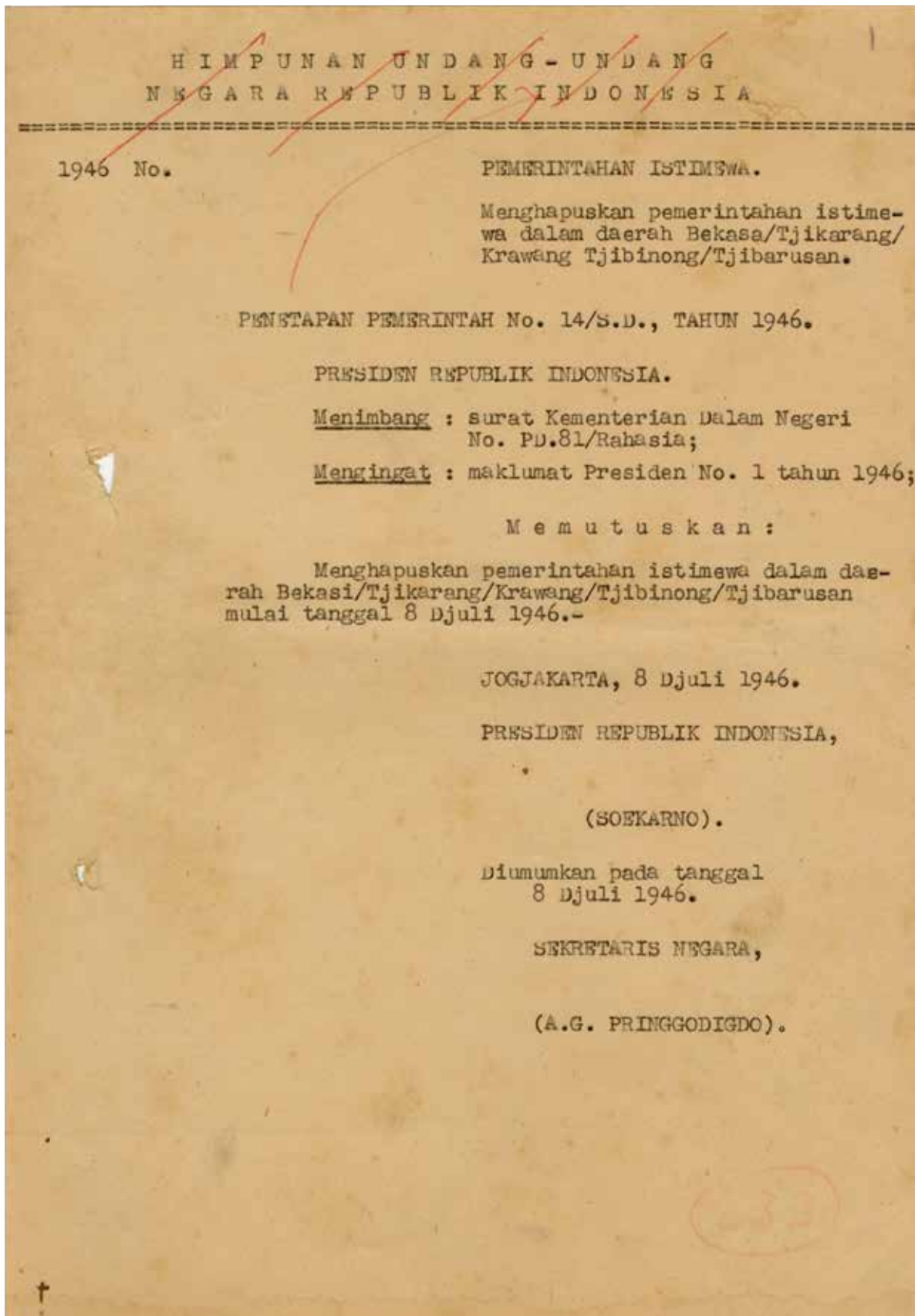
Informasi kesesuaian syarat promosi dari Patih ke Wedana Karawang, Mas Kartawidjaja, 25 Oktober 1939.

Sumber : ANRI, Alg. Sec. GB-BT 1891-1942 No. 3393

BESLUITINGSTAAT betreffende b/n Besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van

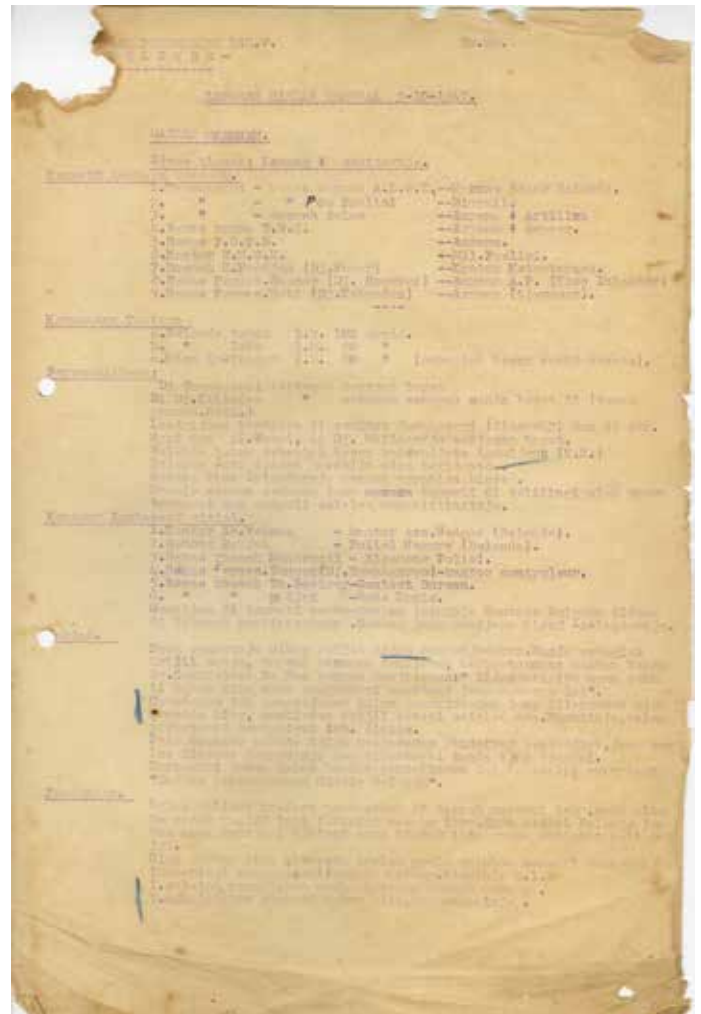
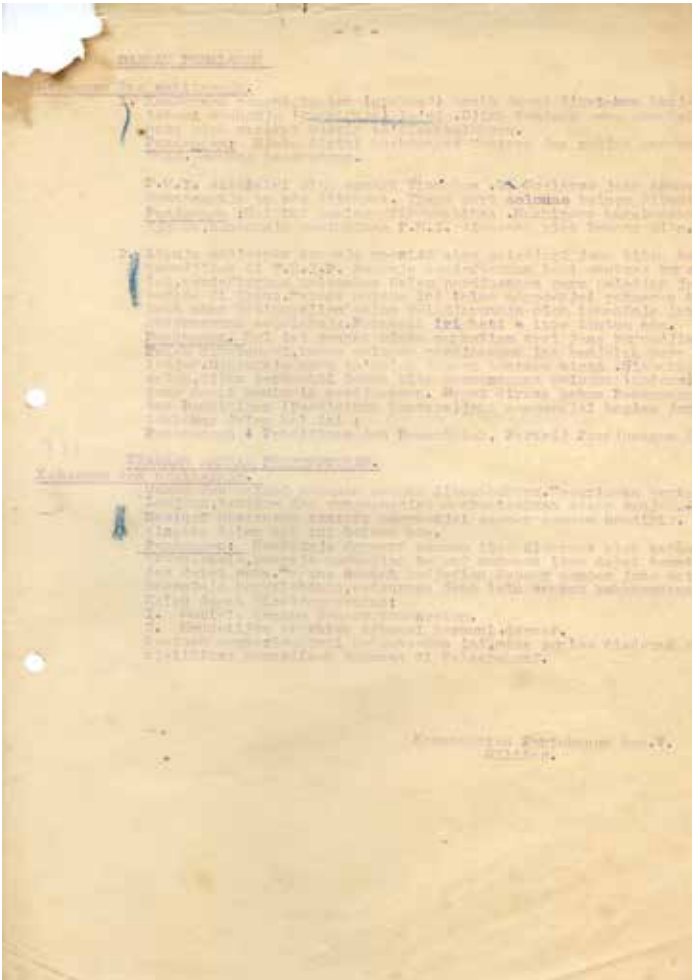
No.	V e r l i g e				K i e u w e					Stijl onder- telling voor het toe- nemen van de ererij- geda wette- verhoofing.	Aanmerkingen
	Bevrijding.	Schied- dienst- 1-11-39	Bevrijding.	Overname- bevoegdheid.	Bevrijding.	Bevrijding.	Bevrijding.	Bevrijding.	Bevrijding.		
1					32 VIII	-	1.550.-	-	1.550.- (vijf- honderd vijf- tiegulden)		
	Dezerteur (Jombang, 13599)	Districthoofd van Kraoeng, Kraoeng, pro- vincie West- Java.-	VI 14	1.415.-	Patih van het regentschap Pondaglang, pro- vincie West- Java.						

*1 In deze kolom te vermelden alle andere gegevens, welke behoeven zijn, zooals voor de berekening der inkomsten van betrokkenen.



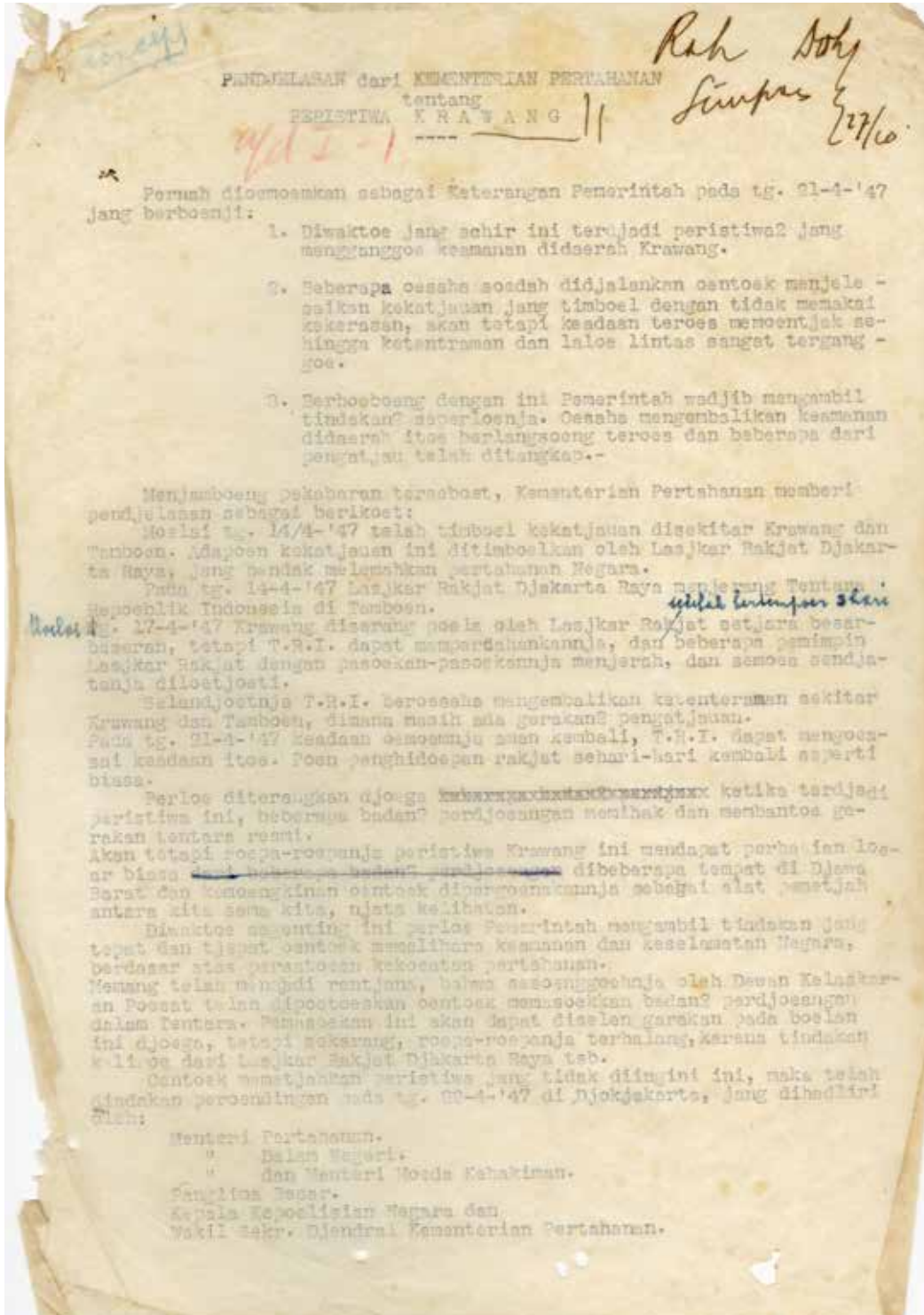
Penetapan No. 14/SD tgl. 8 Juli 1946 tentang penghapusan Pemerintah Istimewa Daerah Bekasi/Cikarang/Karawang/Cibirong/Cibarusan.

Sumber : ANRI, Setneg RI 1945-1949 No. 237



Laporan harian dari Kementerian Pertahanan Bagian V Militer tanggal 5 Oktober 1947 tentang keadaan musuh dan militer di daerah Karawang, Kebumen, dan sekitarnya.

Sumber : ANRI, Kementrian Pertahanan RI 1945-1953 No. 1334



Surat dari Kementerian Pertahanan tanggal 21 April 1947 tentang peristiwa kekacauan di Karawang dan Tambun oleh Laskar Rakyat Jakarta Raya yang berpengaruh di Jawa Barat. NB. Arsip tidak lengkap.

Sumber : ANRI, Kementrian Pertahanan RI No. 1044



U I T T E R S E N - S E I uit het Register der Besluiten van den Resident van Krawang te Purwakarta.

No. G.P./21-49. **11488.** PURWAKARTA, 15 Mei 1949.

DE RESIDENT VAN KRAWANG V.D.

Gelezen het brieftelegram van den Minister van Binnenlandse Zaken Nagara Pasundan ddo. 7-5-1949 No. 2358/26/PL/49.

Overwegende:

- dat de functien van de organen van op de voet van art. 121 van de Ind. Staatsregeling aangewezen zelfstandige gemeenschappen v.a.v. deze ontbreken of nog niet functioneren, alsmede van diegenen die hun bevoegdheid aan de gemeende organen ontleen, ingevolge art. 1 van het besluit van de Raad van West Java ddo. 20-2-1948 No. 2005/20/JL. ("Hoeovereenkomsting zelfstandige gemeenschappen West Java") onder meer worden verbonden aan de functien van het Hoofd van Tijdelijk Bestuur te Batavia;
- dat in verband met de instelling van de Residentie Krawang bij besluit van de Wali Nagara Pasundan ddo. 19-1-1949 No. 12 de uitvoering van bevoegden, beoemingen en verrichtingen van het voormalig Hoofd Tijdelijk Bestuur te Batavia bij besluit van de Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesie ddo. 4-4-1949 No. 9 (Stbl. No. 99) aan de Resident H.T.A. Krawang zijn overgedragen;
- dat het voormalige regentschap Krawang is gesplitst in de regentschappen Subang en Krawang (nieuw) tezamen vormende de residentie Krawang;
- dat bij besluit van de Wali Nagara Pasundan ddo. 9-4-1949 No's: 63/PL/49 en 64/PL/49 de haren Rd. Hasan Goeris Dikj Khoesmah en Rd. Soebajo Soewis Njambardja in afwachting van hunne benoeming als mede zijn belast met de functie van Regent respectievelijk van het nieuwe regentschap Krawang en van het regentschap Subang;

Bilande thans een voorziening treffen met betrekking tot de uitvoering van de bestuurszaak van gemeende ds. Regenten;

Oulet op art. 4 van de verordening in het besluit No. 2005/20/J.L. van de Raad van West Java, alsmede op het besluit van de Luitenant Gouverneur-Generaal van Ned. Indie ddo. 10-1-1946 No. 2 (Stbl. No. 5) jante dat van 19 November d.s.v. No. 10 (Stbl. No. 130) en het besluit van de Hooge Vertegenwoordiger van de Kroon ddo. 4-4-1949 No. 7 (Stbl. No. 99).

H E E F T B E S L U T E N :

W E T B E S L U T E N : Het ingang van de toekenning dezer de uitvoering van de-
 I. Regent.
 II. Collen van Gecommitteerden.
 alsmede van diegenen die hun bevoegden aan gemeende organen en functionarissen ontleen, op te dragen aan de fungerende Regenten van Subang en Krawang ieder voor zover zijn gebied betreft.

A A N :
 den Directeur v/a-Kabinet v/a.
 Luitenant G.G. te Batavia.

Van wege:

- 2 -

W E T B E S L U T E N : Te bepalen dat gemeende functionarissen bij de uitvoering van de hun bij dit besluit opgedragen functien, de desnoetrest bestaende bepalingen zoveel mogelijk zullen toepassen met inachtneming voorts van de aanwijzingen, welke door het desartes bevoegde gezag zijn of zullen worden gegeven.

W E T B E S L U T E N : Te bepalen dat de door voornoemde fungerende Regenten van Subang en Krawang en hun dijnsteenvaardig als mede uitgeoefende bevoegden hun opgedragen knachten het bepelde sub "Van Korsta" van dit besluit geacht worden te zijn geacht vrachten art. 23 der Regentschapsordonnantie.

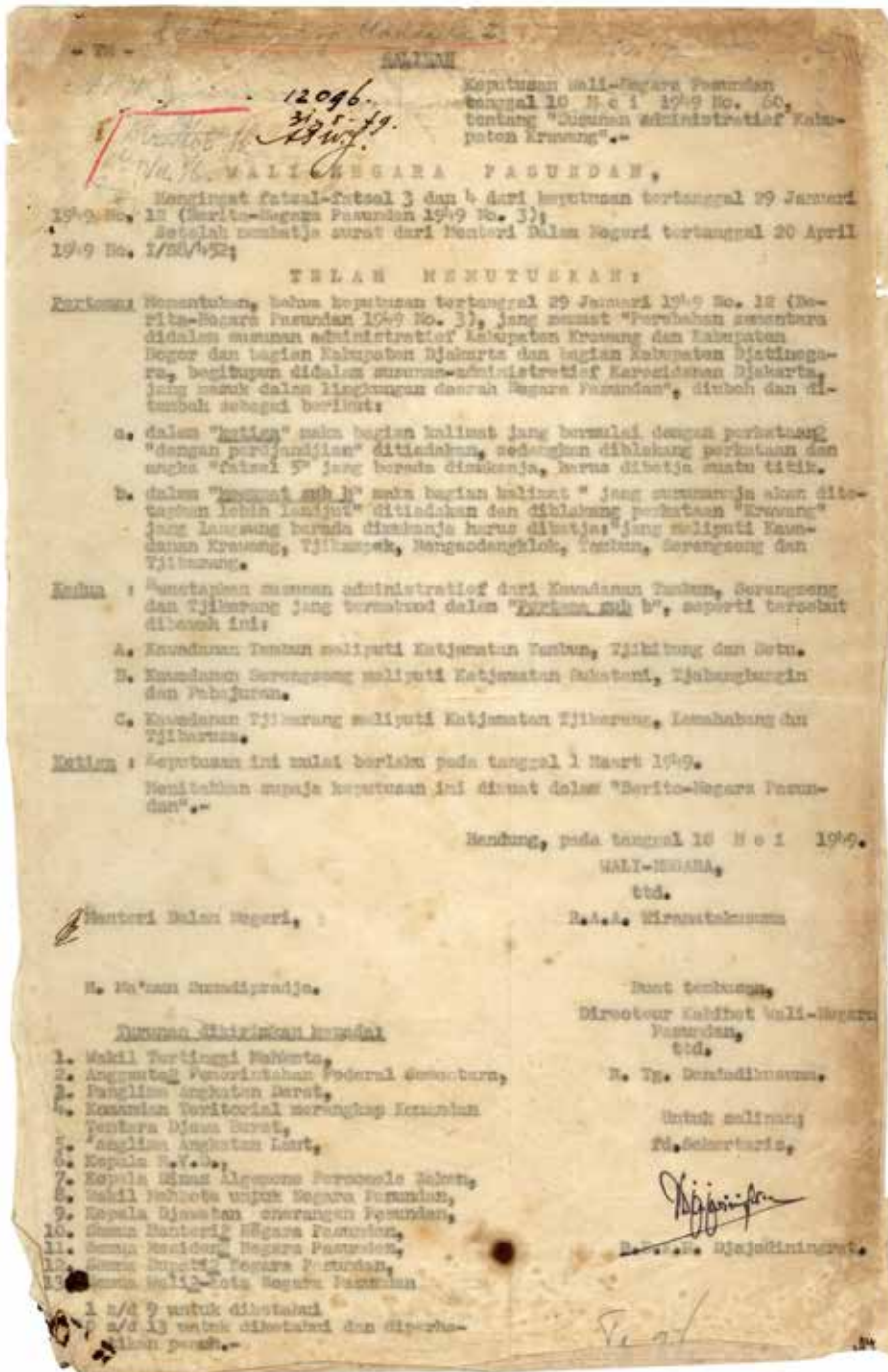
W E T B E S L U T E N : Te bepalen dat een dit besluit bekrachtigd en worden gevezen door openen in de Javasche Courant en door aanplakking op het desartes bestaende publicatiehoofd ten kantore van den Resident H.T.A. Krawang te Purwakarta.

A N N O T A T I E dezes verloed nent:

- de Directeur van het Kabinet van de Luitenant Gouverneur-Generaal te Batavia.
- de Secretaris van Staat, Hoofd van het Departement van Binnenlandse Zaken te Batavia.
- de Minister van Binnenlandse Zaken van de Nagara Pasundan te Bandung.
- de Centraal Registratie Administratie van het Departement van Financien te Bandung.
- de Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof in Indonesie te Bandung.
- het Hooggerechtshof van Ned. Indie te Batavia.
- de Commissaris van de Kroon van de Nagara Pasundan te Bandung.
- het Ned. Ind. Beheersinstituut te Batavia.
- de Regeringsvoorlichtingsdienst te Batavia.
- de Resident te Batavia.
- de Militair Commandant te Krawang en Subang.
- de Commandant der Marine te Batavia.
- de Directeur der Informatie te Batavia.
- de Hoofddirectie van Politie te Batavia.
- de Officier van Justitie te Purwakarta.
- de Appelraad te Batavia.
- de Luitenant te Batavia en Purwakarta.
- de Regenten van Krawang en Subang.
- de Korpschef der Staatspolitie Pasundan te Purwakarta.

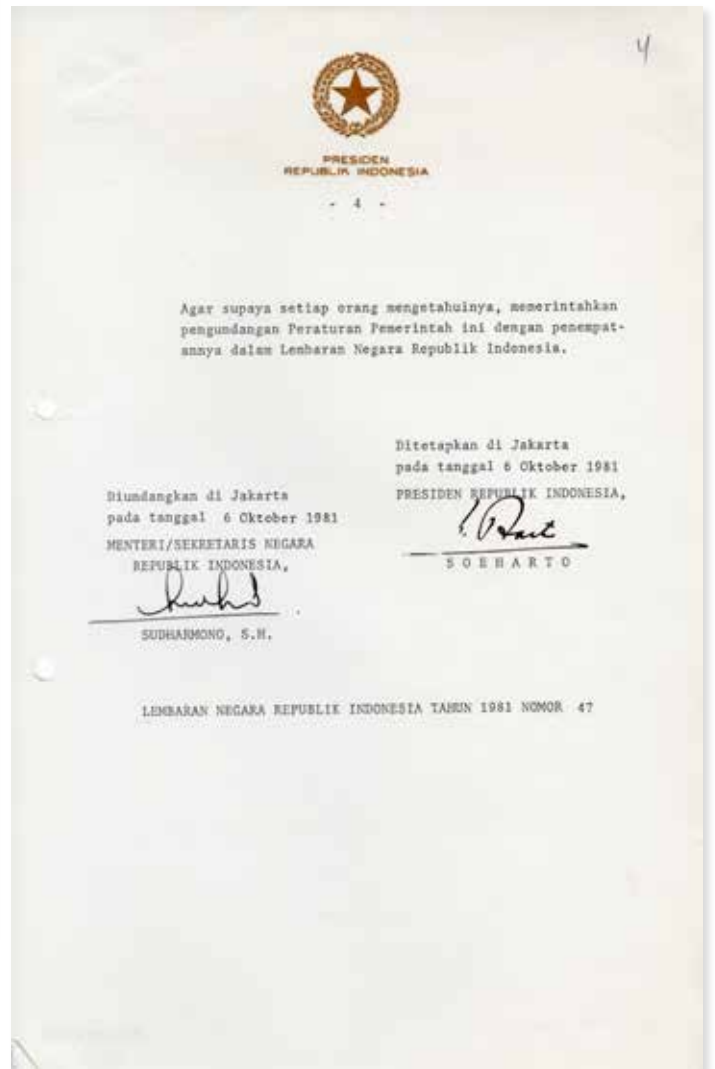
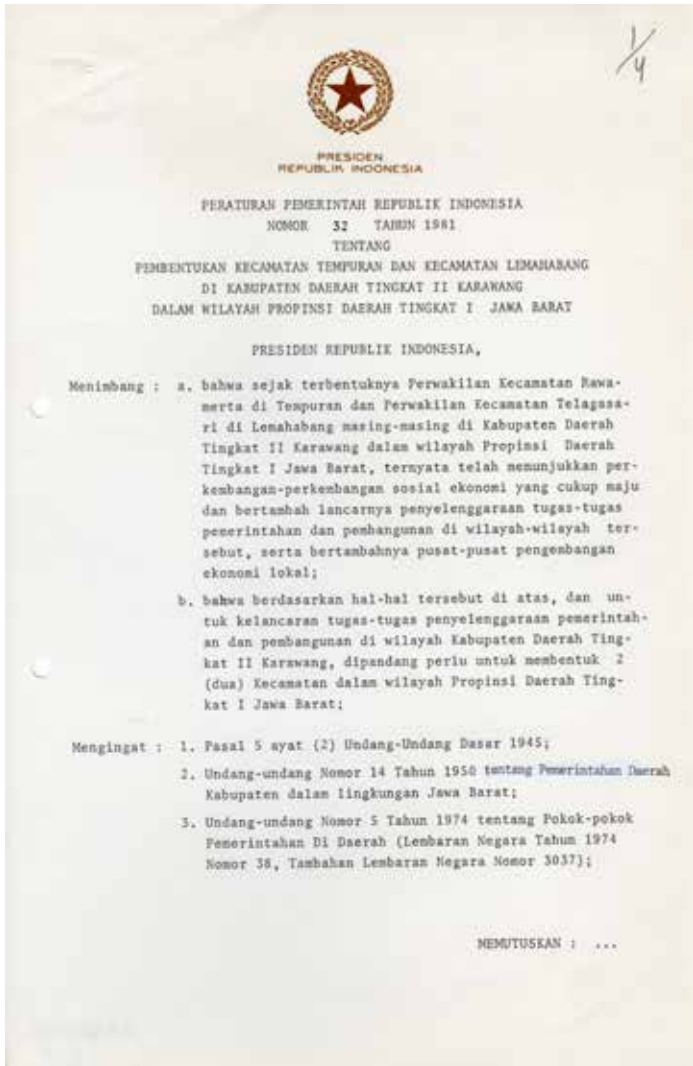
Stent overeen met voork. Register,
 De Wd. Secretaris,
 (S. Soesir Goerianata).

Berkas terkait pembagian administratif Distrik Djasinga, Djonggol dan Regentschap Krawang, 1949.
 Sumber : ANRI, Alg. Sec. Gedeponeerde Archieven 1942-1950 No. 1233



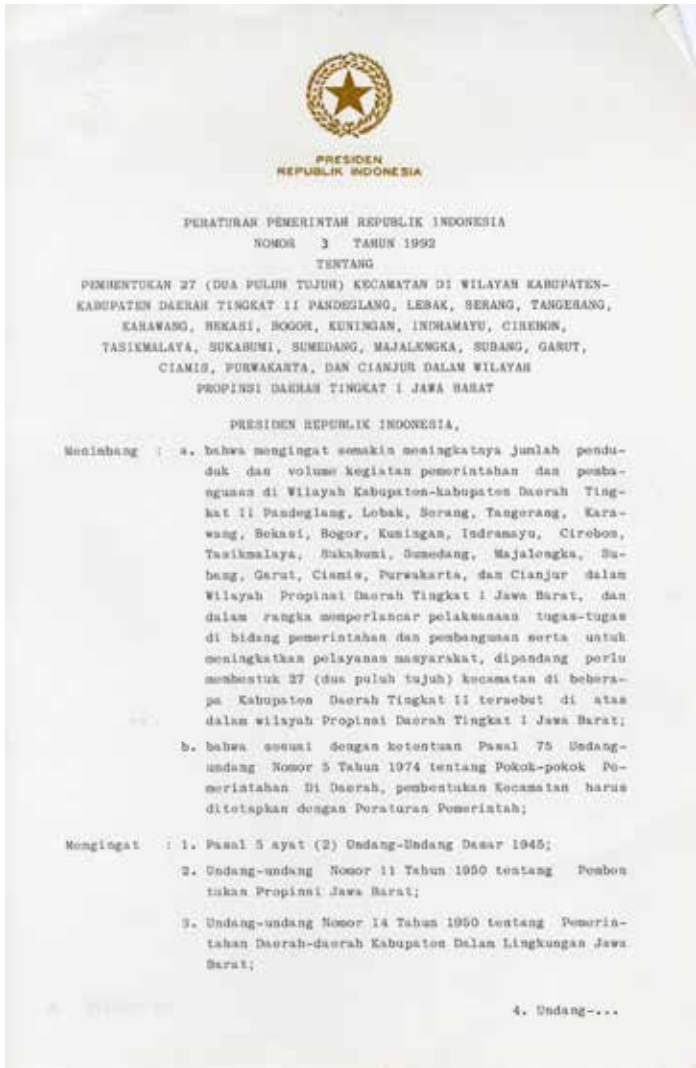
Salinan Keputusan Wali-Negara Pasundan tanggal 10 Mei 1949 No. 60 tentang "Susunan Administratif Kabupaten Karawang" yang memuat perubahan dalam Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1949 No. 12 (Berita Negara Pasundan 1949 No. 3).

Sumber : ANRI, Alg. Sec. Gedeponeerde Archieven 1942-1950 No. 1234



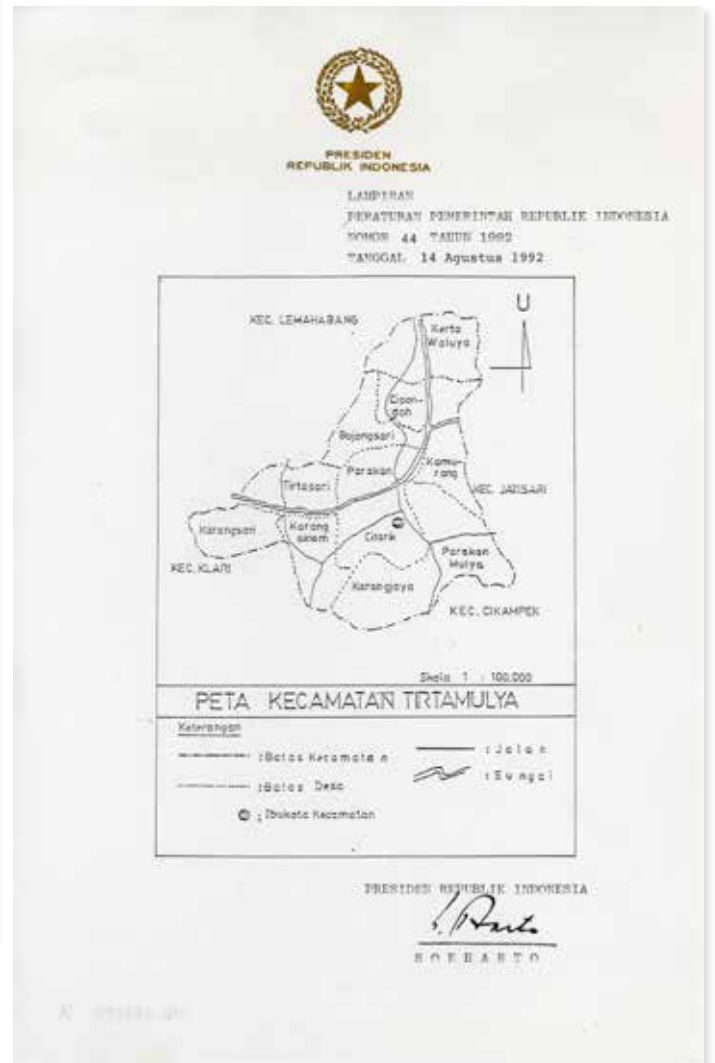
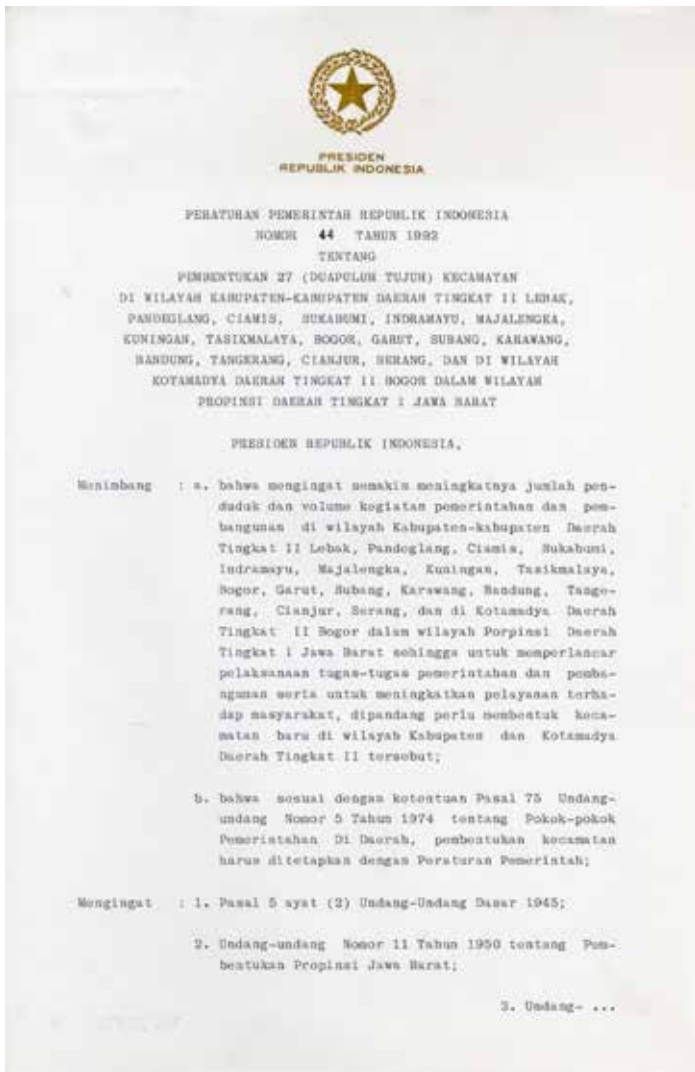
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Tempuran Dan Kecamatan Lemahabang Di Kabupaten Daerah Tingkat II karawang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 6 Oktober 1981.

Sumber : ANRI, *Setneg PH 1949-2005 No. 2915*



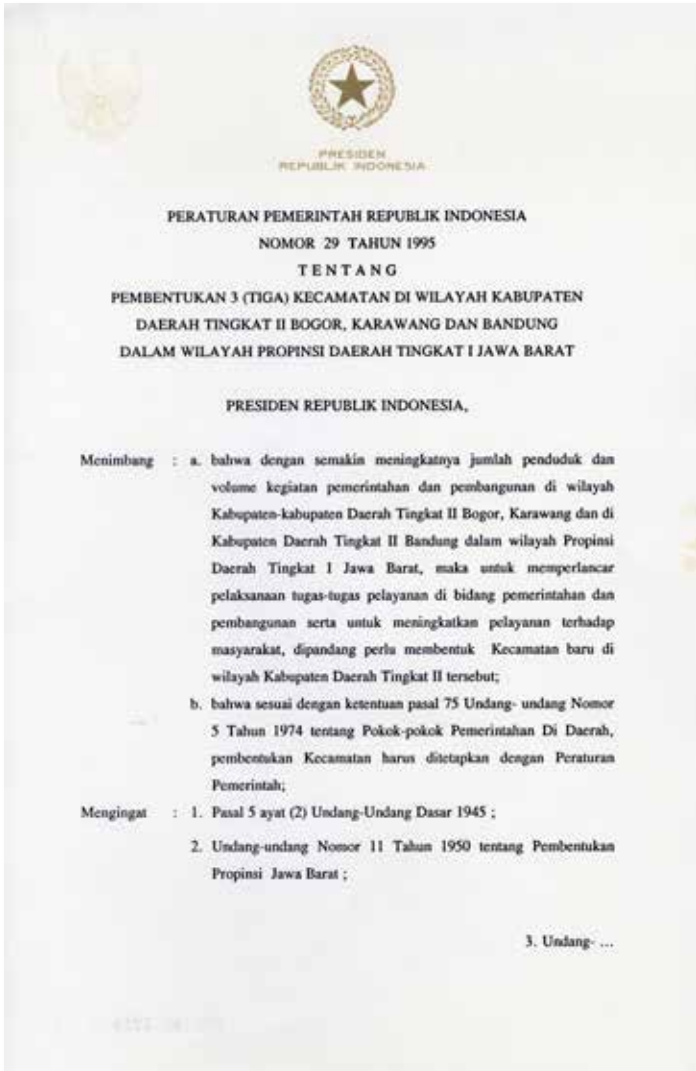
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang, Lesak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta, dan Cianjur dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 11 Januari 1992.

Sumber : ANRI, *Setneg PH 1949-2005 No. 3377*



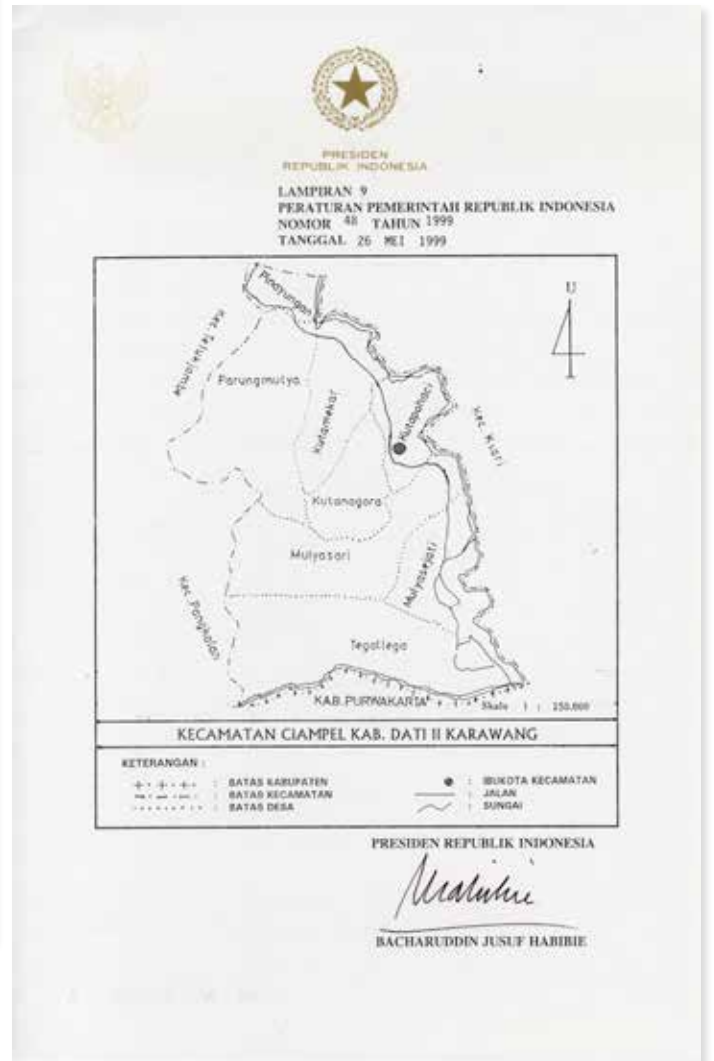
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, dan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 14 Agustus 1992.

Sumber : ANRI, *Setneg PH 1949-2005 No. 3418*



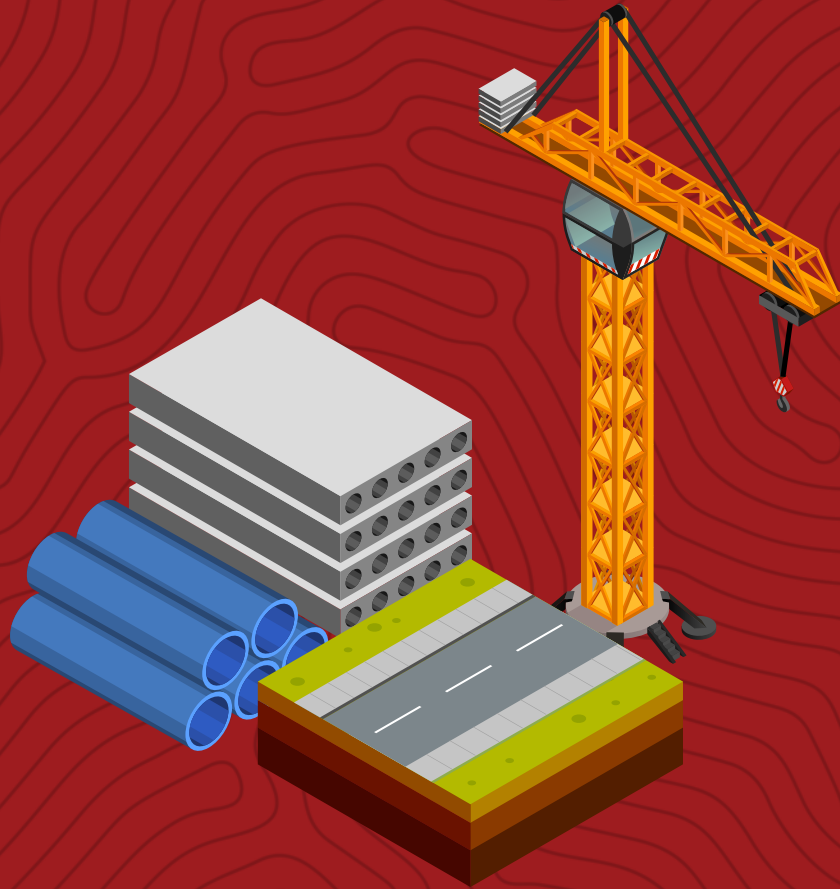
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Karawang dan Bandung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 23 Agustus 1995.

Sumber : ANRI, *Setneg PH 1949-2005 No. 3589*



Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 14 (empat belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis dan Majalengka dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 26 Mei 1999.

Sumber : ANRI, *Setneg PH 1949-2005 No. 3857*



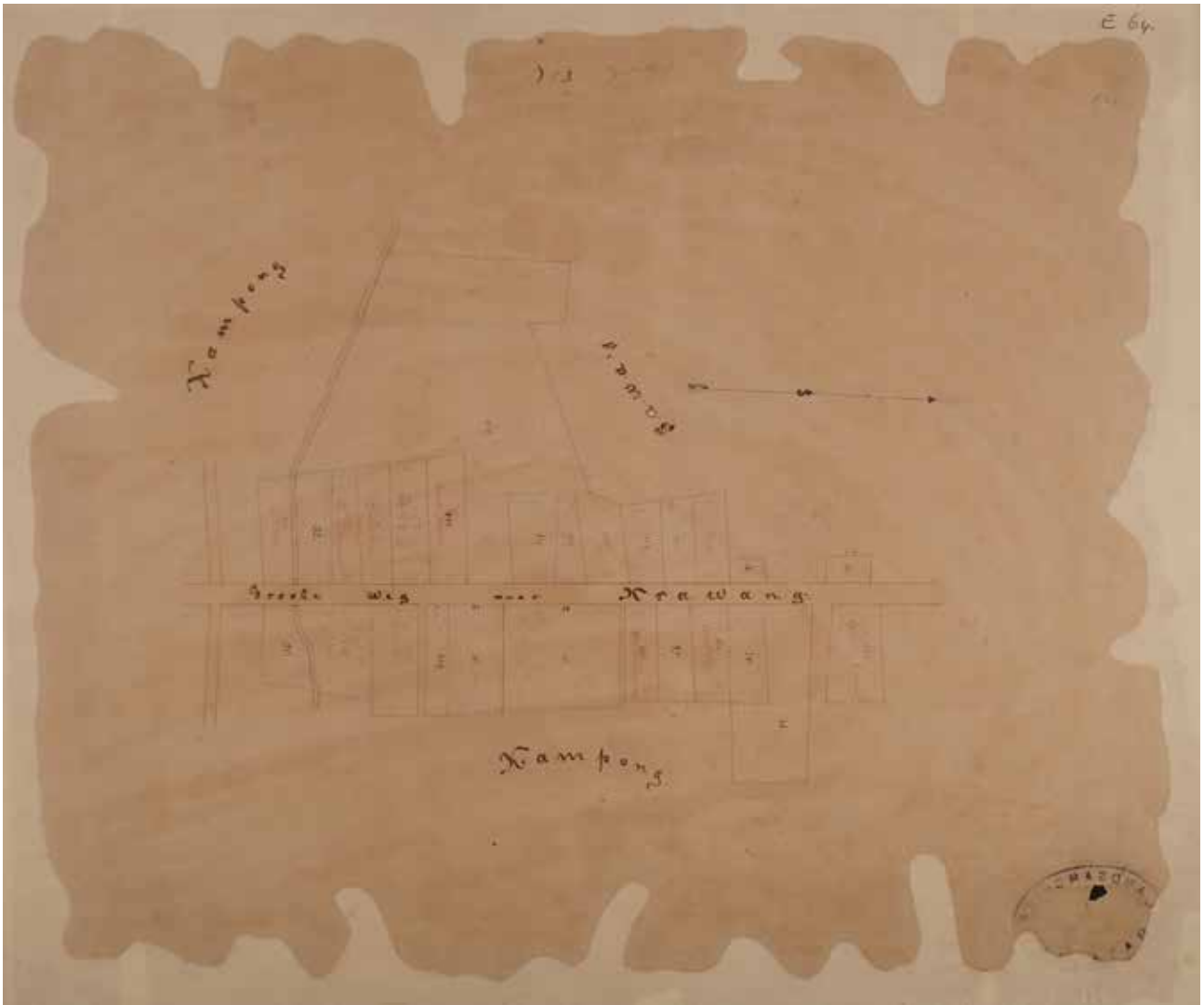
INFRASTRUKTUR

Memasuki abad ke-19, Pemerintah Kolonial Belanda mulai memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di luar Batavia. Diawali dengan pembangunan Jalan Raya Pos oleh Gubernur Jenderal Daendels yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Jalan Raya Pos Daendels tersebut juga melalui Karawang melewati tanah-tanah partikelir seperti Ciasem dan Pamanukan hingga terus ke Cirebon.

Pada perkembangan selanjutnya, Pemerintah Kolonial Belanda membangun jalan dari Wanayasa menuju Tenggeragung dan juga jalan Purwakarta menuju Cikao. Pemerintah Kolonial Belanda juga memberikan persetujuan kepada para pemilik tanah partikelir di Karawang untuk membangun jalan-jalan. Salah satunya adalah jalan yang menghubungkan Karawang dengan sisi timur *Buitenzorg* (Bogor), yang melalui Citeureup, Cibarusa dan Tegalwaru. Pembangunan jalan tersebut untuk mempermudah akses mobilisasi orang dan komoditas masuk dan keluar Karawang.

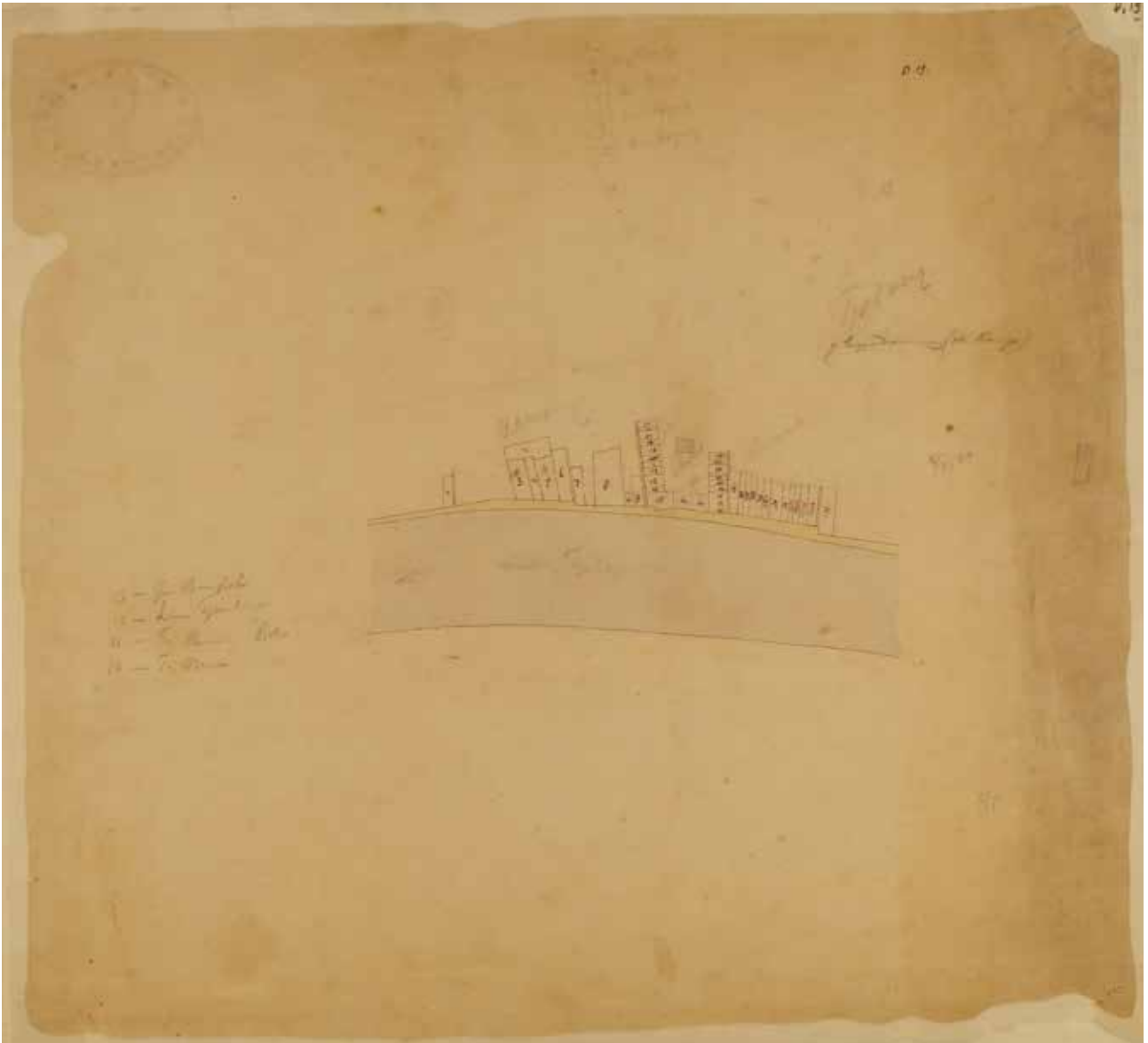
Sebagai kawasan lumbung padi dan sentra komoditas perkebunan penting pada saat itu, Pemerintah Kolonial Belanda juga membangun saluran-saluran irigasi dan bendungan di Karawang. Pembangunan saluran irigasi dan bendungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Karawang. Memasuki awal abad ke-20, Pemerintah Kolonial Belanda membangun jalur kereta api untuk menghubungkan Batavia-Karawang. Jalur kereta api tersebut untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan perdagangan yang berimbas pada peningkatan aktivitas ekonomi di Karawang. Jalur kereta api juga mempermudah Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah di Jawa, termasuk Karawang, dan menjadi salah satu cara untuk membuka isolasi di wilayah Jawa Barat karena topografi wilayahnya yang mayoritas adalah pegunungan.

Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan pembangunan infrastruktur di Karawang pada masa kolonial.



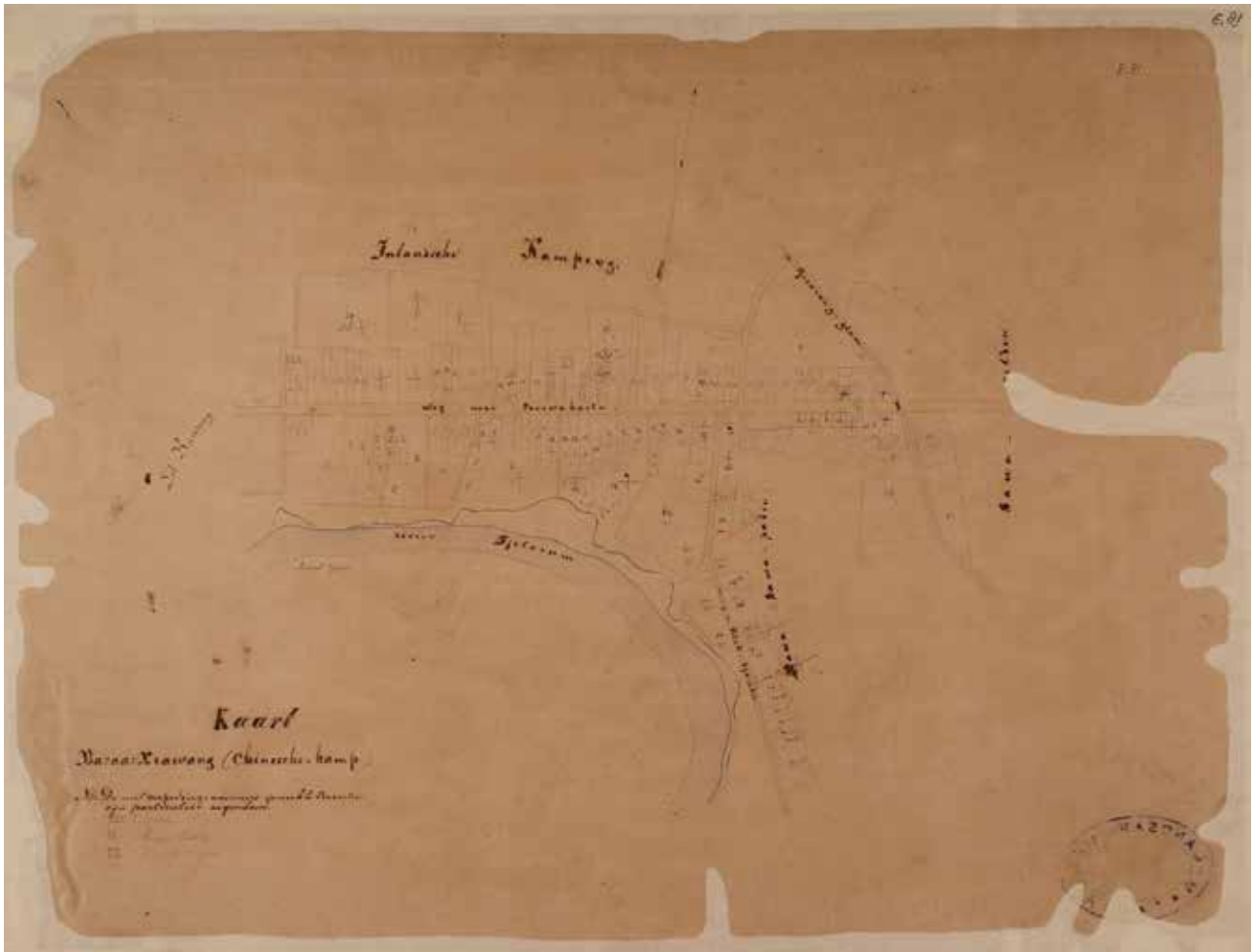
Peta Pendaftaran tanah, Modern, dari beberapa bidang tanah di jalan utama menuju Karawang, tanpa tahun.

Sumber : ANRI, De Haan No. E. 64



Peta Kadaster yang Menggambarkan Beberapa Bidang Tanah di Sekitar Sungai Tjitarum di Karawang, tanpa tahun.

Sumber : ANRI, De Haan No. D. 19



Peta Pasar Karawang, di Perkampungan Cina, tanpa tahun.

Sumber : ANRI, De Haan No. E. 81



Sungai mengalir dari Walahar, Karawang, Jawa Barat, [1930].

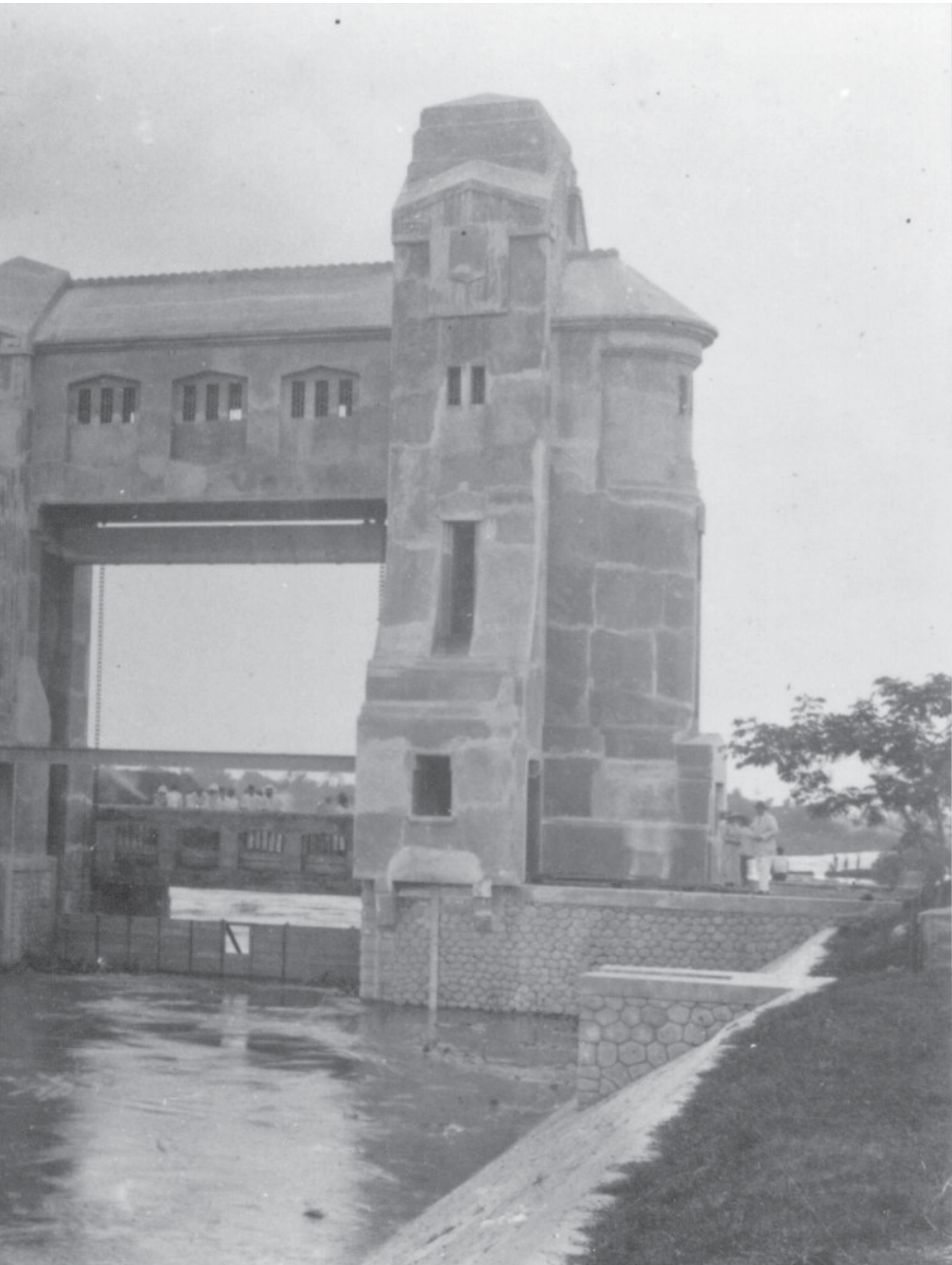
Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0275/052



Bendungan Walahar di Kali Citarum, Karawang, Jawa Barat, [1930].

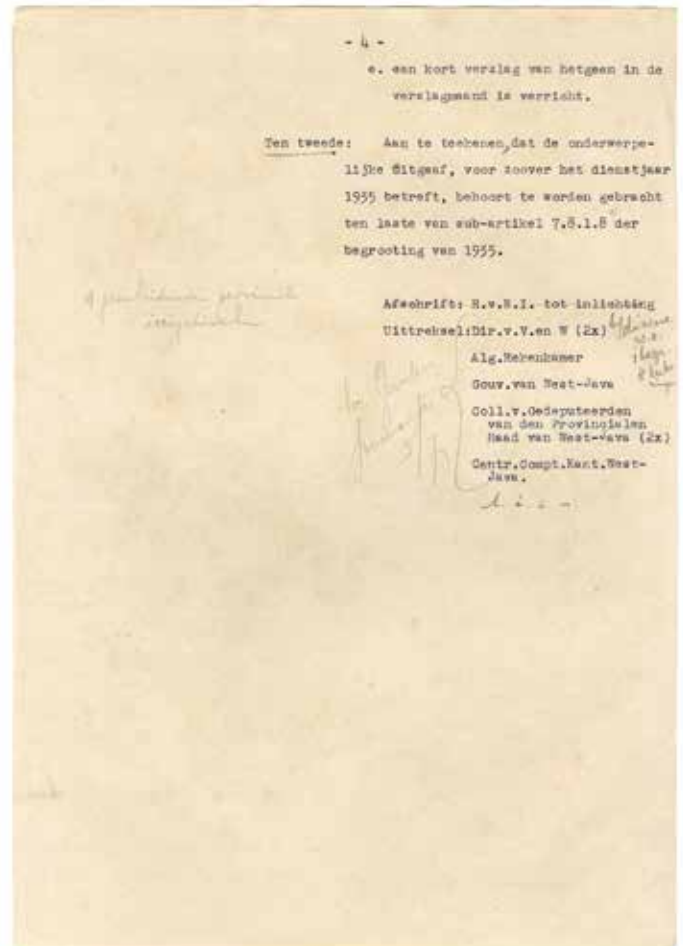
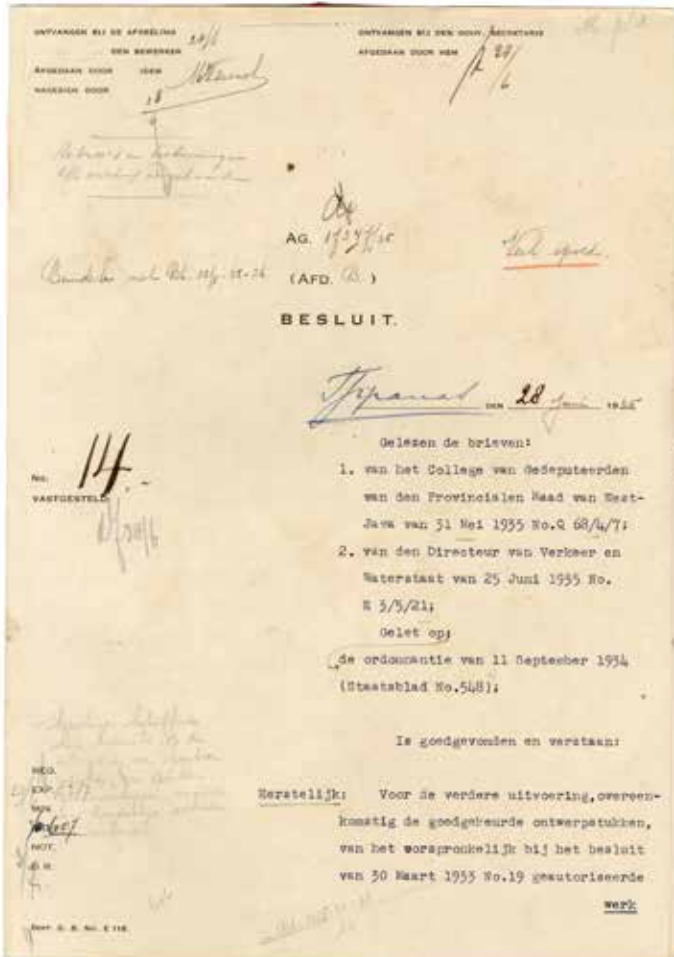
Sumber : ANRI, KIT Jabar No.0532/090





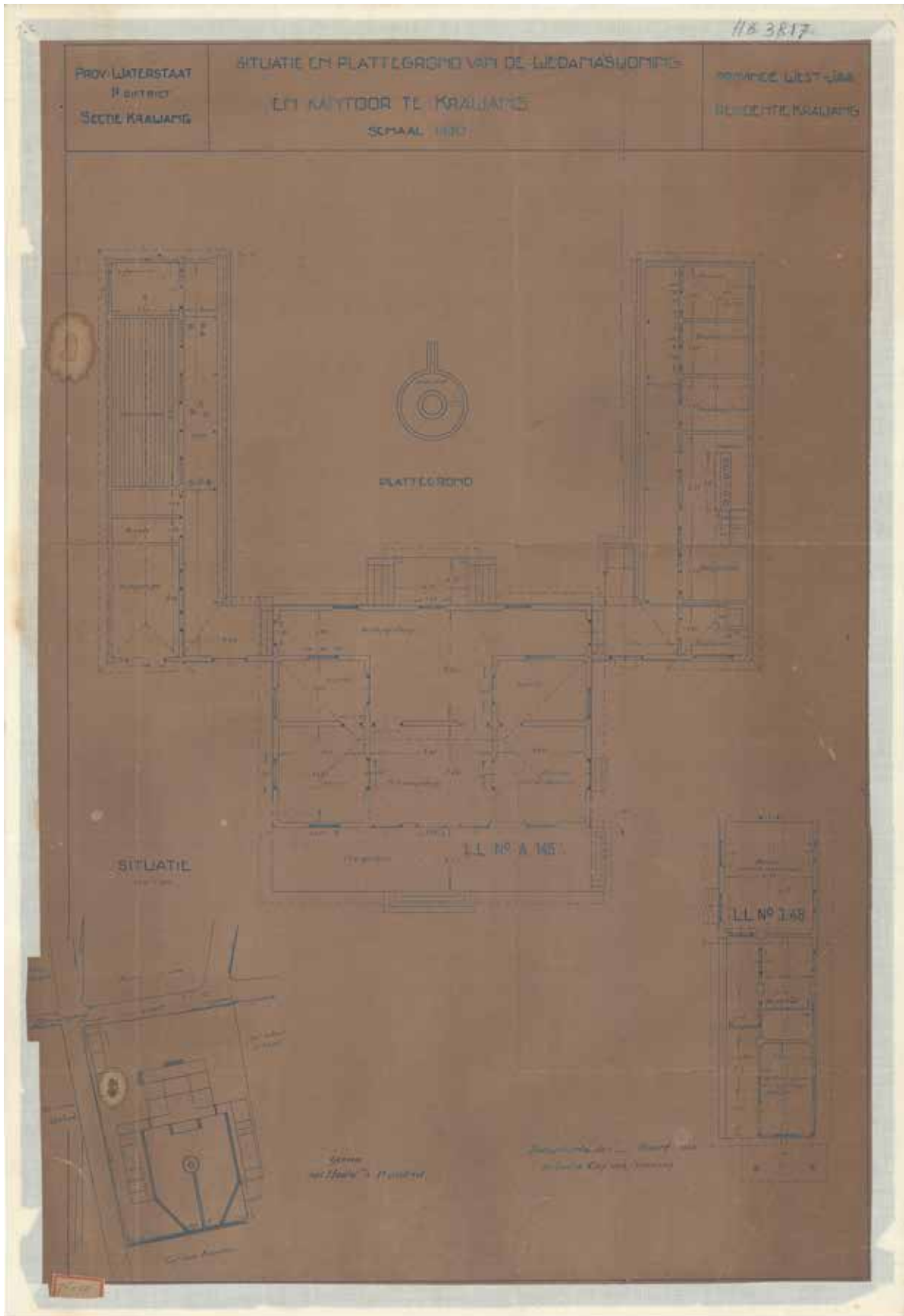
Pintu air di Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 1084/022



Surat Keputusan Pemerintah Kolonial Belanda tentang Bangunan Sipil dan Pengelolaan Air (tiap Residensi) dan Pelapisan pada Jalan Berpasir di Karawang, 28 Juni 1935, 28 Juni 1935.

Sumber : ANRI, Alg. Sec. GB-Tzg. Ag. 1891-1942 No. 9444



Gambar rancang bangun tempat tinggal dan kantor wedana di Karawang (3 gambar; plattegrond dan situatie), Maret 1930.

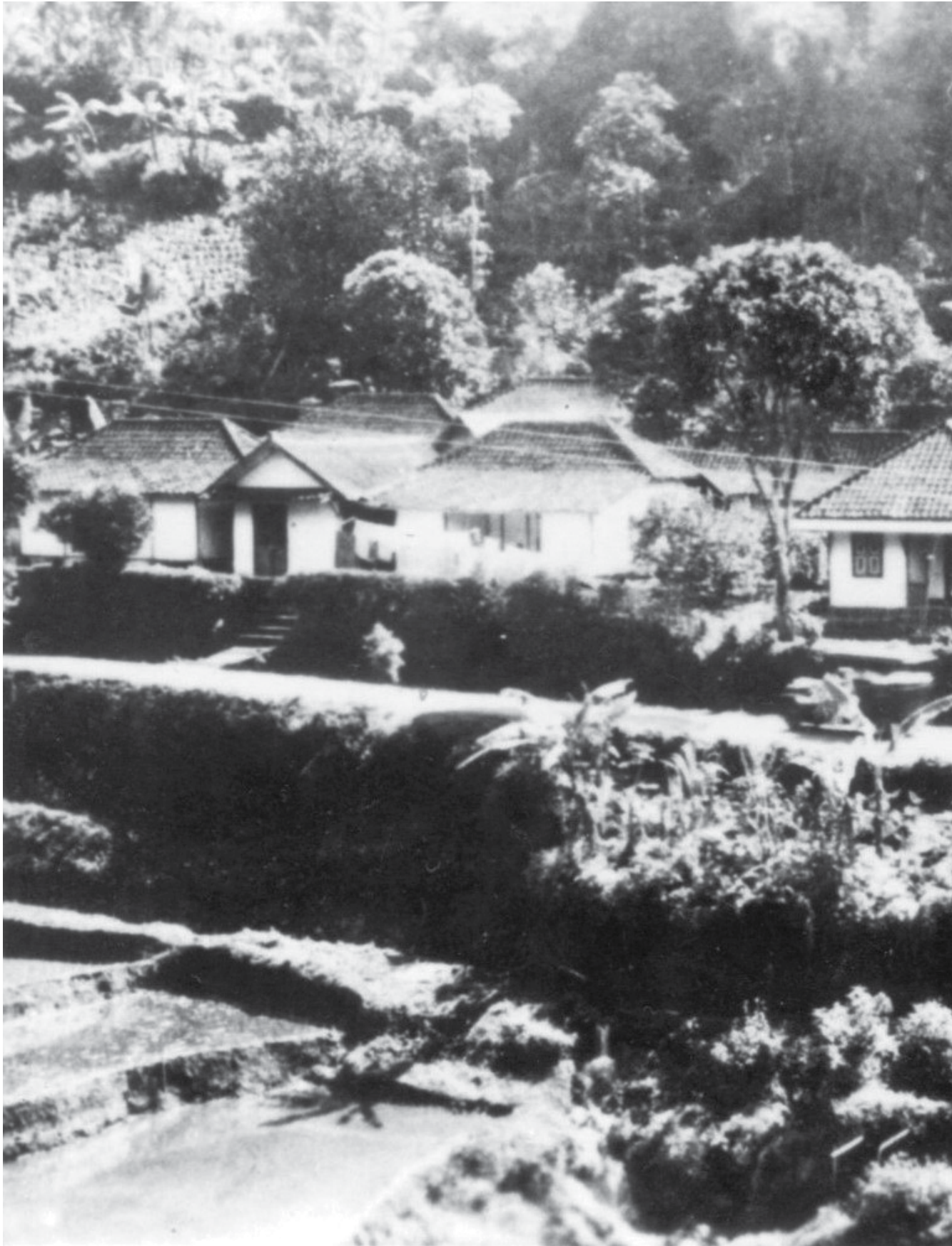
Sumber : ANRI, Departement Van Oorlog 1804-1939 No. HB 3817





Rumah Asisten Residen, Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0776/045a





Bangunan: Rumah-rumah di Segala Herang, Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0749/009





Gedung kantor BNI cabang Karawang, 1974.

Sumber : ANRI, PT. BNI Persero Tbk. (1946-1992), No. 1969





Rumah dinas Pimpinan BNI cabang Karawang di Jalan Singaperbangsa No. 19, 1974.

Sumber : ANRI, PT. BNI Persero Tbk. (1946-1992), No. 1971



Rumah dinas Wakil Pimpinan BNI cabang Karawang di Jalan Singaperbangsa No. 35, 1974.

Sumber: ANRI, PT. BNI Persero Tbk. (1946-1992), No 1972



Rumah dinas staf BNI cabang Karawang, 1974.

Sumber : ANRI, PT. BNI Persero Tbk. (1946-1992), No 1975



Pohon akasia di sepanjang jalan, Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Jabar No. 0665/024



Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1988 tentang Pengoperasian Jalan Tol Jakarta - Cikampek Seksi B dan C (Cibitung - Karawang - Cikampek) untuk Uji Coba dan Penetapan Besarnya Tarif Tol Uji Coba, 19 September 1988.

Sumber : ANRI, Setneg PH 1949-2005 No. 10273





Danau di Wanayasa, Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0958/045



TRANSPORTASI



Sebelum adanya pembangunan infrastruktur modern, transportasi di Karawang sangat bergantung pada alam. Masyarakat memanfaatkan gerobak atau pedati yang ditarik hewan untuk transportasi darat, serta perahu kecil untuk melintasi sungai. Kolonialisme di Karawang membawa perubahan pada transformasi moda transportasi di Karawang. Pemerintah Kolonial Belanda menyadari potensi Karawang sebagai daerah lumbung padi dan sentra penghasil komoditas perkebunan. Untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi dan mobilitas pasukan, Pemerintah Kolonial Belanda mulai membangun berbagai infrastruktur penunjang transportasi seperti jalan raya dan jalur kereta api. Adanya infrastruktur transportasi ini tidak hanya mempercepat distribusi komoditas perkebunan, tetapi juga memperkuat kendali pemerintah kolonial atas wilayah Karawang.

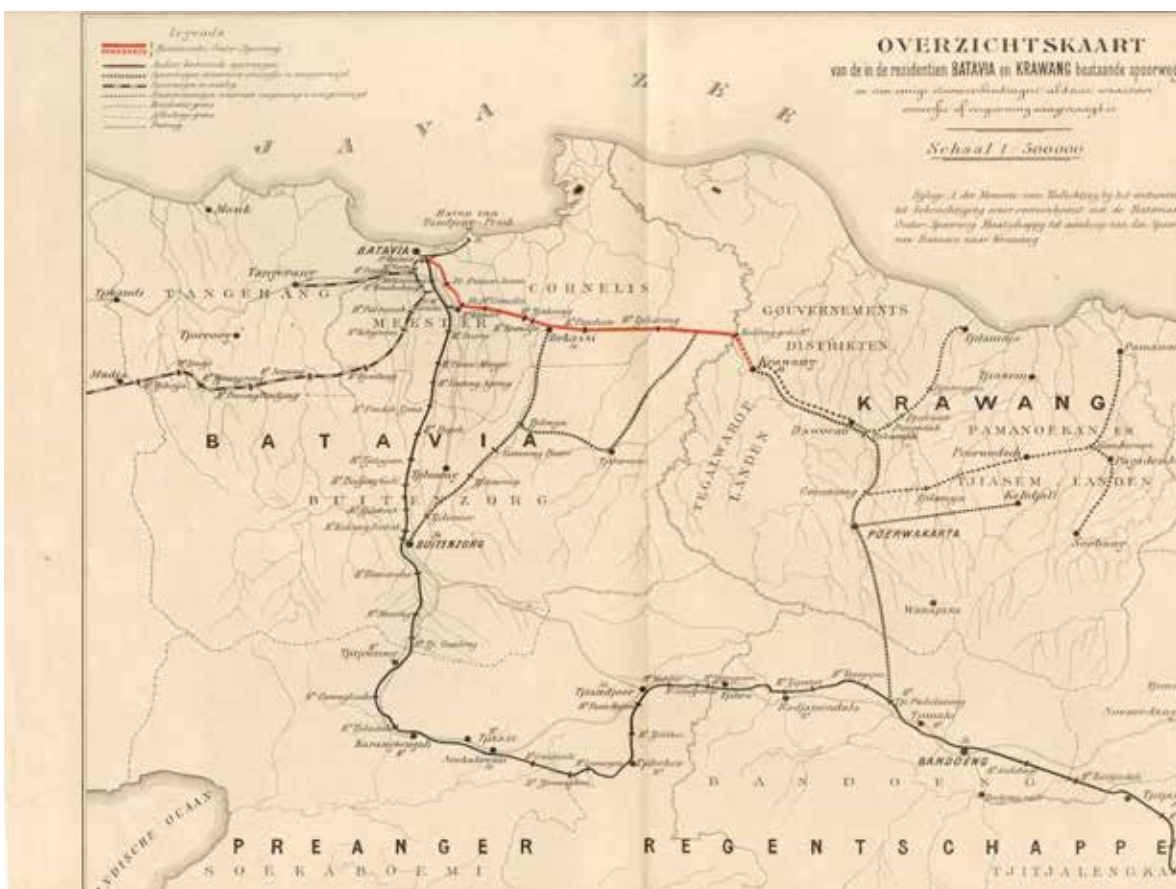
Transportasi darat, terutama jalur kereta api dan jalan raya, menjadi tulang punggung sistem transportasi di Karawang pada masa kolonia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Karawang. Pembangunan jalan raya beraspal, jaringan jalan tol, dan perbaikan jalur kereta api menjadi prioritas untuk menunjang peningkatan efisiensi transportasi bagi masyarakat. Berbagai jenis angkutan umum, seperti bus dan angkot, mulai beroperasi sebagai pilihan moda transportasi di Karawang selain kereta api. Salah satu momentum perkembangan transportasi di Karawang adalah selesainya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung (*Whoosh*) pada tahun 2023. Jalur kereta api cepat ini tidak hanya mempersingkat waktu tempuh, tetapi juga meningkatkan konektivitas Karawang dengan kota-kota besar lainnya.

Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan perkembangan transportasi di Karawang pada masa kolonial.



Pengambilalihan Perusahaan Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij dan Pengelolaan Jalur Kereta Api Batavia-Karawang, 1898.

Sumber : ANRI, Alg. Sec. GB-BT 1891-1942 No. 614





Bus dari Naamloze Venootshap (NV) Dunia Baru dengan tujuan Jakarta-Karawang (Rengasdengklok) di Kota Jakarta, 3 Juli 1956.

Sumber : ANRI, Kempen RI Wilayah Jakarta 1956 No. 34818



Jembatan kereta api jurusan Jakarta-Karawang- Bandung, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 1120/004



Jalan kereta api Padalarang - Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0904/080



Jembatan kereta di Kali Citarum dekat Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0520/032





Jembatan kereta api dari
Padalarang menuju Karawang,
Jawa Barat, [1930].

*Sumber : ANRI, KIT Jabar
No. 0519/064*



PERTANIAN



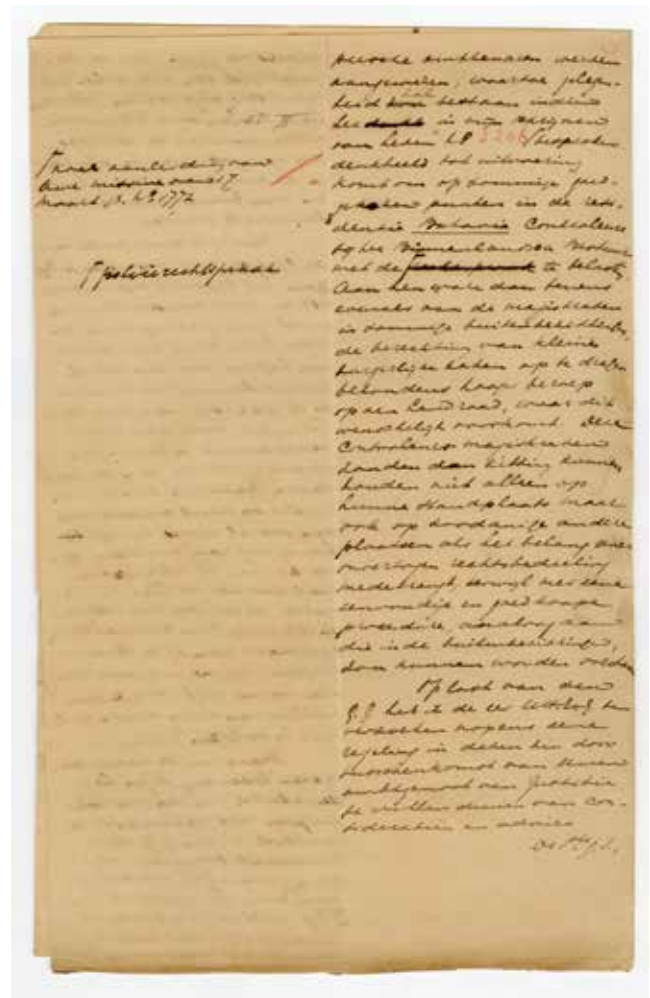
"Masyarakat Mataram sudah menetap di Karawang dan berjumlah ribuan orang, mereka membuka lahan dan mendirikan perkampungan"

Kutipan di atas dicuplik dari laporan Rijklof van Goens tahun 1655 yang menjelaskan bahwa Karawang telah menjadi daerah sentra pertanian sejak lama. Laporan van Goens ini diperkuat dengan narasi laporan seorang mardijkers bernama Antonio De Silva yang singgah di Karawang pada Juli 1641. Antonio De Silva menjelaskan dalam laporannya bahwa Karawang saat itu telah dihuni oleh 2000 orang Jawa dan mereka menanam padi dan lada, selain itu juga sudah membangun lumbung.

Peran penting Karawang sebagai sentra pertanian terus berlanjut hingga pada masa Karawang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Potensi tanah di Karawang yang subur dan cocok untuk berbagai jenis komoditas perkebunan menarik para pengusaha swasta untuk mengembangkan perkebunan di Karawang pasca dihapuskannya kebijakan tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan pemberlakuan undang-undang agraria (*agrarische wet*) pada 1870. Sistem liberal yang diterapkan pada akhir abad ke-19 juga makin mendorong investasi swasta dalam sektor pertanian, termasuk di Karawang. Beberapa perkebunan swasta terkenal di Karawang pada masa kolonial:

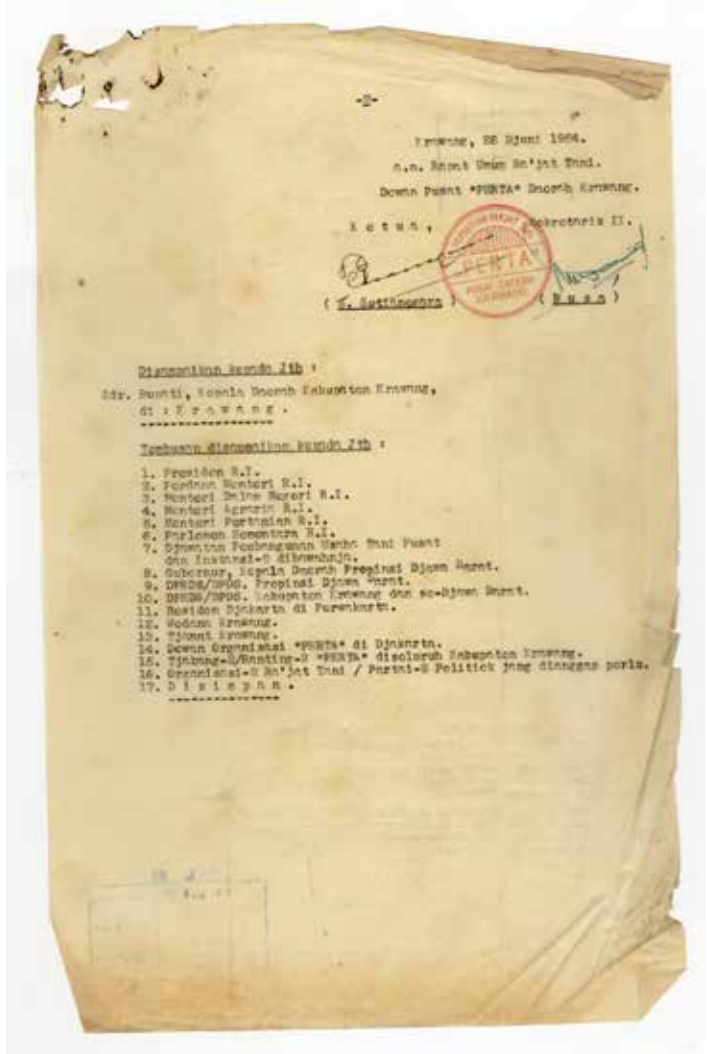
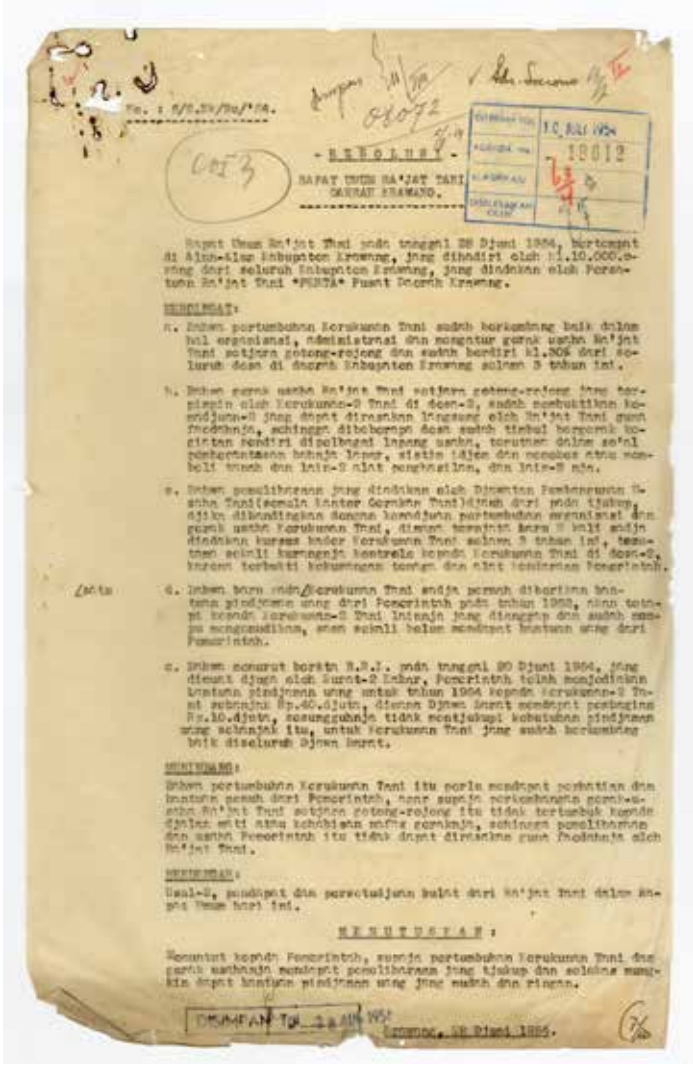
1. Perkebunan teh di Wanyasa, Sariredja, Selawangi, dll.;
2. Perkebunan kopi dan gula di Subang dan Majingsal, dll.;
3. Perkebunan karet di Bodjong, Djaloepang, Djati Loehoer, Gempolsari, dll.;

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting bagi Kabupaten Karawang walau saat ini, terjadi pergeseran dominasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri. Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan perkembangan pertanian di Karawang pada masa kolonial.



Surat Gouvernements Secretaris tanggal 19 Agustus 1904 No. 3205 yang berisi permohonan pertimbangan atas peraturan kepemilikan lahan pertanian di Residentie Batavia selain Afdeling Karawang.

Sumber : ANRI, Alg. Sec. GB-MGS 1890-1942 No. 4430



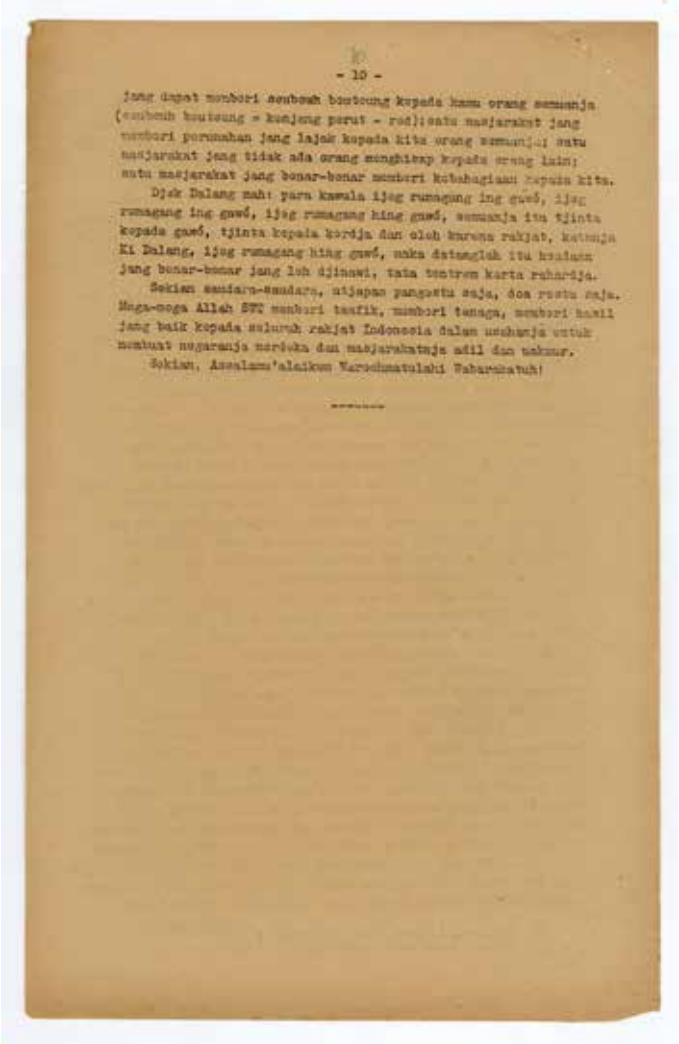
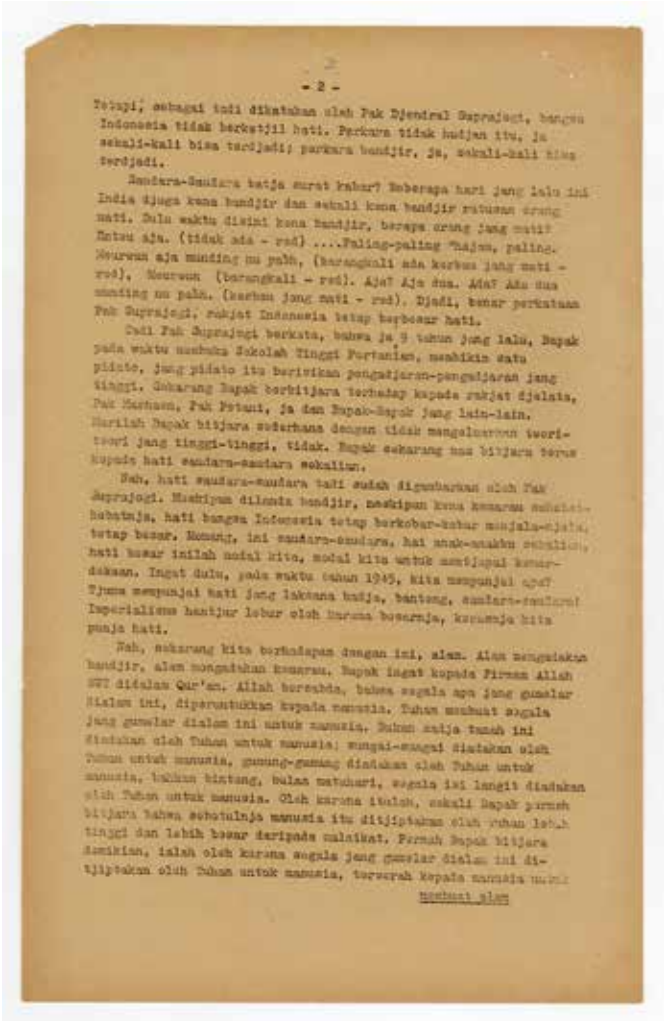
Resolusi Rapat Umum Rakyat Tani Daerah Karawang mengenai tuntutan kepada Pemerintah untuk mendapat bantuan pinjaman uang demi kerukunan tani, 28 Juni 1954.

Sumber : ANRI, Setneg KPM RI 1950-1959 Jilid 1 No. 2730



Seorang pria menyemprotkan *diklorodifeniltrikloroetana* (DDT) di Kebun Percobaan Jawatan Pertanian Kabupaten Karawang, 25 Mei 1955.

Sumber : ANRI, Kempen RI Wilayah Jakarta 1955 No. 28140



Pidato presiden pada pencangkulan pertama musim penanaman padi 1961 di hadapan para petani di Rengasdengklok, Karawang, 13 Oktober 1961.

Sumber : ANRI, Pidato Presiden Soekarno 1958-1967 No. 345



P.T. KARAWANG RICE MILLING CENTRE
(KARIMIC LTD.)
Dj. Prapantja IV/55,
Kawasan Baru - Jakarta.
Telepon: 71912.

Form. No. 01/PMN/68.-
Jakarta, 15 September 1970.-

Keperluan: Permohonan Fasilitas
Perihal: Perumahan Modal Negara
Negari.

Kepada Jih:
Bapak Menteri Keuangan R.I.,
Dj. Lapangan Banteng Timur 7,
Jakarta.

Dengan hormat,
Memang kita mempunyai yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kepada modal dalam negeri, untuk memfungsikan-nya diangkut produksi, dengan memperoleh fasilitas-fasilitas berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1968, bersama ini permohonan kami mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas tersebut, berupa:

- pembebasan besa setoran modal,
- pembebasan modal,
- pembebasan pajak penghasilan,
- pembebasan pajak perusahaan/pajak dividen (tax holiday),
- pembebasan besa pajak/pajak pertijuanan,
- dan lain-lain fasilitas perpajakan yang dimungkinkan,

sehubungan dengan rencana kami untuk mengabdikan pemanaan modal menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. bentuk pemanaan modal perusahaan terbatas.
2. Bidang usaha a. melakukan usaha-usaha pembangunan industri yang menghasilkan hasil pertanian dan pembangunan industri penolong produksi pertanian pada umumnya, b. dan pada khususnya melakukan pembangunan baru teknologi complete units of rice mill-ling plant dimulai dengan 1 (satu) proyek di daerah Kabupaten Karawang (i.e. didaerah Tjebanik), c. serta melakukan segala tindakan dan pemanaan yang bertalian dengan maksud tersebut di atas.
3. Jumlah modal yang akan ditangan dalam 1 (satu) proyek di-maksud adalah sebesar Rp.125.000.000,- (terdiri dari nilai in-ven dari pada barang equipments/services ad US\$ 232.960,- dengan kurs Rp 32,-).
4. Keterbatasan problematik yang dihadapi se-hari2 dalam fase pelaksanaan problematik yang dihadapi pada umumnya dan di- daerah Karawang pada khususnya dewasa ini terlokasi dalam tingkat pre-processing yang menurut kenyataan kini berda- lah setjara konvensional (kolot), yaitu:
 - (1). ESAMBAK padi, dituangkan saja di pelatana paber-ri (sira kerukut) (in open air),
 - (2). pengolahan padi, dilakukan dengan amukal tenaga manusia untuk mengompaia ia sebagai 3 kali di- nar setahari, hal mana tidak dapat dilakukan pada hari2 bekerja dan bila ada banjir akan diwara.

Menurut survey yang teliti oleh P.A.O. export, Dr. Franco Garibaldi, di daerah Karawang, waste yang terdijadi dari proses pre-processing setjara kolot itu berkisar pada 8% dari berat padi yang diboli, sedangkan waste yang terdijadi dengan the very old rice mills dengan out of date equipments banja- lah ± 2% saja.

Santa dijumlah...

SALINAN. Lembaran 2.8/4.

PERSATUAN PERGILIHAN PADI INDONESIA
(PERPAD)
(INDONESIAN RICE MILLERS ASSOCIATION).

Alamat: Tjeban Karawang Barat. Tilpon No.8
Dj. Karangrejo No.1 Karawang.

Daerah, 15 Djuli 1970.-
Rencana, 15 Djuli 1970.-

Keperluan: Permohonan Fasilitas
Perihal: Perumahan Modal Negara
Negari.

Kepada Jih:
P.T. Karawang Rice Milling Centre
(KARIMIC LTD.)
Dj. Prapantja IV/55
J A K A R T A.

Dengan hormat,
Berdasarkan surat Saudara No. 017/AS/70, tertanggal 17 Djuli 1970 yang telah ditunjukkan kepada Bapak Bupati, ter- kasannya disampaikan kepada kami, dengan ini kami beritahu- kan, bahwa perusahaan pengalihan padi P.T. KARIMIC LTD. NOMOR SI BUKA No. 483/III/2/70 tanggal 15 - 7 - 1970 Surat Izin K.O. No. 883/1407/III/1970 tanggal 13 Djuli 1970 telah didaftar sebagai anggota PERPAD Tjeban Karawang, dengan kode P.P.N. 00.45. Demikian agar Saudara selina.

SURETEL. Surat kami, I * t u a, terd. ADJO HOSMANJJO.

Untuk selinan yang akan banjaja dengan selina, terd. ADJO HOSMANJJO.

KARIMIC LTD.
KARAWANG RICE MILLING CENTRE

Tjeban Karawang Barat.

Dicatat: Di-ctai 1 (satu) copy resmi.

Surat dari Manager PT Karawang Rice Milling Centre (Karamic Ltd), Jakarta kepada Menteri Keuangan mengenai permohonan fasilitas PMDN PT Karawang Rice Milling Centre (Karimic Ltd), 15 September 1970.
Sumber : ANRI, Meneg Bidang Ekuin 1967-1973 No. 5574



PERIKANAN & PETERNAKAN



Sektor perikanan dan peternakan di Karawang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada masa VOC, wilayah Karawang memberikan keuntungan bagi VOC dari monopoli komoditas garam, penangkapan ikan dan peternakan, terutama sapi. Karawang menjadi salah daerah yang memenuhi kebutuhan protein hewani (daging sapi) di Batavia. Sapi-sapi dari Karawang dibawa ke Batavia melalui jalan darat atau sungai.

Pada masa kolonial, pemerintah tidak banyak menaruh perhatian terhadap sektor perikanan dan peternakan di Karawang dibandingkan dengan sektor pertanian dan perkebunan. Namun demikian, Karawang tetap menjadi daerah penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda untuk pemenuhan kebutuhan perikanan dan peternakan di Batavia.

Perhatian terhadap sektor perikanan dan peternakan mulai meningkat pasca kemerdekaan Indonesia. Pemerintah melihat potensi sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun olahan hasil perikanan di Karawang. Pemerintah mendorong pengembangan budidaya ikan air tawar (kolam, minapadi dan Karamba Jaring Apung/KJA) dan payau (tambak), budidaya udang dan kerang, serta peningkatan teknologi bidang perikanan.

Pada sektor peternakan, Karawang memiliki potensi besar untuk peternakan sapi. Sapi-sapi dari peternakan di Karawang masih menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan di Jakarta. Pemerintah terus berupaya meningkatkan populasi ternak melalui program-program inseminasi buatan dan pemberian bibit unggul. Penggunaan teknologi modern bidang peternakan juga mulai digalakkan untuk menunjang produksi pakan, pembibitan, penggemukan.

Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan sektor perikanan dan peternakan di Karawang dari masa ke masa.



Laporan dan perkembangan dan keadaan ternak tahun 1865 di Asisten Residensi Karawang

Spesies	Merkul dan jenis	Perubahan jumlah ternak Karawang							Perubahan jumlah ternak Karawang									
		Buffs			Kerbau		Kuda		Buffs			Kerbau		Kuda				
		Januari	Agustus	Desember	Januari	Agustus	Desember	Januari	Agustus	Desember	Januari	Agustus	Desember	Januari	Agustus	Desember		
Sapi	Wanajassa	112	240	300	2	6	1	271	120	500	67	2	136	25	1	172	1	181
	Sindang Kassie	1100	2000	2500	17	100	200	313	400	117	40	107	100	10	100	100	100	100
	Adiarsa	2000	2000	2000	30	10	100	100	207	60	10	100	40	10	100	100	100	100
	Krawang	2000	2000	2000	100	250	200	300	200	200	20	70	200	60	100	700	100	100
	Tjajang	1700	1800	2000	1	1	1	70	70	60	0	1	5	10	6	100	1	0
	Pamanoean	1000	1000	1000	200	100	700	1100	1000	2000	100	100	200	100	100	1000	100	100
Kerbau	Wanajassa	1000	1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sindang Kassie	1000	1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pamanoean	1000	1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kuda	Wanajassa	1000	1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sindang Kassie	1000	1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pamanoean	1000	1000	1000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Karawang, 25 April 1865
D. J. K. ...
...

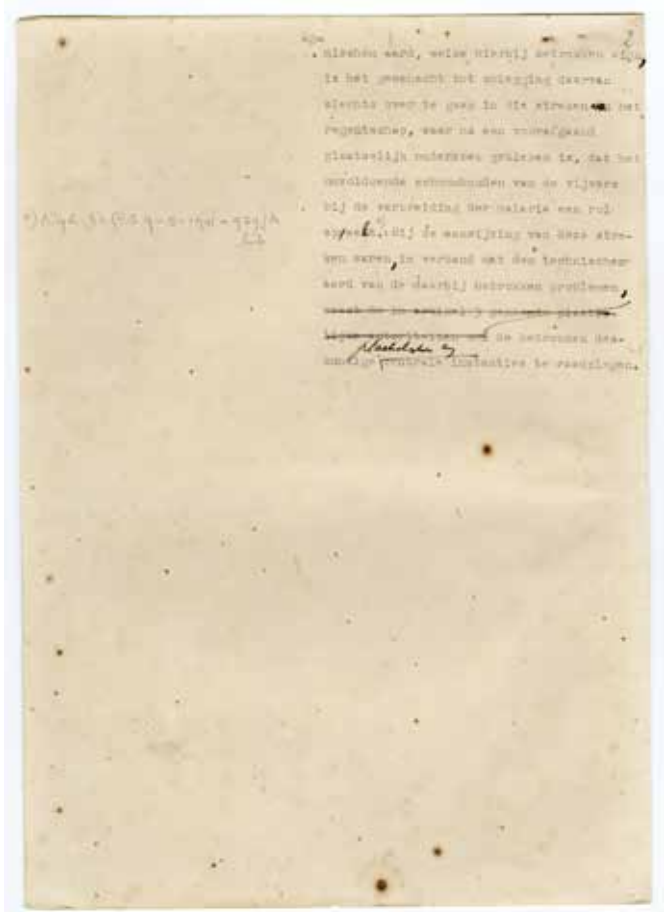
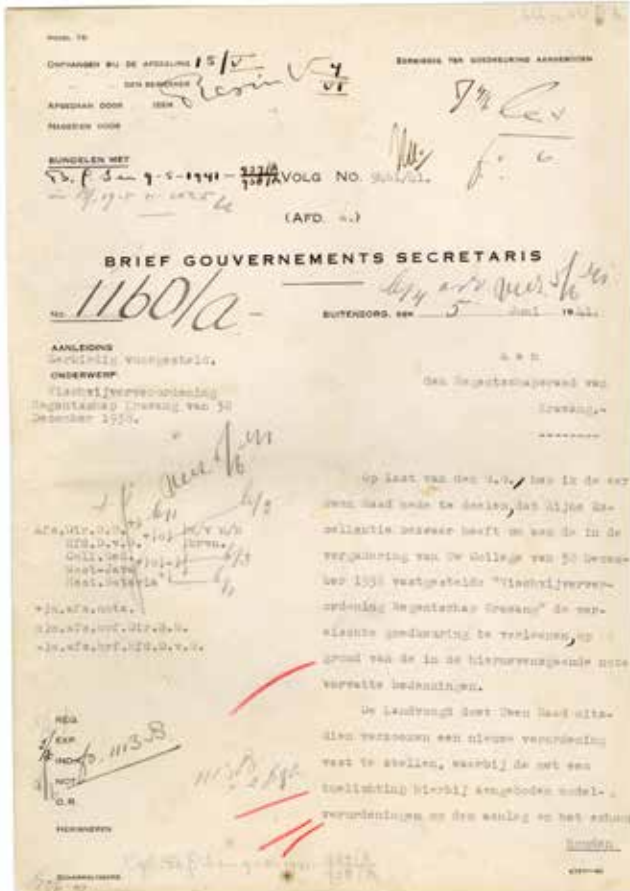
Laporan dan perkembangan dan keadaan ternak tahun 1865 di Asisten Residensi Karawang

Spesies	Merkul dan jenis	Perubahan jumlah ternak Karawang		
		Buffs	Kerbau	Kuda
Sapi	Wanajassa	112	240	300
	Sindang Kassie	1100	2000	2500
	Adiarsa	2000	2000	2000
	Krawang	2000	2000	2000
	Tjajang	1700	1800	2000
	Pamanoean	1000	1000	1000
Kerbau	Wanajassa	1000	1000	1000
	Sindang Kassie	1000	1000	1000
	Pamanoean	1000	1000	1000
Kuda	Wanajassa	1000	1000	1000
	Sindang Kassie	1000	1000	1000
	Pamanoean	1000	1000	1000

Karawang, 25 April 1865
D. J. K. ...
...

Laporan perubahan jumlah ternak sapi, kerbau dan kuda tahun 1865 di Asisten Residensi Karawang (Distrik Wanajassa, Sindang Kassie, Adiarsa, Krawang, Tjajang Boengien, Pamanoean en Tjiassenlanden, dan Tegalwaroelanden).

Sumber : ANRI, Cultures 1816-1900 No. 1620



Surat dari Gouvernements Secretaris No. 1160/a tanggal 5 Juni 1941 mengenai Peraturan Tambak Ikan di Regentenschap Karawang tanggal 30 Desember 1938 yang menjelaskan mengenai peraturan dalam pemeliharaan tambak terkait dengan penyebaran malaria yang terjadi di daerah terjangkit

Sumber : ANRI, Alg. Sec. GB-MGS 1890-1942 No. 5835



Presiden Suharto didampingi oleh Ibu Tien Suharto, Menteri Sekretaris Negara (Sudharmono, SH), Menteri Pertanian (Afandi), Menteri Koperasi/ Kabulog (Bustanil Arifin), Menteri PU (Suyono Sosrodarsono), dan para pejabat negara meninjau pembenihan udang di Karawang, Jawa Barat, 10 Desember 1985.

Sumber : ANRI, Arsip Foto Setneg RI 1966-1989 No. 2361



Presiden Suharto didampingi oleh Ibu Tien Suharto, Menteri Pertanian Afandi, Sekmil Laksamana Kardono dan rombongan pejabat negara, meninjau tambak udang di Karawang, Jawa Barat, 10 Desember 1985.

Sumber : ANRI, Arsip Foto Setneg RI 1966-1989 No. 2368



Presiden Soeharto menghadiri panen udang di Karawang, Jawa Barat, 1986.

Sumber : ANRI, Arsip Foto Setneg RI 1966-1989 No. 2359



Presiden Soeharto didampingi oleh Bustanil Arifin, Ginandjar Kartasasmita dan Ir. Radinal Mughtar sedang meninjau Tambak Inti Rakyat (TIR) di Karawang, Jawa Barat sebagai percontohan, 18 Oktober 1986.

Sumber : ANRI, Arsip Foto Setneg RI 1966-1989 No. 2365



Presiden Soeharto didampingi Menteri Koperasi, Bustanil Arifin S.H dan Menteri PU, Ir. Radinal Muchtar serta rombongan meninjau perikanan Tambak Inti Rakyat (TIR) di Karawang dan menyaksikan panen udang, 20 Nopember 1988.

Sumber : ANRI, Arsip Foto Setneg RI 1966-1989 No. 2366



Presiden Soeharto sedang mendengarkan penjelasan dari seorang pejabat dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan udang di Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang, Jawa Barat, 20 Nopember 1988.

Sumber : ANRI, Arsip Foto Setneg RI 1966-1989 No. 2367



PEREKONOMIAN & INDUSTRI

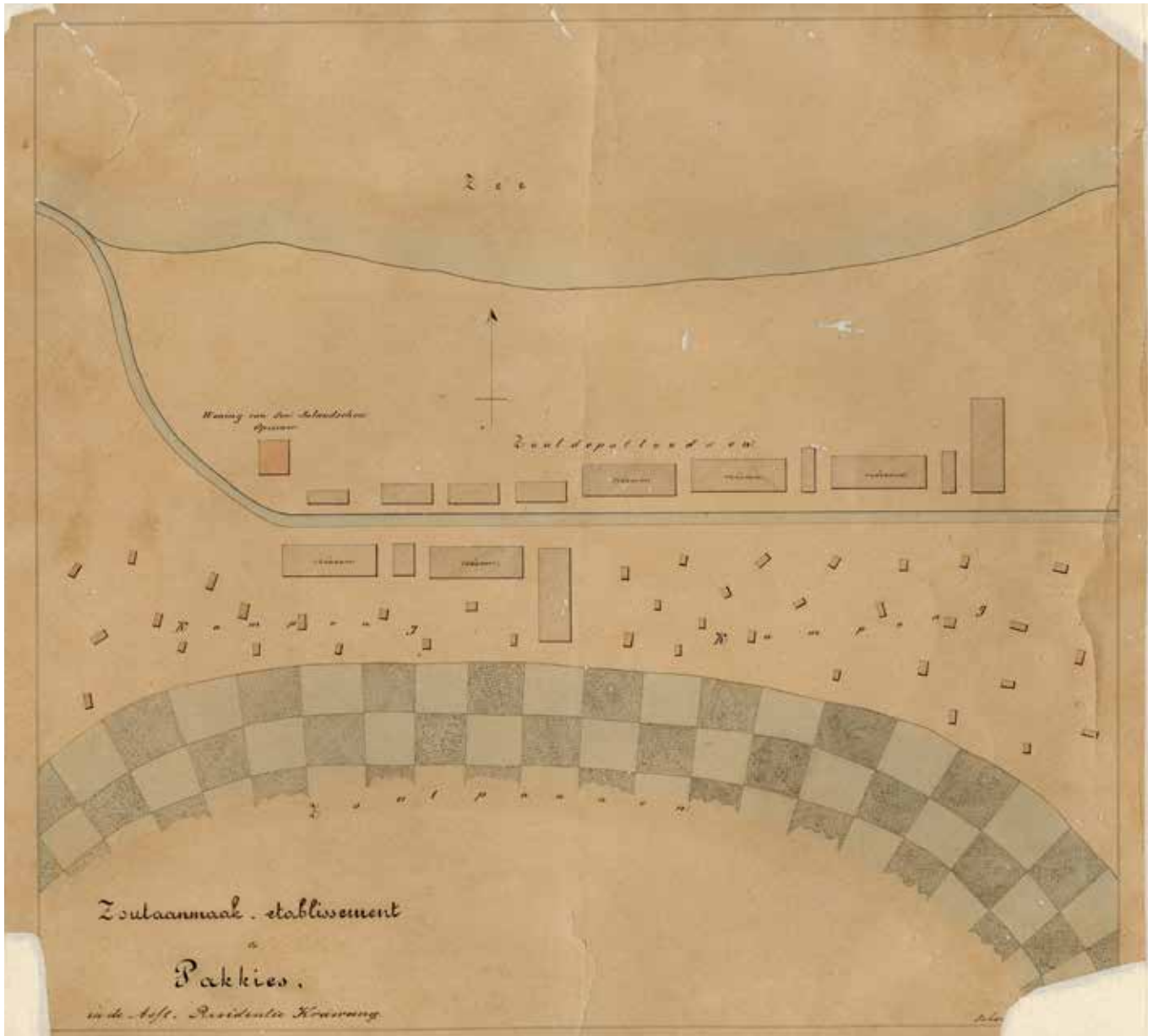


Aktivitas perekonomian di Karawang pada masa lampau berpusat di daerah-daerah yang berada di jalur perdagangan, seperti dekat pesisir dan sekitar sungai. Pada daerah-daerah tersebut berdiri pasar-pasar, tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan.

Pada perkembangannya, aktivitas penggerak perekonomian di Karawang mengalami transformasi yang cukup signifikan. Karawang yang semula bertumpu pada sektor pertanian dan bahkan dikenal sebagai daerah lumbung padi, perlahan-perlahan bergeser pada sektor industri. Pada akhir periode 1980-an, pemerintah mulai melakukan investasi di sektor perindustrian di Karawang hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Pada 1990, berdiri kawasan industri pertama di Kabupaten Karawang, yaitu Karawang International Industrial City (KIIC).

Pada saat ini Karawang telah menjelma menjadi salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Jawa Barat. Sektor industri unggulan di Karawang, antara lain meliputi: industri otomotif; industri elektronik, industri makanan dan minuman, industri kimia. Pada tahun 2018-2022, tercatat bahwa sektor industri di Karawang menjadi penyumbang perekonomian terbesar. Hal ini tidak mengherankan mengingat ada 2 (dua) kawasan industri yang berada di Kabupaten Karawang saat ini, yaitu: (1) Kawasan Industri Cikarang, dan (2) Kawasan Industri Kujang Cikampek.

Kondisi pandemi Covid-19, pada rentang waktu 2020-2021 sempat melumpuhkan sektor industri di Karawang. Memasuki tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya meningkatkan kembali sektor industri yang terdampak selama pandemi. Kabupaten Karawang secara perlahan-lahan berhasil mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi pada sektor industri. Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan aktivitas perekonomian dan industri di Karawang.



Pendirian Pembuatan Garam kemasan di Residence Karawang, tanpa tahun.

Sumber : ANRI, Departement Van Oorlog 1804-1939 No. HB 691



2 orang pria sedang membuat benang jerami, Karawang, Jawa Barat, [1930].

SUMBER : ANRI, KIT Jabar No. 0646/024



Mesin penyedot lumpur, Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0470/056



2

banyak di antara umat manusia yang belum mampu mencukupi kebutuhan pangan yang minimal sekalipun. Bahkan, tidak sedikit yang menderita kelaparan.

Tema peringatan Hari Pangan Sedunia kali ini adalah : "Pohon bagi Kehidupan". Tema itu mengingatkan kita betapa pentingnya pohon bagi kehidupan. Pohon merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hutan. Dan hutan sangat penting bagi kelestarian sumber daya alam tanah dan air. Kita semua menyadari bahwa sumber daya alam tanah dan air mutlak bagi penyediaan pangan.

Kita sering mendengar terjadinya banjir besar maupun kekeringan yang melanda suatu wilayah. Bencana itu tidak hanya meminta korban tanaman, ternak dan tanah-tanah pertanian yang subur.

Tidak....



Saudara-saudara;

Hari ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Sejak 11 tahun yang lalu, setiap tanggal 16 Oktober bangsa kita bersama-sama bangsa-bangsa lain memperingati Hari Pangan Sedunia. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran semua bangsa dan mengingatkan kita semua bahwa pangan merupakan masalah yang teramat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dengan memperingati Hari Pangan Sedunia ini setiap bangsa diingatkan agar memikirkan keadaan dan usaha-usaha penyediaan pangan di negerinya masing-masing serta mencari jalan untuk membantu bangsa lain yang masih kekurangan pangan. Hal ini penting, karena dewasa ini masih banyak....

Naskah sambutan pada peringatan hari Pangan Sedunia XI di Desa Sedari,
Karawang, Jawa Barat. 16 Oktober 1991

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 1351.13



2

Di samping itu, perkembangan ekonomi dunia juga serba tidak pasti. Semuanya tadi memerlukan kewaspadaan kita yang tinggi, baik pada tingkat pemerintahan maupun di kalangan dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan terus Bergeraknya pembangunan industri di tengah-tengah suasana yang penuh ujian tadi, maka hal itu mempertebal kepercayaan kita, bahwa saat-saat yang sulit ini akan dapat kita atasi bersama dan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara;

Jika kita menengok sejenak ke belakang, maka tampak garis naik dari pembangunan kita. Sejak melaksanakan pembangunan hampir 25 tahun yang lalu,....



Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia;

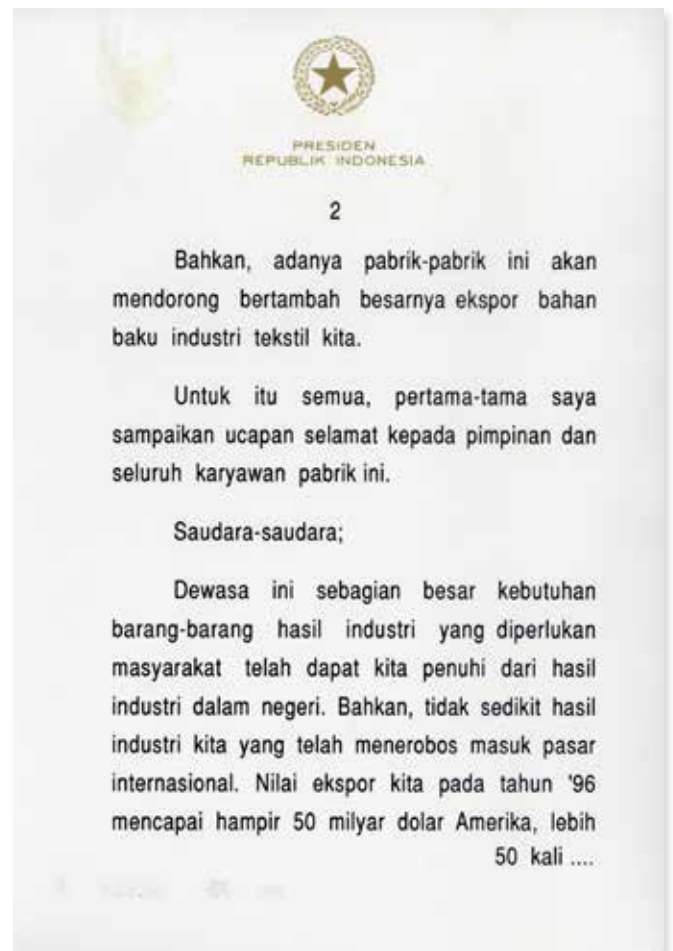
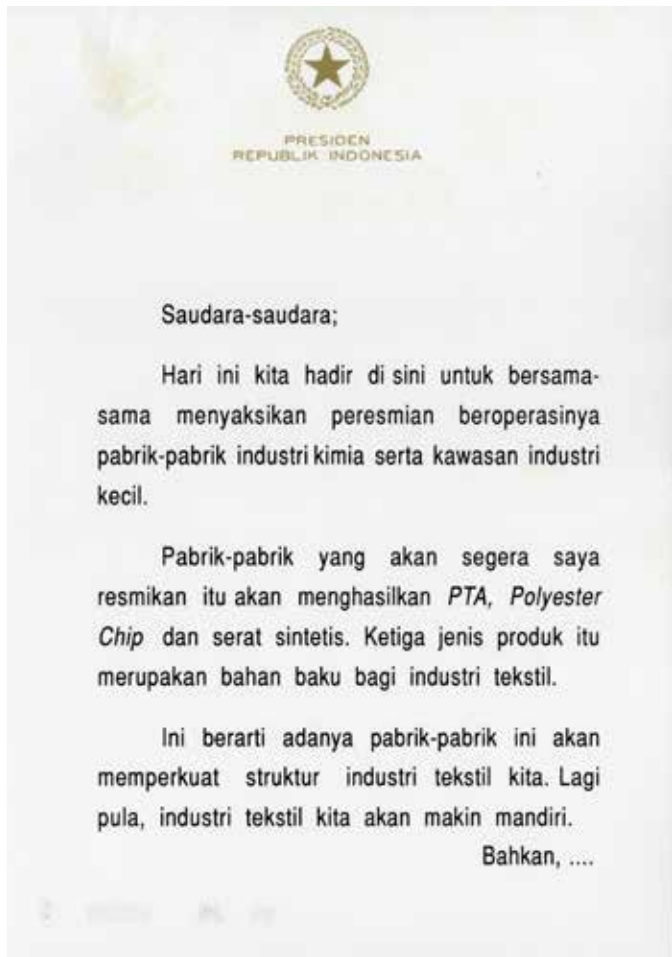
Sebentar lagi, dari tempat ini, saya akan meresmikan 46 buah pabrik yang termasuk dalam kelompok industri mesin, logam dasar dan elektronika yang tersebar di berbagai daerah.

Selesaiya pembangunan pabrik-pabrik tadi sangat membesarkan hati kita semua. Lebih-lebih, jika kita ingat bahwa akhir-akhir ini perekonomian kita sedang berada dalam suasana yang penuh dengan ujian berat. Kita sedang mengadakan penyesuaian-penyesuaian, agar perekonomian kita tetap sehat dan kokoh, agar kita terus dapat melanjutkan pembangunan secara aman.

Di samping....

Naskah sambutan pada upacara peresmian 46 buah pabrik kelompok industri mesin, logam dasar dan elektronika di Karawang Jawa Barat. 21 Januari 1992

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 826.2



Naskah sambutan pada peresmian pabrik PT Polyester Chip dan serat sintetis PT Polysindo Eka Perkasa serta kawasan industri kecil PT Kawasan Industri Citarum di Desa Kiara Payung, Karawang, Jawa Barat. 25 April 1997

Sumber: ANRI, Pidato Presiden Soeharto No. 774.7



SOSIAL BUDAYA



Perkembangan sosial-budaya di Karawang merupakan sebuah proses yang dinamis dan terus berupaya menyesuaikan dengan perubahan zaman. Proses akulturasi kebudayaan di Karawang bermula dengan masuknya pengaruh Hindu-Budha di Nusantara. Relief pada candi-candi yang ditemukan di Karawang menggambarkan perkembangan seni dan budaya, arsitektur dan kepercayaan masyarakat Karawang selama masa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha.

Masuknya pengaruh Islam di Karawang pada sekitar abad ke-15, memberikan perubahan terhadap pola sosial-budaya yang sebelumnya kental dengan pengaruh Hindu-Budha. Sistem kasta di masyarakat pada masa Hindu-Buddha mulai digantikan oleh sistem sosial yang lebih egaliter. Seni dan arsitektur Islam mulai terlihat dalam bangunan-bangunan seperti masjid, makam dan rumah-rumah penduduk. Penggunaan ornamen Islam seperti kaligrafi dan motif-motif geometri menjadi ciri khas pada saat itu.

Kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda, kembali membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial-budaya di Karawang. Masih banyak ditemukan bangunan-bangunan bergaya arsitektur khas masa kolonial (arsitektur indis) di Karawang, dengan ciri khas atap limasan, jendela besar, dan teras yang luas. Di Karawang juga banyak gereja yang dibangun pada masa kolonial, dan mengadopsi gaya arsitektur Eropa, dengan menara tinggi dan ornamen-ornamen khas Eropa.

Mayoritas suku yang mendiami wilayah Karawang adalah Suku Sunda, sehingga kebudayaan Karawang saat ini tidak lepas dari hasil akulturasi budaya antara budaya lokal (Sunda) dengan budaya Eropa (Belanda). Pada saat ini, Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya memelihara seni-budaya tradisional Karawang agar tidak tergerus dengan perubahan zaman.

Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan kondisi sosial-budaya di Karawang dari masa ke masa.



Statistik penduduk Karawang tahun 1824 yang memuat data mengenai kelahiran, kematian, jumlah anak-anak di bawah umur, dan lain-lain.

Sumber: ANRI, *Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891*, No. 66

Statistik van Java
Jan 1824

Residensi Krawang
Borekling

Blad L. B.
N. 1.

1	2	3	4	5	6	7	8
Wolven	Wolven	Wolven	Wolven	Wolven	Wolven	Wolven	Wolven
1840	28	1792	22	1810	22	1828	22
1850	3	18170	22	1835	22	1850	22
24927	1	24903	22	250	22	250	22
61,000	27	60,000	22	800	22	800	22
330	2	330	22	330	22	330	22
3317	-	303	22	330	22	330	22
225	-	204	22	330	22	330	22
1003	2	929	22	63	22	63	22
200	1	172	22	22	22	22	22
150	3	120	22	22	22	22	22
980	2	970	22	52	22	52	22

Woningbladen 5 July 1824
De Resident van Krawang



Batu-batu kuno (tampak bagian depan), Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Jabar No. 1151/010



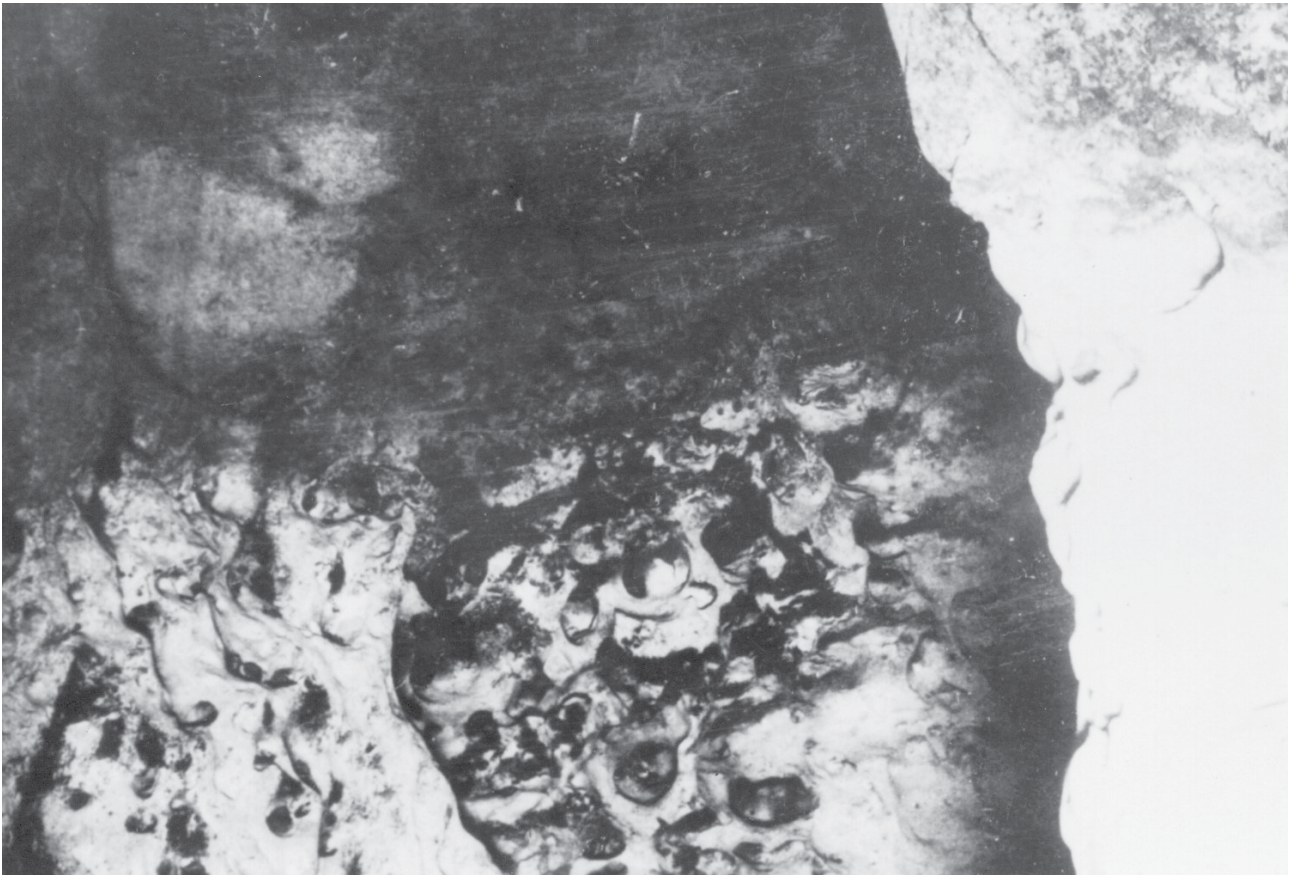
Patung berwarna brons di Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber: ANRI, KIT Jabar No. 1151/032



Gamelan dengan pemainnya, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0908/077



Goa dengan sarang burung yang dapat dimakan di Tegal Waru, Karawang, Jawa Barat, [1930].

Sumber : ANRI, KIT Jabar No. 0943/057



Candi Balongan, 2024.

Sumber: Koleksi Tim PPNSA





Situs Lempeng, 2024.

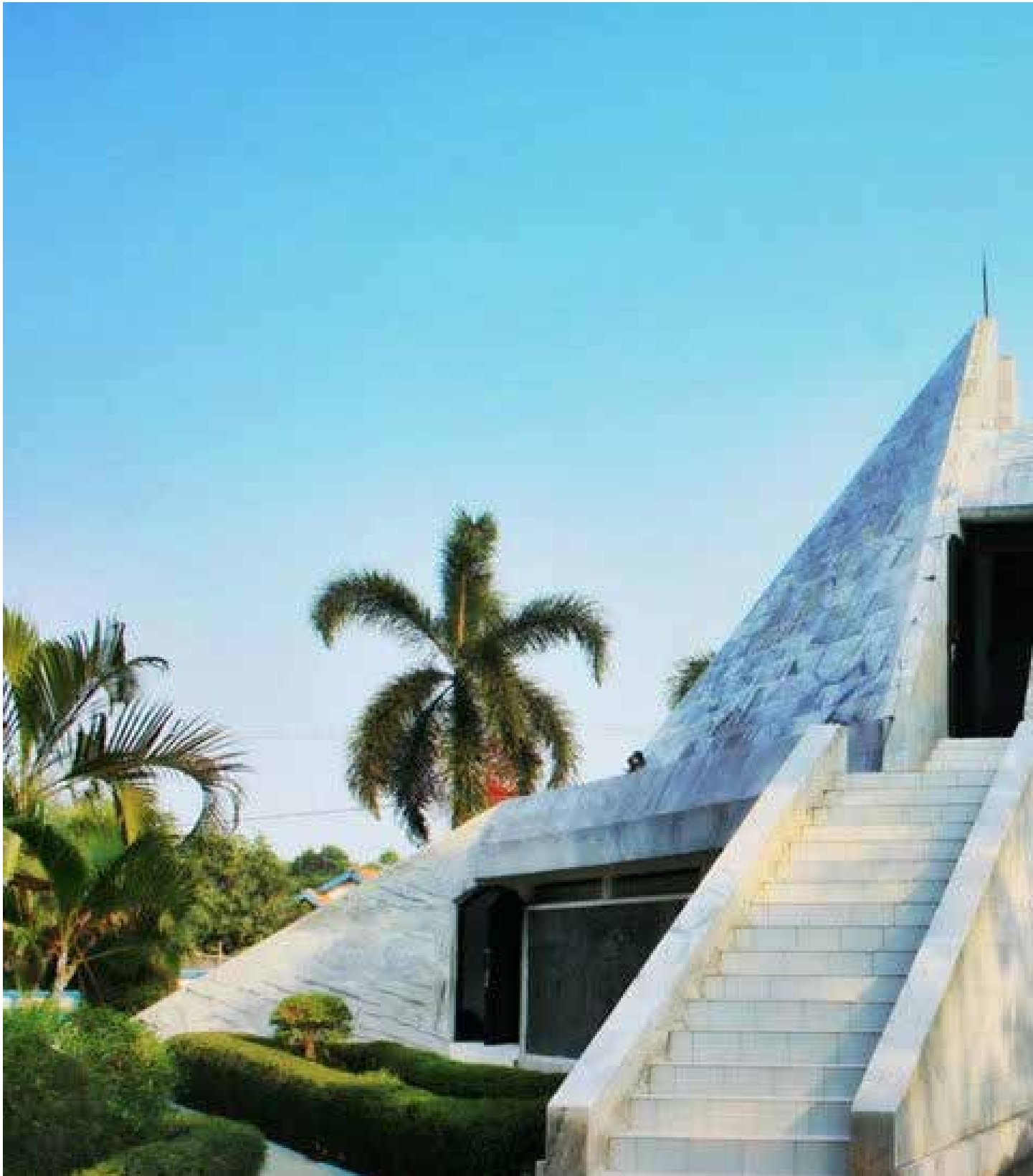
Sumber: Koleksi Tim PPNSA





Rumah Rengasdengklok, 2024.

Sumber: Koleksi Tim PPNSA





Monumen Perjuangan Rawagede, 2024.

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Karawang





Monumen Kebulatan Tekad, 2024.

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Karawang





Candi Jiwa, 2024.

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Karawang



Bendungan Walahar, 2024.

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Karawang



Tugu Proklamasi Rengasdengklok, 2024.

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Karawang



Tugu Padi, 2024.

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Karawang



Bundaran Badami, 2024.

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Karawang



PENDIDIKAN & KEAGAMAAN



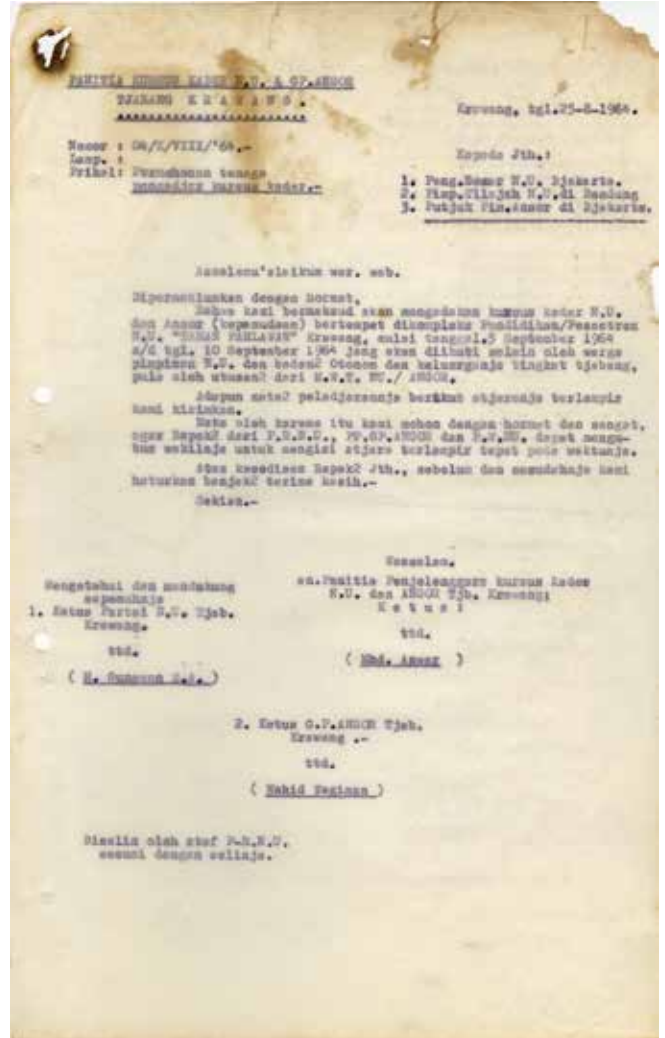
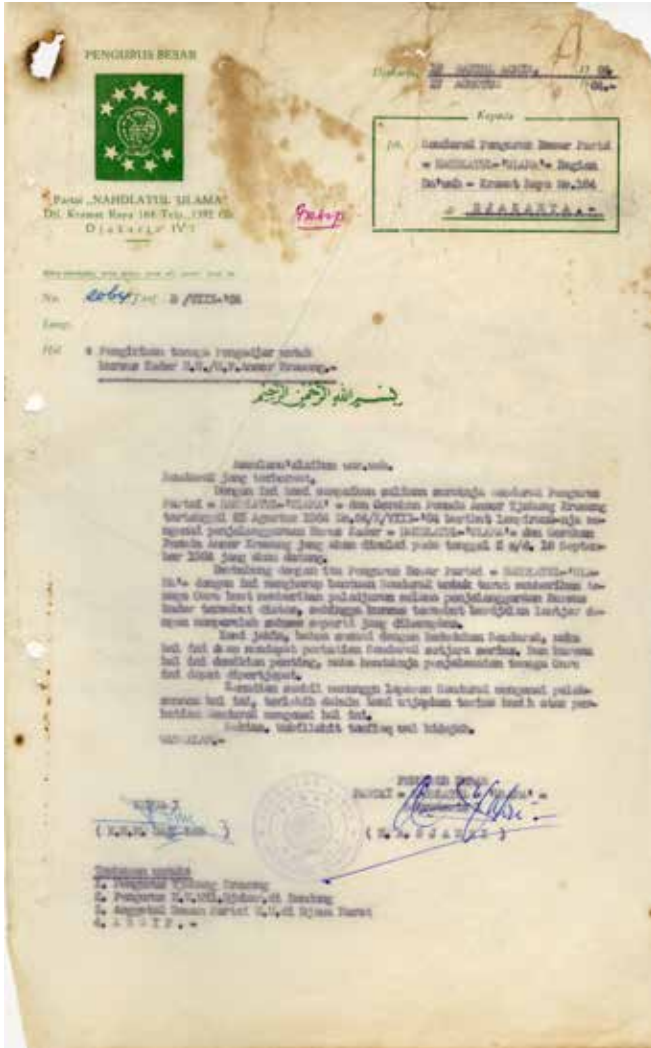
Pada masa kolonial, akses pendidikan bagi masyarakat Karawang, sangatlah terbatas. Pendidikan pada saat itu hanya diperuntukkan bagi kalangan elite Eropa dan pribumi. Hal ini mengalami perubahan secara drastis pasca kemerdekaan Indonesia. Akses pendidikan untuk masyarakat di Karawang terbuka lebar bagi seluruh kalangan. Dari masa kemerdekaan hingga saat ini terus terjadi penambahan jumlah sekolah diberbagai tingkatan, baik sekolah negeri maupun swasta di Karawang.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan pendidikan masyarakatnya. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan kepastian akses pendidikan formal maupun non formal dalam rangka percepatan wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) Tahun dan mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa. Pemerintah Kabupaten Karawang juga secara berkala fokus membenahi dan meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakatnya.

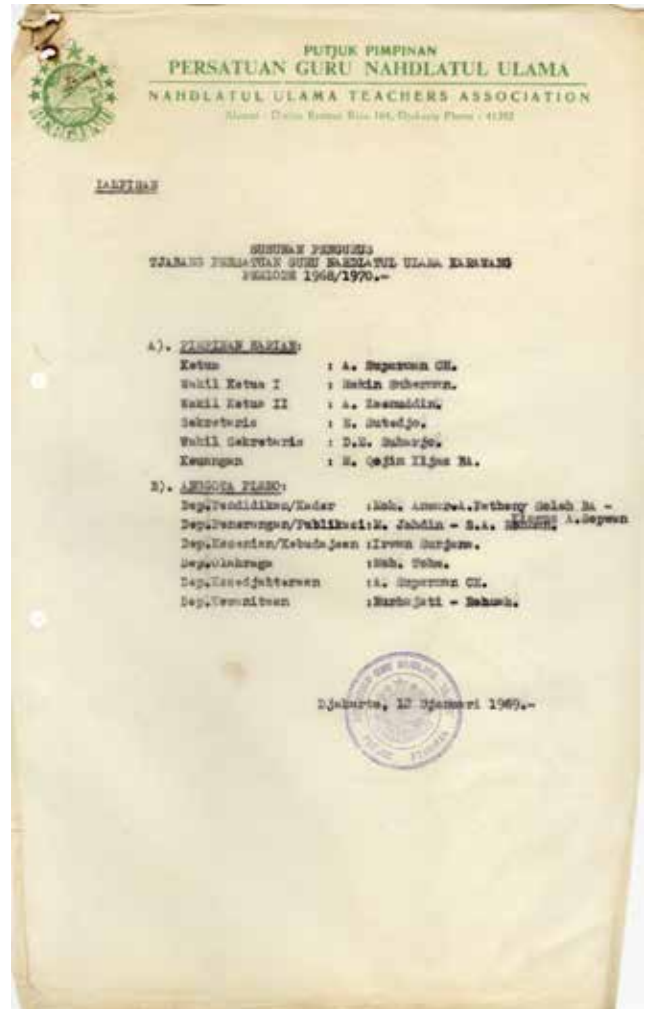
Terciptanya masyarakat Karawang yang cerdas dan berkualitas erat kaitannya dengan sejarah toleransi yang panjang di daerah ini. Toleransi antarumat beragama di Karawang telah tertanam sejak masa perjuangan kemerdekaan, terbukti dengan peristiwa penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok. Ketika itu, tokoh Tionghoa Djiaw Kie Song mempersilahkan rumahnya menjadi tempat singgah bagi kedua tokoh proklamator tersebut. Partisipasi aktif masyarakat Tionghoa dalam mempersiapkan kemerdekaan menjadi bukti nyata semangat persatuan dan toleransi di Karawang.

Hingga saat ini, warisan toleransi tersebut masih terus terjaga. Kabupaten Karawang tercatat sebagai salah satu kabupaten dengan indeks kerukunan beragama yang tertinggi di Indonesia. Kabupaten Karawang bahkan menjadi rujukan sebagai wilayah dengan tingkat toleransi beragama di Jawa Barat. Pada bab ini, ditampilkan koleksi arsip yang menggambarkan kondisi pendidikan dan keagamaan di Karawang dari masa ke masa.



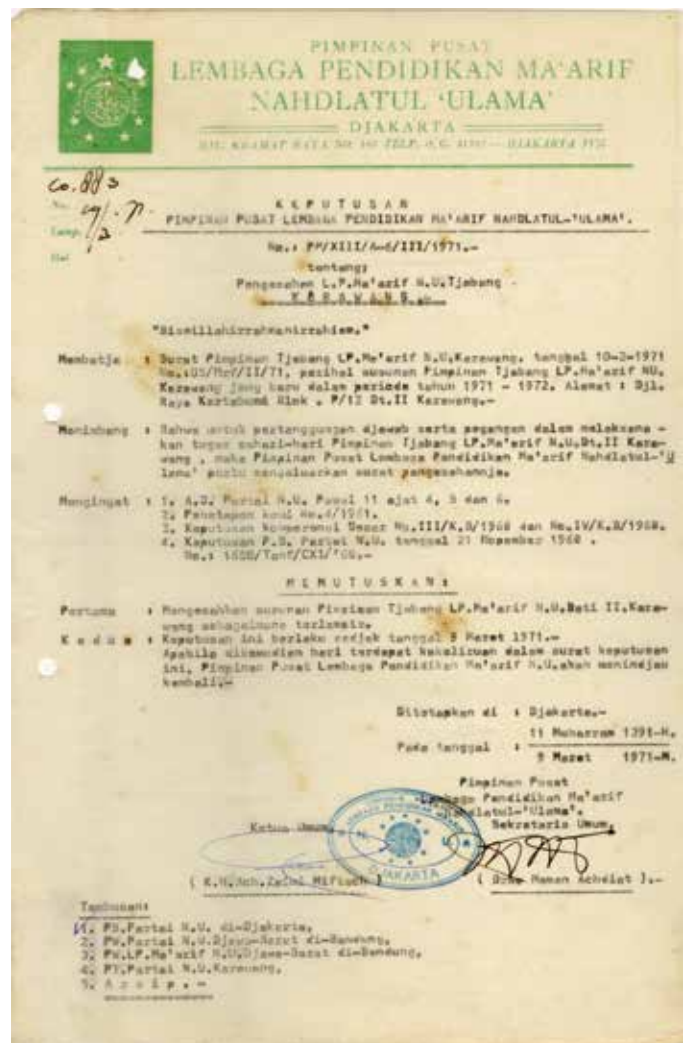
Berkas mengenai penyelenggaraan kursus kader PCNU/ PC GP Anshor Karawang. 25 - 27 Agustus 1964.

Sumber: ANRI, Arsip Nahdlatul Ulama (NU) 1948-1979, No. 1128



Surat-surat mengenai pengesahan susunan kepengurusan PC Pergunu Karawang. 20 Januari 1969.

Sumber : ANRI, Arsip Nahdlatul Ulama (NU) 1948-1979, No. 1525




Surat-surat mengenai susunan kepengurusan PC LP Ma'arif Karawang. 25 Maret 1971

Sumber: ANRI, Arsip Nahdlatul Ulama (NU) 1948-1979, No. 1403



80



**YAYASAN
"VIHARA BUDHA DHAMMA"**
JL. TUPAREV KARAWANG
JAWA - BARAT

Sekertariat D/A : Jl. Tuparev No. 326 - 348 Telp. 61370 - 61423 - 61564 Karawang

No. : 01/YVBD/I/1989.- Karawang, 02 Januari 1989.-

Lamp. : 1 (Satu) berkas. Kepada Yth ;

Perihal : Laporan Pendataan Tempat Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen
Ibadah Vihara Budha Dhamma Karawang. Agama Propinsi Jawa-Barat.

Cq. Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha


Di. B A N D U N G


Memenuhi Surat Bapak tertanggal 10 September 1988, Nomor: WI/88.010/20121/88, perihal dimaksud pada pokok surat diatas, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan data isian yang telah diisi - beserta fotocopy akte pendirian Yayasan dan surat-surat kelengkapan lainnya yang terkait ;


Demikian kami sampaikan mohon petunjuk pelaksana lebih lanjut, terima kasih atas perhatian bapak.

Hormat kami ;

PENGURUS YAYASAN VIHARA BUDHA DHAMMA
K A R A W A N G.


NYANA MANGSA S.H
 K E T U A.




NY. LILIH LILIHATI. S.H
 SEKRETARIS.

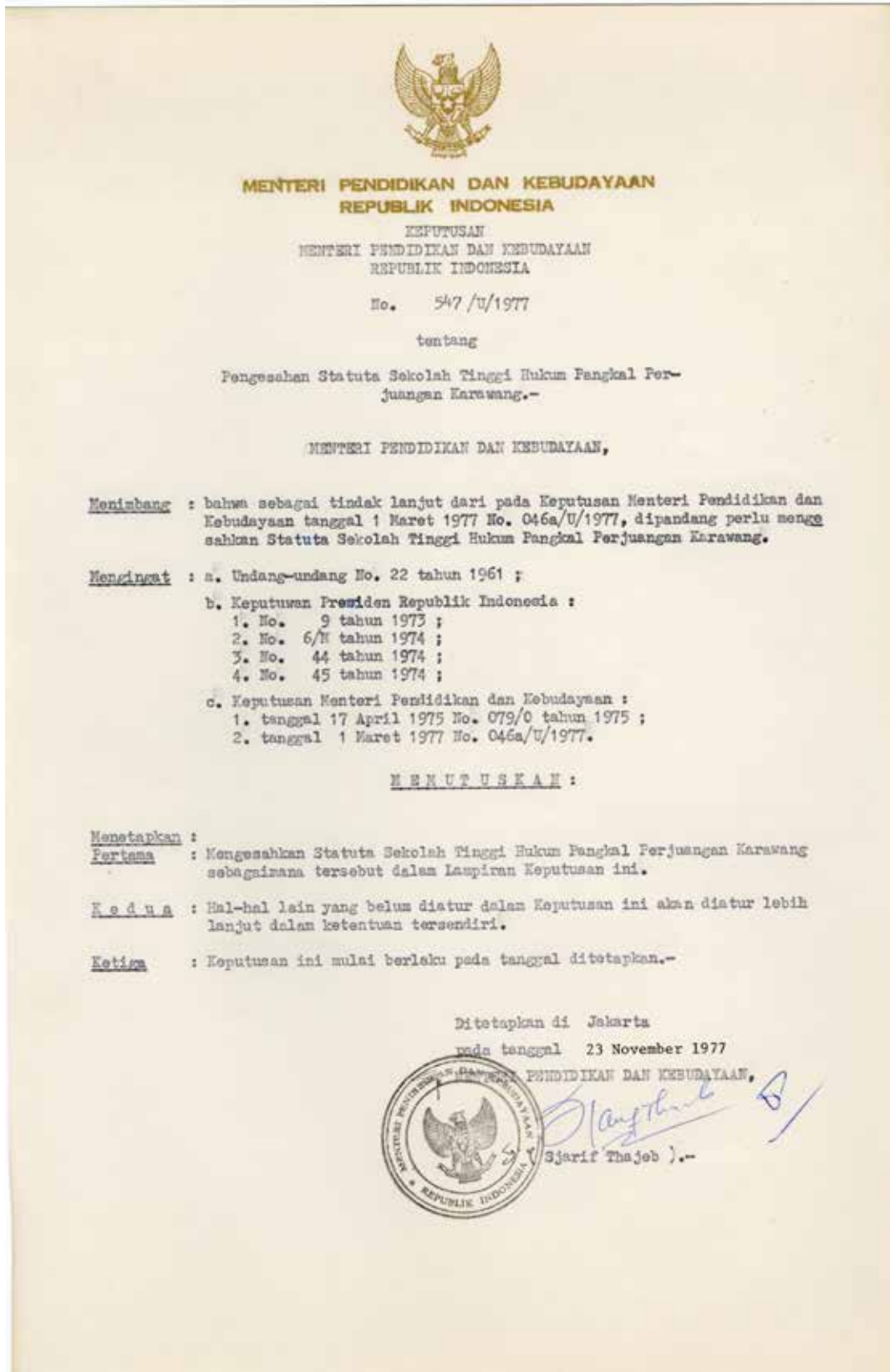
TERBUKUSAN : Disampaikan kepada ;

- ✓ 1. Yth. Bapak Dirjen Bimas Hindu dan Budha Depag R.I di JAKARTA
- ▼ 2. Yth. Bapak Direktur Urusan Agama Budha-Depag R.I di JAKARTA
3. Yth. Bapak Ketua WALUBI Jawa-Barat di BANDUNG
4. A r s i p.-

PENYAMPAIAN TERBUKUSAN 18/01/1989
 B.A. D.1

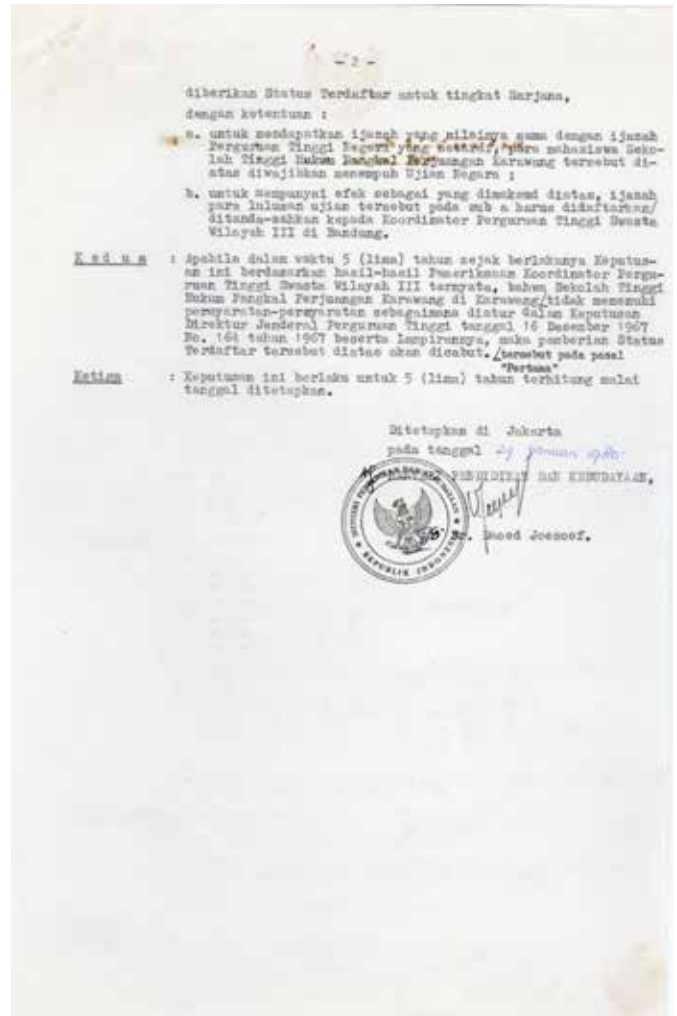
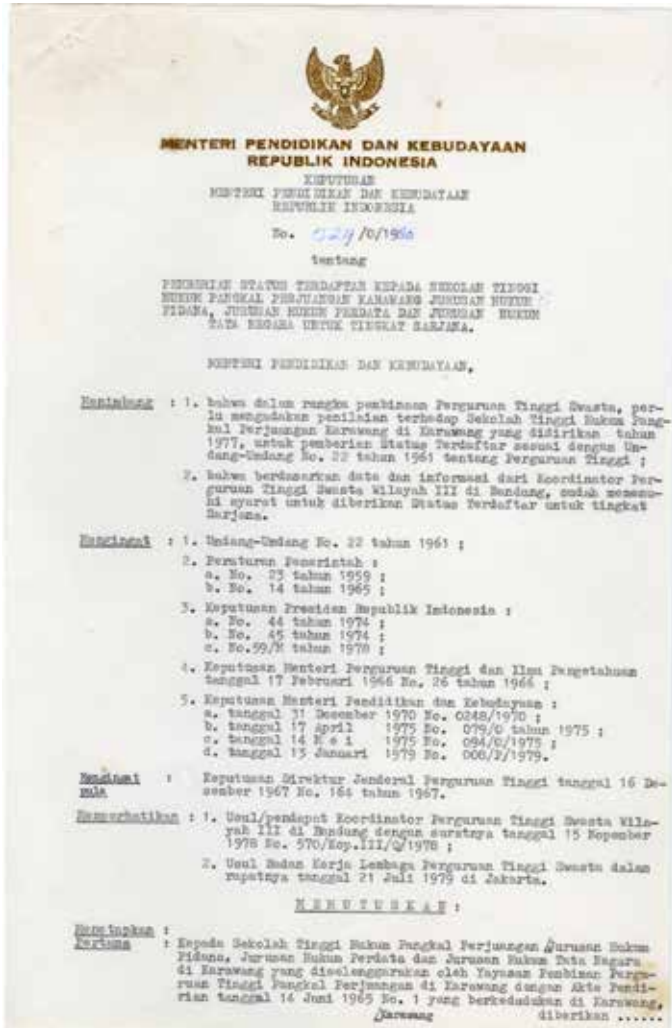
Berkas mengenai pendataan dan pendaftaran rumah-rumah ibadah Buddha (kelenteng dan vihara) di Pontianak, Jakarta, dan Karawang, 2 Januari 1989.

Sumber : ANRI, Departemen Agama RI No. 7686



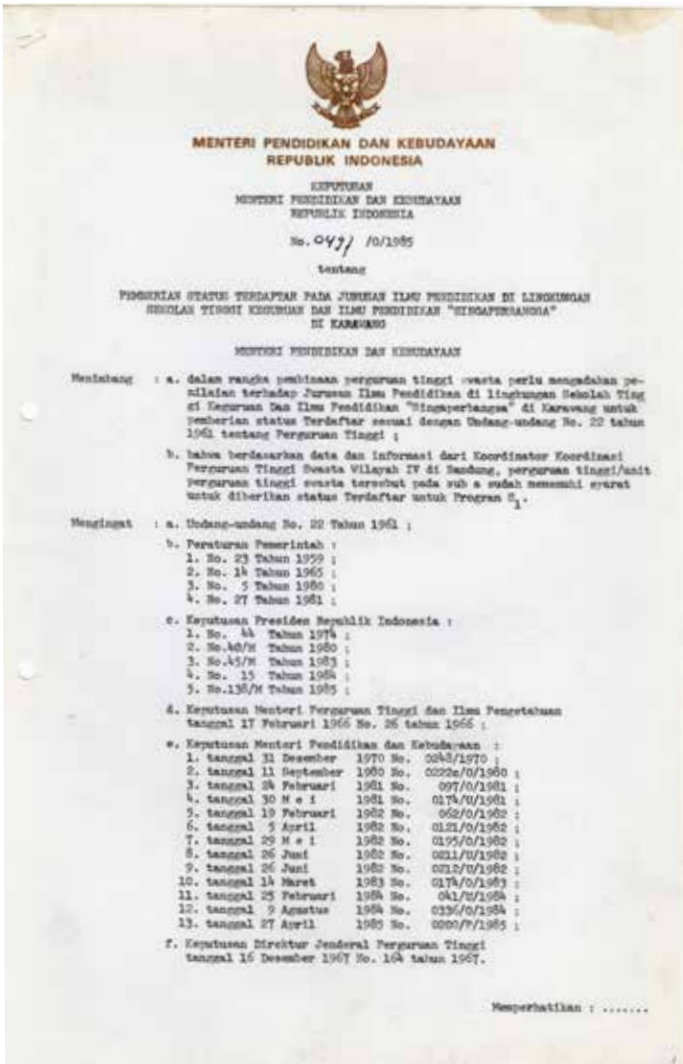
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0547/U/1977 tentang Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan Karawang. Nb. Tidak lengkap. 23 November 1977.

Sumber: ANRI, Depdikbud RI 1959-2010 No. 2403



Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 029/O/1980 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perjuangan Karawang Jurusan Hukum Pidana, Jurusan Hukum Perdata dan Jurusan Hukum Tata Negara untuk Tingkat Sarjana. 29 Januari 1980

Sumber: ANRI, Depdikbud RI 1959-2010 No. 3225



Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0497/P/1985 tentang Pemberian Status Terdaftar pada Jurusan Ilmu Pendidikan di Lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan "Singaperbangsa" di Karawang, 1 November 1985. Sumber: ANRI, Depdikbud RI 1959-2010 No. 6041

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Arsip

- Daftar Arsip Kearsitekturan Departement Van Oorlog 1804-1939, No. HB 2991
- Daftar Arsip Kearsitekturan Departement Van Oorlog 1804-1939, No. HB 691
- Daftar Arsip Kearsitekturan Departement Van Oorlog 1804-1939, No. HB 3817
- Daftar Arsip Kartografi De Haan, No. D.19
- Daftar Arsip Kartografi De Haan, No. E.64
- Daftar Arsip Kartografi De Haan, No. E.81
- Daftar Arsip Kartografi De Haan, No. H.61
- Daftar Arsip Kartografi Topografi Dienst 1899 – 1943, No. 469
- Daftar Arsip Kartografi Topografi Dienst 1899 – 1943, No. 652
- Daftar Arsip Foto RVD Batavia 1947-1949, No. 1791
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0275/05
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0470/056
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0519/064
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0520/032
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0532/090
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0646/024
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0665/024
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0776/045a
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0749/009
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0904/080
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0908/077
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0943/057
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 0958/045
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 1082/009
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 1084/022
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 1120/004
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 1151/010
- Daftar Arsip Foto KIT Jawa Barat, No. 1151/032
- Daftar Arsip Tekstual Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891, No. 66
- Daftar Arsip Tekstual Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891, No. 77
- Daftar Arsip Tekstual Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891, No. 80
- Daftar Arsip Tekstual Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891, No. 90
- Daftar Arsip Tekstual Residensi Krawang-Kerawang 1803-1891, No. 91
- Daftar Arsip Tekstual Residensi Batavia 1613-1904, No. 32-b
- Daftar Arsip Tekstual Residensi Buitenzorg-Bogor 1729-1874, No. 45
- Daftar Arsip Tekstual Cultures 1816-1900, No. 1620
- Daftar Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Produk Hukum 1949-2005, No. 2915
- Daftar Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Produk Hukum 1949-2005, No. 3377

- Daftar Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Produk Hukum 1949-2005, No. 3418
- Daftar Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Produk Hukum 1949-2005, No. 3589
- Daftar Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Produk Hukum 1949-2005, No. 3857
- Daftar Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Produk Hukum 1949-2005, No. 10273
- Daftar Arsip Pidato Presiden Soekarno 1958-1967, No. 345
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie seri Grote Bundel-Besluiten 1891-1942, No. 614
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie seri Grote Bundel-Besluiten 1891-1942, No. 761
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie seri Grote Bundel-Besluiten 1891-1942, No. 3393
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie seri Grote Bundel-Missive Gouvernements Secretaris 1890-1942, No. 4430
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie seri Grote Bundel-Missive Gouvernements Secretaris 1890-1942, No. 4878
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie seri Grote Bundel-Missive Gouvernements Secretaris 1890-1942, No. 5835
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie seri Grote Bundel-Ter Zijde Gelegde Agenda 1891-1942, No. 9444
- Inventaris Arsip Tekstual Algemene Secretarie van Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven 1942-1950, No. 1233
- Inventaris Arsip Tekstual Post, Telegraaf en Telefoondienst 1817-1950, No. 2554
- Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara Seri Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia 1950-1959, No. 2730
- Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara Republik Indonesia 1945-1949, No. 237
- Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Pidato Presiden Soeharto 1966-1998, No. 774.7
- Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Pidato Presiden Soeharto 1966-1998, No. 826.2
- Inventaris Arsip Tekstual Sekretariat Negara RI seri Pidato Presiden Soeharto 1966-1998, No. 1351.13
- Inventaris Arsip Tekstual Kementrian Pertahanan RI 1945-1950, No. 1044
- Inventaris Arsip Tekstual Kementrian Pertahanan RI 1945-1950, No. 1334
- Inventaris Arsip Tekstual Kabinet Presiden RI 1950-1959, No. 1380
- Inventaris Arsip Tekstual Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Meneg Ekuin) 1967-1973, No. 1427
- Inventaris Arsip Tekstual Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Meneg Ekuin) 1967-1973, No. 5574
- Inventaris Arsip Tekstual Nahdlatul Ulama (NU) 1948-1979, No. 1128
- Inventaris Arsip Tekstual Nahdlatul Ulama (NU) 1948-1979, No. 1403
- Inventaris Arsip Tekstual Nahdlatul Ulama (NU) 1948-1979, No. 1525
- Inventaris Arsip Tekstual Departemen Agama Republik Indonesia 1950-1998, No. 7686
- Inventaris Arsip Tekstual Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1952) 1959-2010, No. 2403

- Inventaris Arsip Tekstual Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1952) 1959-2010, No. 3225
- Inventaris Arsip Tekstual Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1952) 1959-2010, No. 6041
- Inventaris Arsip Tekstual Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1952) 1959-2010, No. 7686
- Inventaris Arsip Foto PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk 1946-1922, No. 1969
- Inventaris Arsip Foto PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk 1946-1922, No. 1971
- Inventaris Arsip Foto PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk 1946-1922, No. 1972
- Inventaris Arsip Foto PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk 1946-1922, No. 1975
- Inventaris Arsip Foto Kementerian Penerangan RI: Wilayah DKI Jakarta 1955, No. 28140
- Inventaris Arsip Foto Kementerian Penerangan RI: Wilayah DKI Jakarta 1956, No. 3418
- Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara RI 1966-1989, No. 2359
- Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara RI 1966-1989, No. 2361
- Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara RI 1966-1989, No. 2365
- Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara RI 1966-1989, No. 2366
- Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara RI 1966-1989, No. 2367
- Inventaris Arsip Foto Sekretariat Negara RI 1966-1989, No. 2368

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.

Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah Lainnya

- Anonim. 1839. "Statistieke Aanteekeningen over Karawang", Tijdschrift voor Neerland's Indië-Tweede Jaargang Eerste Dell. Batavia: Landsdrukkerij.
- Anonim. 1922. "Nederlandsche-Indie Uitkomsten der in de Maand November 1920" Gehouden Volkstelling Deel II. Batavia: Drukkerijen Ruygrok & Co.
- Daendels, Herman Willem. 1814. Staat der Nederlandsche Oost Indische Bezittingen in de jaren 1808-1811. Den Haag: Hendrik van Teeckelenburgh and the Van Cleef brothers.
- De Haan, F. 1910. Priangan: de Preanger-Regentschappen onder Het Nederlandsche Indie Bestuur tot 1811. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- Departement Van Economische Zaken. 1936. Volkstelling 1930 deel VIII overzicht voor Nederlandsch Indie. Batavia: Landsdrukkerij.
- H.M. Idris. "Peristiwa Karawang Kota dan Sekitarnya pada masa Revolusi". Makalah disampaikan pada acara Temu Tokoh dan Seminar Sejarah "Refleksi Nilai-Nilai Juang 45.
- Hageman Jcz, J. 1869. Geschiedenis Soenda-Landen. Batavia: Batavia Lange & Co.
- Harry Octavianus Sofian, dkk. 2017. Seri Jejak Purbakala: Berpetualang ke Karawang, Yuuk!. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

- Iim Imadudin, "Revolusi dalam Revolusi: Tentara, Laskar, dan Jago di Wilayah Karawang 1945-1947", *Patanjala*, Vol. 10, No. 1, Maret 2018, hlm. 35-50.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nina Herlina Lubis, dkk. 2011. *Sejarah Kabupaten Karawang*. Karawang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang.
- _____. 2011. *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*. Bandung: Yayasan Sejarawan Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. 2024. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2024*. Karawang: Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. 1981. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rijnberg, J. 1867. *Geschiedenis der Nederlanders op Java of in den Nederlandsche Oost-Indische Archipel*. Semarang: De Groot, Kolff & Co.
- Staatsblad van Nederlandsche Indie 1818
- Stapel, F. W. 1940. *Geschiedenis van Nederlandsche Indie*. Amsterdam: NV. Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel.
- Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1898. *Kamerstuk Tweede Kamer 1897-1898 Kamerstuknummer 172 ondernummer 9, Verhoging begroting Nederlandsch-Indië voor 1898*.
- van de Venter, M. L. 1891. *Het Nederlandsche Gezag over Java en Onderhoorigheden sedert 1811*. Den Haag: Martinus Nijhoff.
- van Eysinga, P.P. Roorda. 1843. *Ter Bevordering der Kennis van Nederlandsche Oostersche Bezettingen*. Breda: Ter Boekdrukkerij van de Gebroeders.
- van Rees, Otto. 1880. *Overzicht van De Geschiedenis der Preanger Regentschappen*. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- Veth, P. J. 1882. *Java: Geographisch, Ethnologisch, Historic*. Haarlem: De Erven F.Bohn.

PENUTUP

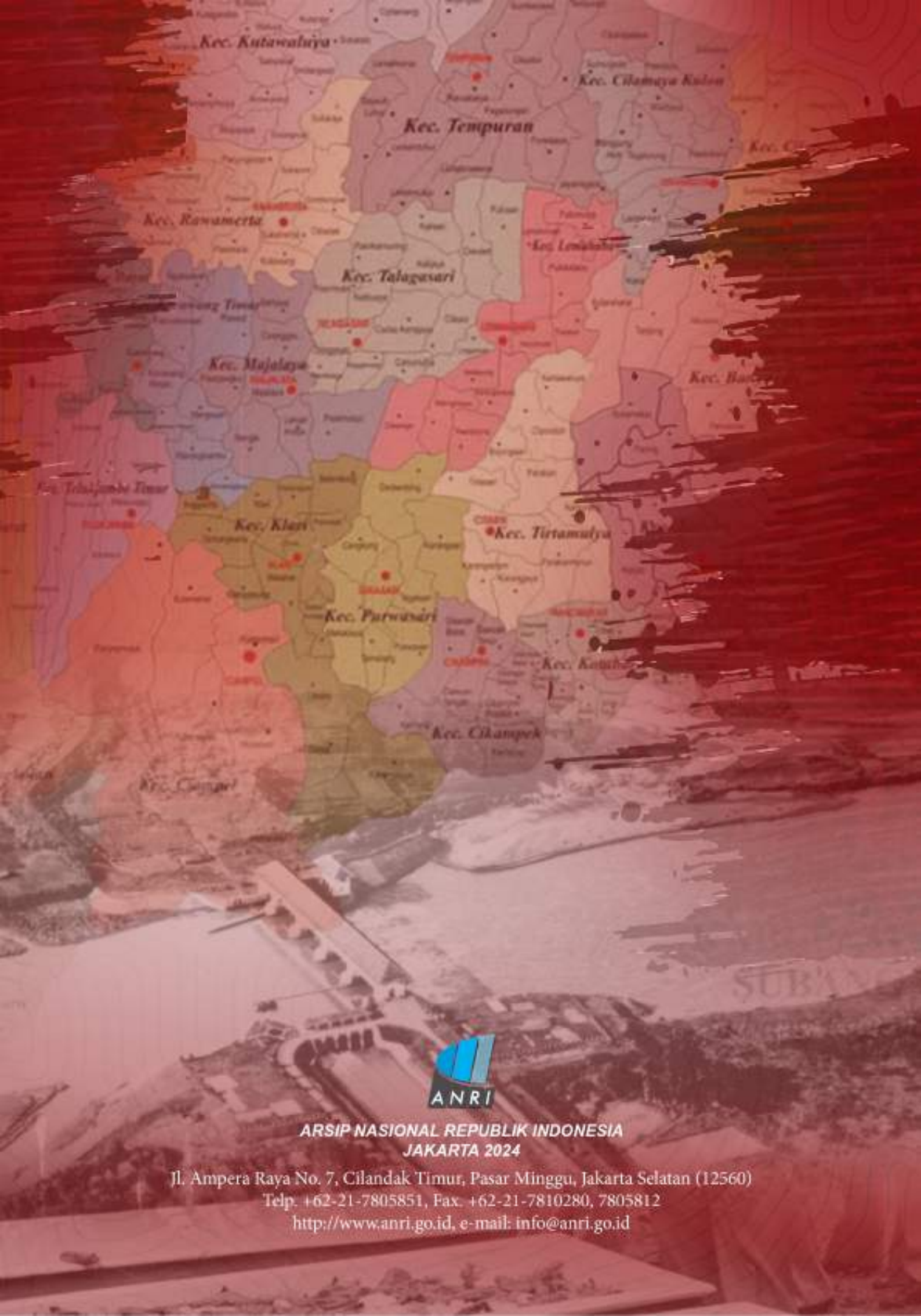
Program citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah diberbagai bidang, termasuk bidang kearsipan. Lembaga Kearsipan diharapkan mampu menjadi salah satu dinas atau instansi yang dapat mewujudkan “*clean government*” dipemerintahan daerah maupun pusat dengan melakukan penyelamatan arsip yang bernilai pertanggungjawaban historis dan hukum.

Arsip sebagai bukti otentik dan sumber informasi yang terpercaya dalam sejarah perjalanan bangsa sesungguhnya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam pengambilan kebijakan pada masa kini. Dan juga kita dapat belajar dari sejarah masa lalu untuk kemajuan dimasa kini dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks. Citra Kabupaten Karawang ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat dengan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah akademisi, dewan, dan masyarakat umum.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Dan akhirnya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2024**

Jl. Ampera Raya No. 7, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (12560)

Telp. +62-21-7805851, Fax. +62-21-7810280, 7805812

<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id